LIPUTAN KHUSUS

TEMPO

EDISI 1-7 OKTOBER 2012

PENGAKUAN ALGOJO 1965
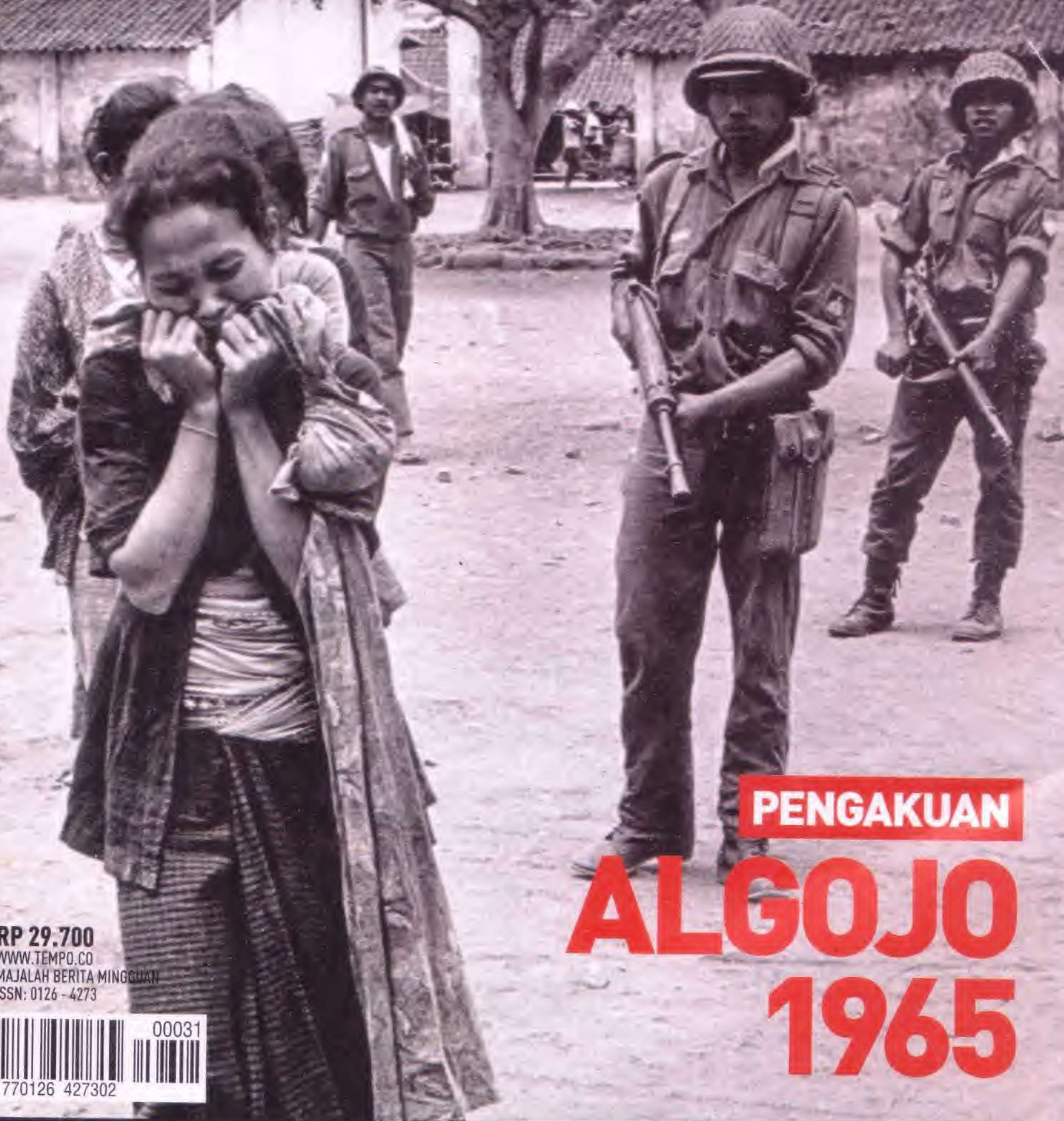
RP 29.700
WWW.TEMPO.CO
MAJALAH BERITA MINGGUAN
ISSN: 0126 - 4273

TEMPO

Cover: Beberapa orang yang diduga terlibat G-30-S di Jawa Tengah digiring oleh tentara (1965).

Foto: Koleksi Perpustakaan Nasional

LIPUTAN KHUSUS

KESAKSIAN PARA ALGOJO 1965

SEJARAH kelam pembantaian orang-orang Partai Komunis Indonesia hidup kembali melalui film *The Act of Killing (Jagal)* karya sutradara Amerika Serikat, Joshua Oppenheimer, yang diputar di Festival Film Toronto, Agustus lalu. Film ini memuat pengakuan algojo Anwar Congo. *Tempo* mencoba melihat peristiwa tragis itu dari perspektif para pembantai. Liputan khusus kali ini juga dilengkapi penelusuran ulang terhadap kamp-kamp konsentrasi yang didirikan militer di Pulau Buru, Plantungan, dan Moncongloe. Pelacakan juga kami lakukan terhadap ladang-ladang pembantaian PKI.

Nasional

Pelemahan KPK

PANAS-dingin hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI memasuki babak baru. Kedua lembaga hukum ini sedang tarik-ulur soal status 16 penyidik yang menjadi tulang punggung KPK. Sebelas penyidik KPK yang berasal dari Polri diminta kembali ke Markas Kepolisian, sementara empat penyidik memilih balik kanan menyusul kolega mereka. Kehilangan personel, KPK pincang.

Ekonomi

Awan Panas Bumi dari London

KEJATUHAN beruntun harga saham-saham Grup Bakrie berimbas sampai ke London, tempat Bumi Plc mencatatkan diri di lantai bursa. Selama dua hari perdagangan, harga sahamnya merosot 46,33 persen. Peristiwa ini juga mencuatkan dugaan skandal keuangan di dua anak perusahaan di Indonesia, yakni Bumi Resources dan Berau Coal. Rencana Bumi Plc menginvestigasi skandal itu malah memicu ketegangan lama antara Bakrie dan Nathaniel Philip Victor James Rothschild alias Nat Rothschild, yang masih mengantongi 11 persen saham Bumi Plc.

DOK. PERPUSTAKAAN NASIONAL

Opini

TEMPO, 1-7 OKTOBER 2012

DARI PENGAKUAN ALGOJO 1965

REKONSILIASI tidak bisa dimulai dari ingkar; ia harus diawali oleh pengakuan. Itulah yang seharusnya dilakukan para pelaku pembunuhan massal 1965 dan mereka yang menyokong kejadian itu. Dalam frasa *truth and reconciliation*, terma "kebenaran" diletakkan mendahului "rekonsiliasi" untuk menunjukkan yang satu merupakan syarat mutlak bagi yang lain.

Kini, 47 tahun berlalu sejak pembunuhan besar-besaran terhadap anggota Partai Komunis Indonesia dan orang-orang yang dituduh berafiliasi dengannya. Rekonsiliasi masih jauh dari angan-angan. Yang abadi hingga kini: para pelaku–juga organisasi serta aparatur negara yang menyokong aksi sadistis itu–sibuk menyangkal atau membela diri seraya mengingatkan tentang "bahaya laten" komunisme.

Tak ada angka pasti tentang jumlah korban. Pada Desember 1965, Sukarno pernah membentuk komisi pencari fakta yang dipimpin Menteri Negara Oei Tjoe Tat untuk mencari tahu. Karena tak leluasa bekerja dan khawatir pada reaksi tentara, komisi itu menyimpulkan 78 ribu orang terbunuh–angka yang dipercaya terlalu kecil. Laporan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban menyebutkan korban tewas sekitar satu juta. Menurut mantan Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat Sarwo Edhie Wibowo, setidaknya tiga juta orang terbunuh. Para aktivis kiri mempercayai dua juta.

Meminjam Robert Cribb, kaum kiri membesar-besarkan skala pembantaian untuk menekankan kesalahan para pelaku. Bagi para penentang komunis, angka yang tinggi menegaskan bahaya PKI, angka yang rendah akan mengurangi kesalahan mereka. Dalam hal ini, pengingkaran tampaknya dimulai dari statistik.

Dalam semangat mengungkap *"truth"* itulah film *The Act of Killing* karya sutradara Joshua Oppenheimer layak mendapat perhatian. Dibuat selama tujuh tahun, film itu memuat kesaksian terbuka seorang bergajul yang pernah membunuh ratusan orang PKI di Medan. Kesaksian itu menguak motif lain para jagal: dendam pribadi. Bagi Anwar Congo, jagal itu, orang-orang PKI harus dibunuh karena mereka melarang film Barat–"kapitalisme" yang bertahun-tahun telah menafkahi Anwar sebagai tukang catut karcis bioskop. Sejumlah algojo lain menyampaikan apologia yang tak baru: mereka membunuh untuk menyelamatkan negara dari bahaya komunis.

Dalam alam pikir Orde Baru yang belum sepenuhnya pupus di masyarakat, permohonan maaf yang diajukan Presiden Abdurrahman Wahid pada awal reformasi dulu layak diapresiasi. Sebagai kepala negara dan kiai Nahdlatul Ulama, Gus Dur secara terbuka menyatakan penyesalan. Patut disayangkan, 13 tahun setelahnya segelintir ulama NU justru menolak meminta maaf kepada para korban dan meminta Presiden Yudhoyono mengikuti jejak mereka. Sikap ini mereka ambil setelah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengumumkan hasil investigasi tentang tragedi ini. Sejarah mencatat, NU adalah organisasi yang aktif berperan "membersihkan" PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Betapapun penolakan tak surut, langkah untuk menyembuhkan luka 1965 harus terus dilakukan. Membentuk pengadilan *ad hoc* untuk mengadili para pelaku–kini uzur atau bahkan sudah meninggal–tampaknya bukan rencana yang mudah dilakukan. Proses rekonsiliasi yang membutuhkan undang-undang diperkirakan memakan waktu lama meski tak sepatutnya diabaikan.

Permintaan maaf pemerintah mungkin jadi solusi jangka pendek. Penyesalan bisa dinyatakan dengan memberi kompensasi yang wajar kepada para korban. Aksi pemerintah ini diharapkan diduplikasi oleh masyarakat di level yang lebih mikro. Benih permaafan itu sebetulnya bukan tak ada sama sekali.

Di Palu, Sulawesi Tengah, Wali Kota Rusdi Mastura secara resmi dan terbuka meminta maaf kepada bekas anggota PKI. Kepada keluarga korban ia menjanjikan kesehatan gratis dan beasiswa. Ia juga berencana mendirikan monumen di bekas lokasi kerja paksa PKI. Sebagai pegiat Majelis Syuro Muslimin, ia mengaku organisasinya terlibat dalam aksi mengganyang PKI.

Di luar itu, tak selayaknya kita alergi terhadap komunisme. Sudah lama ideologi itu bangkrut. Uni Soviet porak-poranda, Cina kini sama kapitalisnya dengan Amerika. Ide masyarakat tanpa kelas adalah utopia yang usang dan sia-sia.

Karena itu, tak perlu melarang penyebaran ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Ketetapan MPRS tentang itu sebaiknya dihapus saja. Tak boleh ada pembredelan buku yang menyangkut 1965–juga yang lainnya. Yang justru harus diperangi adalah stigmatisasi pada komunisme dan para korban. Menyebut komunis sebagai ateis merupakan salah kaprah yang bertahun-tahun telanjur dipercaya. Dengan kata lain, hadapi komunisme dengan rileks. Sebab, ideologi itu sesungguhnya biasa-biasa saja.

● BERITA TERKAIT DI HALAMAN 50

EMBAWA ANG. DARIPADA BAIK MBUNUH.

{ BURHAN ZAINUDDIN RUSJIMAN, 72 TAHUN }

Anggota dan simpatisan PKI yang ditangkap di Bali.

IA dulu tukang catut karcis bioskop di Medan. Dalam film dokumenter *The Act of Killing (Jagal)* karya sutradara Amerika Serikat, Joshua Oppenheimer, yang diputar di Festival Film Toronto pada September lalu, blakblakan ia mengaku dengan sadis membantai orang-orang Partai Komunis Indonesia di Medan sepanjang 1965-1966.

Meniru tokoh-tokoh gangster dalam film Amerika yang ditontonnya, ia memiliki teknik khusus menjerat leher orang yang ia tuding anggota PKI agar darah tak muncrat membanjiri lantai.

Pembawaannya riang. Ia dikenal jago dansa. Penggemar Elvis Presley dan James Dean itu mengatakan sering membunuh sembari menari *cha-cha*. "Saya menghabisi orang PKI dengan gembira," katanya. Dalam sebuah adegan, bersama rekannya sesama algojo 1965, ia terlihat naik mobil terbuka menyusuri jalan-jalan di Medan. Mereka bernostalgia ke tempat-tempat mereka pernah membunuh—di antaranya sepotong jalan tempat ia menyembelih banyak warga keturunan Tionghoa. "Setiap ketemu Cina, langsung saya tikam...."

Pengakuan "jujur" preman bernama Anwar Congo dalam film yang bakal ditayangkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta pada Oktober tahun ini tersebut bisa membuat siapa saja terperangah. Ada heroisme di situ. Anwar mengesankan dirinya penyelamat bangsa. Satu versi menyebutkan hampir satu juta orang PKI terbunuh pasca-1965. Ini pelanggaran hak asasi berat. Anwar hanyalah salah satu pelaku pembunuhan. Di berbagai daerah, masih banyak "Anwar" lain.

Tempo kali ini mencoba melihat peristiwa 1965 dari perspektif para algojo. Tak ada niat kami membuka aib atau menyudutkan para pelaku. Politik Indonesia pada masa itu sangat kompleks. Menjelang tragedi September, konflik PKI dan partai politik lain memanas. PKI, yang merasa di atas angin, menekan penduduk yang tidak sealiran. Ketika keadaan berbalik, luapan pembalasan tak terkendali. Pembunuhan direstui oleh sesepuh masyarakat dan tokoh agama. Masa 1965-1966 tak bisa dinilai dengan norma dan nilai-nilai masa kini. Membaca sejarah kelam Indonesia pada masa itu hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan konteks sosial-politik-ekonomi pada masa itu pula.

Tapi kita juga tahu betapa tak simetris informasi tentang tragedi 1965. Saat itu, semua koran dikuasai militer. Masyarakat dicekoki cerita bahwa komunis adalah musuh negara yang identik dengan ateisme. Militer menyebarkan daftar anggota PKI yang harus dihabisi. Militer melindungi para pelaku, bahkan menyuplai mereka dengan senjata. Di beberapa tempat, ada narapidana yang sengaja dilepaskan untuk memburu "sang musuh negara". Itu membuat para algojo menganggap wajar tindakan mereka.

Sejarah berulang: di sini dan di tempat lain. Di Israel, pernah seorang aparat kamp konsentrasi Nazi bernama Adolph

Eichmann diadili. Ia pelaku pembantaian ratusan orang Yahudi. Ia merasa tak bersalah karena menganggap itu tugas negara. Filsuf Jerman, Hannah Arendt, yang mengamati sidang itu pada 1963, menulis buku terkenal *Eichmann in Jerusalem: A Report of the Banality of Evil*. Arendt melihat para eksekutor seperti Eichmann bukan pengidap skizofrenia atau psikopat, melainkan warga biasa yang menganggap wajar tindakannya karena dibenarkan negara. Arendt menyebut fenomena ini sebagai kedangkalan yang akut.

•••

MELACAK kembali ladang-ladang pembantaian PKI, kami menemukan pembunuhan massal tak hanya terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali–tempat-tempat yang sudah sering disebut oleh media dan sejumlah hasil penelitian. Pembantaian, misalnya, terjadi juga di Sikka, Flores, juga di sebuah pulau di Palembang. Kami menemui para algojo–upaya yang tak mudah karena umumnya sudah meninggal. Yang masih hidup, rata-rata 70-an tahun, tanpa tedeng aling-aling membuka kisah kelam yang membangkitkan bulu kuduk.

Seorang algojo menyatakan moralitas itu sesuatu yang relatif. Pembunuhan memang dilarang, tapi harus dilakukan untuk menyelamatkan bangsa dan agama. Ada pula yang diam-diam menyadari kesalahannya. Anwar, yang dalam film terlihat brutal, mengalami pergolakan batin tentang apa yang diperbuatnya. Menurut Oppenheimer, sang sutradara, sepanjang pembuatan film, Anwar ada kalanya seperti menyesali perbuatannya. Rasa heroik dan bersalah bersitegang di dalam diri mantan algojo. Seorang mantan jagal harus dipasung keluarganya karena, bila mengingat-ingat pembunuhan yang dilakukannya, ia ke luar rumah mengayun-ayunkan parang dan celurit.

Memahami persoalan dari sisi para jagal bisa memberi pengertian lain terhadap prahara 1965. Seperti dikatakan Oppenheimer, persoalan utama rekonsiliasi pada dasarnya bukan terletak pada sisi korban atau masalah prosedural, melainkan pada kemauan para pembantai untuk menilai perbuatannya sebagai salah dan jahat. Rekonsiliasi sering terhambat karena dalam diri para pelaku tertanam kuat indoktrinasi rezim yang mengatakan perbuatan mereka masuk akal.

Pembaca, liputan ini kami lakukan ekstra-hati-hati. Kami tahu menampilkan profil para algojo adalah hal yang sensitif. Prosedur jurnalistik kami patuhi, termasuk memverifikasi keabsahan cerita para algojo yang kami wawancarai. Melalui sejumlah sumber, kami mengecek apakah dia benar pelaku atau orang yang sekadar ingin dicap berani. Bila tak ada konfirmasi yang menguatkan, sosok itu kami coret dari daftar.

Kami menghargai privasi narasumber. Bagi mereka yang tak ingin namanya disebut, hanya kami cantumkan inisialnya atau kami samarkan identitasnya dengan nama palsu. Kami mematuhi permintaan sumber yang tak ingin fotonya dimuat. Algojo yang fotonya terpampang dalam liputan ini adalah mereka yang mengizinkan gambar mereka diketahui publik luas.

Kami juga menelusuri ulang kamp-kamp konsentrasi yang didirikan militer pasca-1965. Selain di Pulau Buru yang terkenal, tertuduh PKI banyak ditahan di penjara seperti di Plantungan, Jawa Tengah, atau di Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tempat-tempat ini–mengambil istilah Aleksandr Solzhenitsyn, sastrawan Rusia yang pernah ditahan di kamp konsentrasi Rusia–adalah Gulag Archipelago Indonesia. Meski kini lokasi itu sudah menjadi tempat lain, kisah sedih masa lalu masih terasa mengalir dari situ.

Melengkapi tulisan ini, kami mengulas *The Act of Killing*. Ariel Heryanto, yang kini *associate professor* di Australian National University, meresensi film itu. Ariel mengikuti proses pembuatan film tersebut dari versi panjangnya sampai editing terakhir. Ariel juga kami minta menulis kajian yang membandingkan film tersebut dengan puluhan film Indonesia yang membahas tema PKI.

Pembaca, betapapun pedihnya, pembunuhan massal 1965-1966 harus dikuak. Mengingat lebih baik daripada melupakan. Memang dibutuhkan kesiapan mental bagi para pelaku untuk menyadari kesalahan dan meminta maaf.

Apa yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah, bisa dijadikan contoh. Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah menemukan lebih dari seribu orang terbunuh dalam prahara 1965-1966 di provinsi itu. Wali Kota Palu Rusdi Mastura secara terbuka meminta maaf kepada para korban.

Rusdi bercerita bahwa ia berusia 16 tahun ketika pembunuhan massal terjadi. Ketika itu, ia siswa sekolah menengah atas. Sebagai anggota Pramuka, dia disuruh kepala sekolah menjaga tempat-tempat tahanan di sekitar kota itu selama satu-dua bulan. Ia terkesan oleh pengalaman masa kecilnya menyaksikan penderitaan para korban. Rusdi dan pejabat pemerintah Palu berjanji memberikan kesehatan gratis kepada keluarga korban dan beasiswa bagi anak-anak korban serta mendirikan monumen di lokasi kerja paksa PKI. Sikap Rusdi perlu dicontoh. •

TIM LAPORAN KHUSUS 1965

Penanggung jawab: Seno Joko Suyono

Kepala proyek: Kurniawan

Koordinator: Dody Hidayat, Nurdin Kalim

Penyunting: Arif Zulkifli, Bina Bektiati, Budi Setyarso, Hermien Y. Kleden, Idrus F. Shahab, Leila S. Chudori, L.R. Baskoro, Nugroho Dewanto, Putu Setia, Qaris Tadjudin, Seno Joko Suyono, Yosrizal Suriaji

Penulis: Adek Media, Agung Sedayu, Agus Supriyanto, Bagja Hidayat, Cheta Nilawati, Dian Yuliastuti, Dody Hidayat, Dwi Arjanto, Dwi Wiyana, Iqbal Muhtarom, Jobpie Sugiharto, Kurniawan, Nunuy Nurhayati, Nurdin Kalim, Philipus Parera, Purwani Diyah Prabandari, Seno Joko Suyono, Sunudyantoro, Wahyu Dhyatmika, Yudhono Yanuar

Kontributor: Ananda Putri, Dian Yuliastuti, Iqbal Muhtarom, Nunuy Nurhayati, Prihandoko, Sundari (Jakarta), Abdul Rahman (Makassar), Ahmad Rafiq (Solo), Ahmad Fikri (Bandung), Ayu Cipta (Tangerang), David Priyasidharta (Lumajang), Fatkhurrohman Taufiq (Surabaya), Hari Tri Wasono (Kediri), Ika Ningtyas (Banyuwangi), Ishomuddin (Magetan), Jumadi (Moncongloe), Kukuh S. Wibowo (Jombang), Mahbub Djunaidy (Jember), Muhammad Darlis (Palu), Parliza Hendrawan (Palembang), Pribadi Witjaksono (Yogyakarta), Sahrul (Takalar), Sohirin (Semarang), Steph Tupeng Witin (Ende, Flores), Sujatmiko (Tuban), Soetana Monang Hasibuan (Medan), Ukky Primartantyo (Solo), Yohanes Seo (Maumere, Flores)

Periset: Danni Muhadiansyah, Dina Andriani, Driyandono Adi, Soleh

Riset foto: Jati Mahatmaji (koordinator), Ijar Karim

Pengolah foto: Agustyawan Pradito

Bahasa: Iyan Bastian, Sapto Nugroho, Uu Suhardi

Desain: Djunaedi (koordinator), Aji Yuliarto, Eko Punto Pambudi, Agus Darmawan Setiadi, Tri Watno Widodo

JAGAL-JAGAL DI LADANG PEMBANTAIAN

Kebijakan pemberantasan orang-orang PKI dan para simpatisannya telah menyulut api pembunuhan yang membakar Jawa dan Bali, dan terus menyebar ke daerah lain. Algojo bermunculan. Atas nama dendam pribadi, keyakinan, atau tugas negara, para algojo menghunus pedang menyembelih mereka yang dicap PKI. Mayat mereka dibuang begitu saja ke jurang, sungai, atau luweng. Mengapa para pelaku tak merasa bersalah atas perbuatannya?

Foto seorang anggota Marhaen Bali yang diduga membantu tentara menangkap anggota PKI di Bali, 1965.

TENTARA, SANTRI, DAN TRAGEDI KEDIRI

PONDOK PESANTREN, ANSOR, DAN TENTARA BERSAMA-SAMA MEMBANTAI ANGGOTA DAN ORANG YANG TERKAIT DENGAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA. TERSULUT PERISTIWA KANIGORO.

MENYANDANG kelewang, Abdul Malik memimpin 100 pemuda Ansor berjalan kaki dari lapangan alun-alun Kota Kediri menuju Kelurahan Burengan. Tujuannya: kantor Partai Komunis Indonesia, sekitar tiga kilometer sebelah timur pusat Kota Kediri. Tanpa basa-basi, beragam senjata tajam berkelebat. Belasan pengurus PKI yang mencoba mempertahankan kantor terjungkal, lainnya melarikan diri ke utara desa. "Kantor itu kami bakar hingga ludes," ujar mantan Komandan Peleton III Ansor Kecamatan Kandat, Kediri, ini mengenang peristiwa 13 Oktober 1965 itu.

Ditemui *Tempo* di rumahnya pekan lalu, Abdul mengatakan peristiwa siang itu adalah awal aksi dia menumpas anggota PKI di Kediri. Grup Abdul tak sendiri. Ada puluhan kelompok lain, yang terdiri atas santri berbagai pondok pesantren serta anggota Ansor dan Banser berjumlah puluhan ribu orang. Hari itu mereka serentak menyisir kantong-kantong PKI di Kediri.

Sebelum bergerak, massa mengikuti apel siaga yang digelar di alun-alun kota. Apel dipimpin Syafi'i Sulaiman dan H Toyip, dua tokoh Nahdlatul Ulama terkemuka di Kediri. "Mereka menyatakan PKI telah menginjak-injak agama Islam dan hendak menumpas kaum muslim di Indonesia," kata Abdul. Atas dasar itu, mereka memberikan instruksi tegas kepada peserta apel: tumpas PKI.

Menurut Abdul, tentara memiliki andil besar dalam pelaksanaan apel itu. Satu malam sebelum apel siaga digelar, Abdul menyaksikan sejumlah anggota komando rayon militer datang ke rumah H Sopingi, tokoh NU yang tinggal di Kelurahan Setonogedong, Kediri, tempat rapat pembahasan rencana apel siaga. Anggota koramil itu meminta apel siaga segera digelar karena PKI telah siap bergerak menyerang Kediri.

Hermawan Sulistyo, penulis buku *Palu Arit di Ladang Tebu*, menyatakan apel siaga itu awalnya memang atas permintaan Komandan Brigade Infanteri 16 Kolonel Sam kepada Ketua NU Kediri. Permintaan itu sekaligus ungkapan eksplisit dukungan militer terhadap NU untuk bergerak. Bahkan Sam memberikan sepucuk pistol Luger kepada Ketua Ansor Kediri sekaligus melatihnya menembak di Gunung Klotok, gunung kecil di sebelah barat Kediri. Selain direstui para Kiai pemuka NU, apel itu dihadiri sejumlah tokoh di luar NU. Bupati dan Komandan Komando Distrik Militer Kediri kala itu ikut datang dan memberi sambutan.

Apel siaga itu tonggak awal penumpasan anggota PKI dan orang yang dianggap terkait dengan partai berlambang palu-arit tersebut di Kediri. Pembantaian berskala besar dan terbuka selanjutnya terjadi selama berbulan-bulan di seluruh wilayah Kota Tahu itu. Salah satu lokasi favorit untuk membantai adalah *gisikan* atau sepanjang pinggiran Sungai Brantas, yang membelah wilayah Kediri. Kepala para korban dipenggal dan lantas dilempar ke sungai.

Kediri diduga menjadi ladang pembantaian paling besar di Jawa Timur. Belum ada angka pasti jumlah korban pembantaian kala itu. Namun, sejak operasi penumpasan dimulai, Sungai Brantas menjadi kuburan terapung. Mayat-mayat yang sebagian besar tanpa kepala mengambang di sepanjang sungai. Bau busuk menguar. Tidak ada orang yang berani menangkap ikan serta bersedia makan ikan dari sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur itu.

Kediri juga penyumbang tahanan PKI terbesar di Jawa Timur. Berdasarkan data Direktorat Sosial Politik Provinsi Jawa Timur pada 1981, jumlah mantan tahanan terkait dengan PKI yang dibebaskan dan wajib lapor sebanyak 446.803 orang di seluruh Jawa Timur. Sebanyak 83.800 orang berasal dari Kediri.

•••

SEJAK penyerbuan di Kelurahan Burengan pertengahan Oktober itu, selama berbulan-bulan Abdul terus memimpin Ansor Kandat menumpas PKI. Menurut dia, aksi itu mendapat dukungan penuh sekaligus perlindungan dari tentara. Pernah suatu ketika kelompoknya kewalahan menghadapi orang-orang PKI di Desa Batuaji, Ke-

camatan Kandat, Kediri. Karena massa PKI lebih besar, Abdul meminta bantuan koramil. Tak lama, sejumlah tentara membawa panser datang membantu.

Bukan hanya itu, setiap malam truk koramil datang ke rumah Abdul menyetorkan sejumlah anggota PKI untuk dieksekusi. "TNI yang menangkap mereka, sedangkan kami sebagai eksekutornya," katanya. "TNI seperti *nabok nyilih tangan* (meminjam tangan orang lain untuk memukul)."

Begitu diturunkan dari truk, "paket kiriman" dari koramil itu lantas digiring ke pemakaman umum Desa Sumberejo, yang berada tak jauh dari rumah Abdul, untuk "disekolahkan"–istilah yang dipakai saat itu yang berarti dibunuh. "Jumlahnya beragam. Sebanyak 4-17 orang dikirim tiap malam," Abdul mengenang.

Tak ada korban yang melawan saat dieksekusi. Meski begitu, kadang tak gampang membunuh mereka. "Tak sedikit yang memiliki ilmu kebal," ujarnya. Pernah suatu ketika tebasan kelewang, bahkan parang besar, andalan Abdul tak mampu melukai

TEMPO/HARRY TRIWASONO

Kuburan Sumberejo Kandat, lokasi pembantaian anggota dan simpatisanPKI.

tubuh seorang anggota PKI. Hingga akhirnya salah seorang anggota Ansor menyarankan agar memukulnya dengan tongkat rotan yang telah diberi Asma atau doa oleh Kiai. Manjur, anggota PKI itu ambruk sebelum akhirnya tewas dibacok beramai-ramai.

•••

AWAL Oktober 1965, aktivitas pengajian di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, mendadak gaduh. Kiai Makhrus Aly, pengasuh pondok pesantren terbesar di Kediri itu, mengatakan massa PKI dalam jumlah besar akan menyerang Kediri. Kiai Makhrus mendapat informasi rencana penyerangan PKI dari Komando Daerah Militer Brawijaya.

Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Idris Marzuki, saat ditemui *Tempo* pertengahan September lalu mengatakan, kala itu seorang perwira Kodam memberi tahu Kiai Makhrus bahwa PKI akan menyerang Kediri pada 15 Oktober 1965. Dan Pesantren Lirboyo menjadi sasaran utama penyerbuan. Untuk lebih meyakinkan Kiai Makhrus, perwira itu menunjukkan sejumlah lubang mirip sumur yang digali di area tebu yang mengelilingi Pesantren Lirboyo. Ia mengatakan PKI membuat lubang-lubang itu untuk tempat pembuangan mayat para santri dan Kiai Lirboyo yang akan mereka bantai nanti.

Pendek kata, Kiai Makhrus percaya. Apalagi hubungan Kiai Makhrus dan Kodam memang sangat dekat, bahkan sejak masa perjuangan kemerdekaan. Kiai Makhrus berperan dalam menggerakkan pesantren melawan penjajah. Dia juga anggota Forum Kiai-Kodam Brawijaya, yang merupakan wadah komunikasi antara Kodam dan pesantren di Jawa Timur. "Sakitnya Kodam adalah sakitnya Kiai Makhrus," kata Kiai Idris, menggambarkan kedekatan Kiai Makhrus dengan Kodam kala itu.

Kiai Makhrus, yang juga Ketua Suriah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, lantas menginstruksikan para santri untuk bersiaga. Semua santri dewasa mendapat pelatihan silat serta gemblengan ilmu kebal dari pengurus dan pendekar pesantren. Pesantren Lirboyo memang terkenal sebagai gudang para pendekar.

Kiai Idris dan Maksum Jauhari, atau yang biasa dipanggil Gus Maksum, berbagi peran. Kiai Idris bertanggung jawab menjaga keamanan dalam pesantren sekaligus memastikan proses mengaji santri tak terganggu. Sedangkan Gus Maksum memimpin penumpasan anggota PKI. Lirboyo memobilisasi santri besar-besaran. Sekitar separuh dari total 2.000-an santri ikut bergerak menghabisi semua orang PKI.

Menurut Zainal Abidin, keponakan Gus Maksum, selama hidupnya, Gus Maksum sering bercerita tentang kiprahnya dalam menumpas PKI. Di setiap aksinya, tutur Zainal, Gus Maksum tak pernah menggunakan senjata. Cukup dengan tangan kosong, ia sanggup melumpuhkan setiap lawan. Putra Kiai Jauhari, pengasuh Pesantren Al-Jauhar, Kanigoro, itu memang terkenal memiliki ilmu kanuragan tinggi. Karena kemampuan silatnya itu pula Gus Maksum di-

percaya sebagai komandan operasi. Bukan hanya para santri, Banser bahkan para pendekar silat di Kediri berada dalam garis komandonya. "Selain memimpin santri, Gus Maksum mengajak para pendekar silat di luar pesantren dalam penumpasan itu," katanya.

Menurut Kiai Idris, tentara memang berada di belakang tragedi itu. Kodam bahkan mengirimkan pasukan berpakaian sipil ke Lirboyo. Tentara menjemput dan mengangkut santri dengan truk militer untuk selanjutnya mengirim mereka ke kantong-kantong PKI yang menjadi target operasi di seluruh wilayah Karesidenan Kediri. Di lapangan, militer memposisikan para santri di garis depan sekaligus sebagai algojo.

Toh, Kiai Makhrus masih punya batasan. Dia melarang para santri membunuh simpatisan PKI yang tinggal di sekitar Lirboyo. Alasannya, ia tidak ingin ada pertumpahan darah antara santri dan warga sekitar pesantren, yang kala itu banyak berafiliasi ke PKI. "Sehingga penumpasan di sekitar pesantren dilakukan oleh TNI sendiri," ujar Kiai Idris.

belumnya, meski hubungan kelompok santri dan PKI tegang, tak pernah ada konflik terbuka.

Meski tak sampai ada korban jiwa, penyerbuan di Kanigoro menimbulkan trauma sekaligus kemarahan kalangan pesantren dan anggota Ansor Kediri, yang sebagian besar santri pesantren. Memang kala itu para santri belum bergerak membalas. Namun, seperti api dalam sekam, ketegangan antara PKI dan santri makin membara.

Kiai Idris mengakui atmosfer permusuhan antara santri dan PKI telah berlangsung jauh sebelum pembantaian. "Bila berpapasan, kami saling melotot dan menggertak," katanya. Kubu NU dan PKI juga sering unjuk kekuatan dalam setiap kegiatan publik. Misalnya ketika pawai memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus, rombongan PKI dan rombongan NU saling ejek bahkan sampai melibatkan simpatisan kedua kelompok. Kondisi itu semakin diperparah oleh penyerbuan PKI ke Kanigoro.

ABDUL DAN PARA ANGGOTA ANSOR LAINNYA SEMAKIN YAKIN BAHWA PERBUATAN MEREKA BENAR. "SEPERTI API YANG DISIRAM BENSIN, KAMI SEMAKIN MENDAPAT ANGIN UNTUK MEMUSNAHKAN PKI."

•••

MASIH lekat di ingatan Masdoeqi Moeslim peristiwa di Pondok Pesantren Al-Jauhar di Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kediri, pada 13 Januari 1965. Kala itu, jarum jam baru menunjukkan pukul 04.30. Ia dan 127 peserta pelatihan mental Pelajar Islam Indonesia sedang asyik membaca Al-Quran dan bersiap untuk salat subuh. Tiba-tiba sekitar seribu anggota PKI membawa berbagai senjata datang menyerbu. Sebagian massa PKI masuk masjid, mengambil Al-Quran dan memasukkannya ke karung. "Selanjutnya dilempar ke halaman masjid dan diinjak-injak," kata Masdoeqi saat ditemui *Tempo* di rumahnya di Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, pekan lalu.

Para peserta pelatihan digiring dan dikumpulkan di depan masjid. "Saya melihat semua panitia diikat dan ditempeli senjata," tutur Masdoeqi, yang kala itu masuk kepanitiaan pelatihan.

Dia menyaksikan massa PKI juga menyerang rumah Kiai Jauhari, pengasuh Pondok Pesantren Al-Jauhar dan adik ipar pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Makhrus Aly. Ayah Gus Maksum itu diseret dan ditendang ke luar rumah.

Selanjutnya, massa PKI mengikat dan menggiring 98 orang, termasuk Kiai Jauhari, ke markas kepolisian Kras dan menyerahkannya kepada polisi. Menurut Masdoeqi, di sepanjang perjalanan, sekelompok anggota PKI itu mencaci maki dan mengancam akan membunuh. Mereka mengatakan ingin menuntut balas atas kematian kader PKI di Madiun dan Jombang yang tewas dibunuh anggota NU sebulan sebelumnya. Akhir 1964, memang terjadi pembunuhan atas sejumlah kader PKI di Madiun dan Jombang. "Utang Jombang dan Madiun dibayar di sini saja," ujar Masdoeqi, menirukan teriakan salah satu anggota PKI yang menggiringnya.

Kejadian itu dikenal sebagai Tragedi Kanigoro—pertama kalinya PKI melakukan penyerangan besar-besaran di Kediri. Se-

Peristiwa di Kanigoro itu pula yang memperkuat tekad kaum pesantren dan anggota Ansor di Kediri, termasuk Abdul, membantai anggota PKI. Pembantaian mencapai puncaknya ketika pemerintah mengumumkan bahwa PKI adalah organisasi terlarang. Abdul dan para anggota Ansor lainnya semakin yakin bahwa perbuatan mereka benar. "Seperti api yang disiram bensin, kami semakin mendapat angin untuk memusnahkan PKI," ujarnya.

Begitu banyak anggota PKI yang mati di tangan Abdul hingga ia tak sempat lagi menghitungnya. Bahkan saudara Abdul yang menjadi anggota PKI juga dibantai. "Dia dihabisi rekan saya karena saya tak sampai hati melakukannya. Meski saudara, urusan ideologi tak bisa ditawar dan dikompromikan." •

HAJI SY:

KALAU SAYA MATI, SAYA MATI SYAHID

Haji SY masih gagah dan sehat di usia 74 tahun. Kakek 14 cucu itu berasal dari Probolinggo, Jawa Timur. Pada waktu mudanya ia santri Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Saban bulan ia bolak-balik Kediri-Probolinggo dengan kereta api.

Kepada Tempo, *ia menceritakan pengalamannya ikut mengganyang PKI di Probolinggo dan Kediri.* Tempo *menemuinya pada Minggu pagi, 23 September lalu, di rumahnya di Kecamatan Grujugan, Bondowoso. Ingatannya masih bagus. Beberapa kali diajukan pertanyaan yang sama setiap 15 menit, ia menjawab ulang dengan konsisten.*

•••

SAYA berusia 27 tahun saat 1965. Waktu itu kelas II madrasah aliyah di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Sejak akhir 1964, saya menjadi Ketua Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kecamatan Pakuniran, Probolinggo.

Tatkala saya balik ke Probolinggo, mendadak ada pesan Orari Markas Kodim Probolinggo, dari komandannya, Ali Muttakim. Isinya perintah supaya berkoordinasi dengan NU, Banser, dan Ansor untuk menangkap orang-orang PKI. Malam harinya, 41 anggota Banser dan GP Ansor bersama 10 tentara dan 2 polisi naik sebuah truk yang dipinjam dari toko orang Cina menuju Dusun Kresek, 10 kilometer tenggara Pakuniran. Tujuh tokoh PKI dan BTI diciduk. Salah satunya bernama Astawar.

Sesampai di Balai Desa Glagah-Pakuniran, semua bingung. Ada yang usul mereka dijerat tali. Para tentara tak mau menembak. Akhirnya saya tebas satu per satu. Terakhir Pak Astawar. Dia membujuk kami dengan uang. Saya tolak, dan saya tebas lehernya. *Wallahi wannabi* (demi Allah, demi Nabi).

Lalu warga ramai-ramai memasukkan tujuh mayat ke satu lubang dekat Sungai Glagah dan ditutup tanah. Wakil saya, Pak Zaenab, bilang, "Waduh, sampeyan kok bisa seperti itu, Dik." Dia heran saya sendirian membunuh orang PKI. Saya dan teman-teman ke Masjid Jami' Glagah. Saya disiram air, baju hitam saya dicuci karena berlumuran darah. Baju dan celana itu pemberian guru di Cirebon, Kiai Munjahid.

Di Pesantren Lirboyo, saya diberi tahu Fadhol Bustami, teman asal Sampang, Madura. Katanya saya dicari Kiai Makhrus Ali, pengasuh Pesantren Lirboyo. Saya sampaikan ke beliau informasi dan situasi pembunuhan orang-orang PKI di Probolinggo. Kiai Makhrus mengatakan, "Oh, baguslah. Nanti malam ikut rombongan ke Gurah (timur Kediri)."

Setelah isya, saya berangkat bersama Fadhol Bustami dan beberapa pemuda. Kiai memberikan baju dan celana hitam serta pedang samurai. Sesampai di kantor Ansor di Kecamatan Gurah, banyak orang berkumpul. Juga banyak tentara. Saya disuruh membawa 10 orang ke sebuah rumah besar berjarak 700 meter. Menurut data ABRI, itu rumah milik gembong PKI asal Ponorogo. Saya lupa namanya. Rumah itu kami dobrak, pintunya ambruk. Pemiliknya muncul. Orangnya tinggi besar dan berkumis tebal. Dia bilang, "*Kate laopo, Le? Kate guyon ta?*" (Mau apa kamu? Mau bercanda ya?). Fadhol menyahut, "Iya." Orang itu menghunus pedang pendek dan membacok Fadhol, tapi luput. Lalu Gus Ghozi, kawan saya lain, membalas dengan pedang samurai, ternyata tak mempan. Perkelahian berjalan alot.

Gerakan Pemuda Ansor menentang keberadaan PKI pada 1965.

Saya bergegas ke tanggul dekat sungai mengambil batang singkong sekitar tiga jari tangan. Lalu saya pukulkan ke punggung orang itu. Dia gemetaran, dan langsung saya tebas dengan pedang samurai. Kepalanya jatuh.

Kembali ke kantor Ansor, saya diguyur air kembang tiga timba. Kapten Hambali menghadiahkan sarung cap Manggis kotak-kotak hitam dan hem putih merek Santio. Wah, saya senang sekali, karena itu baju yang bagus. Sejak itu, di Lirboyo, saya dikenal sebagai "Sueb Ganyang" karena berani menghadapi orang-orang PKI. Yang terakhir ditangkap dan dibunuh bernama Albidin, Ketua CC PKI Paiton

Saya ikut operasi karena kewajiban warga negara. Sebab, kalau PKI menang, Islam akan dihancurkan. Apalagi orang tua dan Kiai merestui. Kalau saya mati, saya mati syahid. Sejak saya berhasil membunuh tokoh PKI Gurah yang warok Ponorogo itu, oleh Gus Maksum saya diangkat memimpin rombongan dan bertugas memberi perintah. Tidak boleh membunuh lagi.

Sebagai manusia biasa, saya sebenarnya kasihan terhadap orang-orang PKI itu. Dalam operasi, saya selalu ingat pesan almarhum Kiai Makhrus dan Kiai Marzuki agar tidak sembarangan menangkap dan membunuh. Tapi ada saja yang keliru. Anak buah saya di Paiton suatu hari menangkap seorang guru *ngaji*, Pak Sarati. Saya berupaya mencegah, tapi dia kadung dikeroyok dan dibantai. •

SETELAH 'TUHAN MATI' DI MLANCU

KADER PARTAI KOMUNIS INDONESIA DI PERBATASAN JOMBANG DAN KEDIRI DIBANTAI. GENTING SEJAK LIMA TAHUN SEBELUM GESTAPU.

KENANGAN Dasuki terantuk pada suatu sore awal November 1965 yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Di remang senja itu, tubuh anak delapan tahun ini bergetar saat melihat ratusan mayat bergelimpangan di halaman rumah Lurah Mlancu Djamal Prawito, di perbatasan Kediri-Jombang, Jawa Timur.

Darah segar menggenangi halaman rumah seluas 200 meter persegi itu. "Kalau jalan di sana, mata kaki tenggelam," kata Dasuki, kini 55 tahun. Dua pekan lalu, warga Mlancu ini memandu *Tempo* menyusuri tempat pembantaian orang-orang yang dianggap sebagai "kader Partai Komunis Indonesia" di desanya, setelah Gerakan 30 September 1965 di Jakarta.

Dia ingat, celurit, pedang, dan golok bertumpuk di samping tubuh-tubuh tak bernyawa dengan luka menganga di merih mereka. Dasuki melihat sore itu para algojo beringsut kelelahan pulang ke rumah masing-masing setelah selama tujuh jam menebas leher sekitar 700 orang yang dituduh PKI. Mereka memakai penutup wajah, seperti ninja.

Tak ada yang mengambil mayat-mayat itu. Jangankan keluarga PKI, kata Dasuki, orang Mlancu yang tak ikut partai ini saja *jiper* ke luar rumah meski mendengar ribut-ribut semalaman. Mayat-mayat tersebut kemudian dikubur di halaman itu, yang kini hanya ditandai dua tugu merah dan putih. Pada 1969, tanah itu dibongkar dan tulang-belulangnya dipindahkan ke sumur tua di kebun kakao tak jauh dari situ.

Dalam ingatan Dasuki, penangkapan terhadap orang-orang yang dituduh PKI dimulai Oktober 1965. Mlancu, yang terpencil dikepung gunung, 21 kilometer dari Jombang arah Malang, terlambat menerima kabar pembunuhan enam jenderal Angkatan Darat itu. Setelah kerusuhan meletus di pelbagai kota di Jawa Timur, Mlancu mulai mencekam.

Desa ini terkenal sebagai kampung dengan pembantaian PKI yang sadis. Meski terpencil, wilayah ini dianggap sebagai basis PKI yang kuat. Lokasinya tak jauh dari Pabrik Gula Tjoekir, dekat Pesantren Tebuireng. PKI memusatkan kegiatan di sini karena mendapatkan tiga keuntungan sekaligus: menggaet massa buruh, petani tebu, dan santri.

Pembantaian Mlancu juga terekam dalam buku *Palu Arit di Ladang Tebu*. Hermawan Sulistyo, yang menyusun penelitian itu untuk disertasi di Arizona State University, Amerika Serikat, merekam ingatan RA, seorang algojo di sana. Jumlah 700 jenazah berasal dari pengakuannya. "Operasi ini agak menyimpang karena dilakukan siang hari, biasanya malam," kata RA dalam buku itu.

Hermawan, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menyimpulkan peristiwa G-30-S memicu konflik berdarah yang sesungguhnya sudah terpendam lima tahun sebelum peristiwa itu. PKI atau bukan PKI, kata dia, hanya cap untuk alasan membunuh. "Karena itu, bapak saya, yang tak ikut apa-apa, juga dibunuh," ujar Sakib, 49 tahun, kepada *Tempo*.

Syahdan, pada 1960, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Pokok Agraria. Setahun sebelum ketentuan itu berlaku, kader-kader PKI sudah mengawal pelaksanaannya di desa-desa dengan semboyan "tanah untuk rakyat". Mereka mengincar ta-

AM:

KAMI TIDAK PERNAH MENGUBUR...

Sosoknya masih tampak tegap di usianya yang kini telah 70 tahun. Sorot matanya tajam. Bicaranya tegas. AM, sebut saja begitu, satu di antara pelaku lapangan dalam tragedi pembantaian orang-orang PKI di Badas dan Pare, dua kecamatan di perbatasan Jombang-Kediri, Jawa Timur, sepanjang Oktober-November 1965.

Dua kali Tempo *menemui AM di tempat berbeda di Jombang pada 17 dan 18 September 2012, di rumahnya dan di sebuah tempat di Rejoso. Di sana, kepada* Tempo, *dia merekonstruksi bagaimana cara mengirim rombongan pelaku pembantaian ke rumah aktivis dan simpatisan PKI beserta organisasi di bawahnya. "Istilahnya drop-dropan. Saya sudah tidak ingat lagi berapa kali melakukan drop-dropan, juga berapa jumlah korbannya," ujarnya.*

•••

MESKI umur saya baru 23 tahun, pada 1965 saya telah ditunjuk menjadi pengurus anak cabang Gerakan Pemuda Ansor (biasa disingkat GP Ansor, organisasi pemuda yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama) di Lamongan, Jawa Timur. Hingga suatu hari saya mendapat surat tugas menjadi pengajar di sebuah pesantren di Jombang. Selain di pondok tersebut, saya diminta mengajar di sebuah madrasah.

Nah, saat itulah peristiwa politik 30 September 1965 meletus di Jakarta. Karena alat komunikasi tidak semudah sekarang, berita itu baru sampai di telinga kami dua atau tiga hari setelah kejadian. Kabar itu memicu kemarahan masyarakat. Dari pengamatan saya, kemarahan masyarakat ini spontan dan tidak dikondisikan. Sebab, umumnya mereka sudah memendam kebencian sekian lama terhadap orang PKI. Akumulasi kemarahan yang awalnya tersumbat itu seperti memperoleh saluran baru.

Ansor pun merapatkan barisan. Puluhan anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser), termasuk saya, digembleng di sebuah tanah lapang di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno. Gemblengan ini dipimpin oleh dua kiai yang sangat disegani karena menguasai ilmu kanuragan tinggi dan punya aji kebal. Awalnya fisik kami yang digembleng. Setelah fisik, baru mental kami yang digembleng, termasuk "diisi" ilmu kanuragan. Pada hari terakhir, kami semua diberi rotan sebesar ibu jari, kira-kira panjangnya satu meter. Konon, yang memegang rotan itu akan ketularan kebal.

Malam, pukul 19.00-21.00, kami masih mengaji seperti biasa di pesantren. Menjelang tengah malam, 30 orang yang pernah ikut gemblengan diminta bersiap. Kami melepas pakaian santri dan berganti pakaian seragam serba hitam. Kami semua juga mengikat kepala dengan *udheng*, mirip pakaian tokoh Sakerah dalam cerita ludruk. Secara psikologis, seragam serba hitam menambah bobot keberanian kami. Kami juga melengkapi diri dengan golok atau celurit.

Kami dikasih tahu daftar orang yang malam itu akan dihabisi, entah siapa yang menyusun. Yang jelas, targetnya adalah para pengurus teras Comite Central (CC) PKI di tingkat desa, terutama ketua dan sekretarisnya. Maka dalam satu desa ada satu atau dua orang yang kami sasar. Setelah siap, kami bergerak menuju pertigaan jalan besar yang berjarak sekitar satu kilometer dari pesantren (jalan raya poros Jombang-Mojokerto). Di sana, kami sudah ditunggu truk bak terbuka.

Kami lalu naik untuk berangkat berombongan ke titik sasaran. Di atas truk, kami dilarang bicara. Lampu truk juga dipadamkan.

Perayaan Hari Buruh oleh anggota Partai Komunis Indonesia di Jawa Timur.

Saya tidak tahu siapa sopirnya, juga pemilik truk. Kami tidak boleh banyak bicara. Jalanan yang kami lalui gelap. Tak mengherankan bila sampai tujuan di Badas dan Pare (jaraknya sekitar 20 kilometer) sudah masuk dinihari.

Tiba di tujuan, truk berhenti di sebuah tempat. Kami turun dan berpencar menuju sasaran. Saya mengetuk pintu orang yang akan dihabisi. Setelah cocok dengan target, orang itu kami ajak ke tempat sepi, kebun tebu atau tepi sungai. Yang penting sepi. Mereka umumnya sudah pasrah. Meski ada yang bertubuh tinggi besar, mereka tidak mencoba lari atau melawan. Sekali gertak, mental mereka sudah *down*.

Satu-dua target kami ada yang punya ilmu kebal. Misalnya, ketika lehernya disabet golok, tidak timbul luka. Namun saya tahu *pengapesan* (kelemahan) orang yang *beginian*. Saya sudah paham bagaimana caranya agar orang yang punya ilmu kebal itu menjadi mempan dibacok. Yang jelas, setelah korban roboh, jenazahnya kami tinggal begitu saja. Kami tidak pernah mengubur. Biar keluarganya yang mengambil. Saat itu tidak ada rasa kasihan, tidak ada rasa ngeri. Sebab, isi kepala saya sudah diliputi kebencian terhadap PKI.

Kebencian saya itu sudah ada sejak masih di Lamongan. Saat itu, pengaruh PKI di tengah masyarakat makin kuat. Dengan slogan "tanah milik rakyat" dan "tanah dibagi rata", PKI mengiming-imingi akan membagikan sebidang tanah buat tiap anggotanya. Propaganda ini terbukti ampuh, sehingga tidak sedikit kaum nahdliyin di sejumlah kecamatan di Lamongan berbondong-bondong masuk PKI. Kecamatan Sugio, misalnya, termasuk basis PKI, selain Sambeng, Tikung, dan Laren.

Suatu hari, pemimpin PKI, D.N. Aidit, datang ke Lamongan. Ia berpidato di alun-alun Lamongan pakai bahasa Jawa *krama inggil*. Ribuan orang hadir, termasuk saya. Pidato Aidit memang enak didengar, bahasanya halus dan tertata. Pokoknya membius. Inti pidato Aidit, mengajak anggota dan simpatisan PKI bersama-sama berjuang mewujudkan kesejahteraan, di antaranya melalui program *land reform*.

Pengurus kecamatan, yang berafiliasi dengan PKI, kemudian membuat kebijakan berisi larangan buat siapa pun memiliki tanah di luar domisilinya. Misalnya si A bertempat tinggal di Sugio, dia tidak boleh punya tanah di kecamatan lain. Kebijakan itu memicu aksi sepihak di banyak tempat. PKI merampasi tanah orang seenaknya. Bila ada yang nekat menghalang-halangi akan dibunuh. Beberapa pemilik tanah tewas ditebas senjata atau dikeroyok.

PKI semakin gencar melakukan provokasi. Mereka pernah *nanggap* ludruk di sebuah lapangan tak jauh dari masjid. Suaranya bising, mengganggu orang beribadah. Mereka mengumumkan bahwa cerita yang akan dibawakan adalah *Gusti Allah Mantu*. Tapi ini trik saja. Tujuannya agar masyarakat berbondong-bondong datang untuk dicekoki propaganda mereka. Saya, yang penasaran, sempat datang. Ternyata isi ceritanya biasa-biasa saja dan tidak ada kaitannya dengan judul.

Nah, kondisi-kondisi itulah yang membuat saya membenci PKI. Sekarang orang-orang yang membunuh PKI diserang dengan isu hak asasi manusia. Tapi mereka tidak menganalisis betapa kejinya PKI saat itu. ●

PUSARA DI ATAS SUMUR

LADANG PEMBANTAIAN MEREKA YANG DICAP ANGGOTA PKI TERSEBAR DI PENJURU LUMAJANG. PUSATNYA DI PANDANWANGI, PESISIR PANTAI SELATAN.

TERLETAK sekitar 45 menit perjalanan ke arah selatan dari Lumajang, Desa Pandanwangi dikenal sebagai salah satu tempat pembantaian orang-orang Partai Komunis Indonesia, 40-an tahun silam. Lokasinya memang "ideal", terpencil dan sulit dijangkau. Kini sebagian wilayah itu dijadikan pusat latihan perang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan Lapangan Tembak TNI Angkatan Udara. "Lokasi penumpasan PKI saat itu dipusatkan di Desa Pandanwangi," kata Muhammad Anshori Zain, 78 tahun, kepada *Tempo*.

Anshori salah satu saksi mata peristiwa pembantaian tersebut. Kala itu, ia menjabat Bendahara Pengurus Anak Cabang Ansor Kecamatan Tempeh. Pandanwangi merupakan salah satu desa di Kecamatan Tempeh. Kakak Anshori, KH Amak Fadholi, saat itu tokoh Nahdlatul Ulama di Lumajang.

Meski saat itu mengetahui ada pembunuhan terhadap orang-orang PKI, Anshori menyatakan tak pernah ikut ke lokasi pembantaian. Dia mengaku hanya mendapat cerita-cerita pembunuhan itu dari pelakunya. Orang-orang komunis tersebut, ujar Anshori, diangkut dengan truk. Banyak di antaranya tak sadar bahwa itu perjalanan akhir mereka. Bahkan, kata dia, ada yang mengira mereka diajak berekreasi. "Ada yang membawa dagangan dan menjajakannya di setiap tempat pemberhentian," ujarnya.

Anshori mengaku beberapa kali mengikuti rapat menjelang pembantaian tersebut. Rapat itu dihadiri sejumlah tokoh Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Gerakan Pemuda Ansor. "Orang-orang Banser dan Ansor di desa-desa inilah yang menjadi algojo," katanya. Adapun yang mengendalikannya, ujar dia, para tokoh NU di Lumajang.

Para tokoh agama tersebut menyatakan penumpasan orang-orang PKI merupakan jihad. "Dan kalau tidak menumpas lebih dulu justru akan ditumpas PKI," ujar Anshori. Operasi penumpasan itu dilakukan dengan dukungan militer dan dilakukan malam hari. Menurut Anshori, orang-orang NU tak akan berani melakukan itu tanpa mendapat dukungan tentara. Algojo yang menjadi komandan penumpasan itu antara lain Gozali alias Jali, Saprawi, dan Badrukhi. "Ketiganya sudah meninggal," kata Anshori.

Selain di Pandanwangi, ladang pembantaian PKI tersebar di sejumlah penjuru Lumajang. Tempat itu, antara lain, Curah Mayit di Kecamatan Randuagung dan Dusun Srebet di Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko. Lokasi pembantaian di Dusun Srebet terletak di pinggir sungai. Tempat itu kini telah "lenyap", bersalin rupa menjadi permukiman warga.

Sapari, warga Srebet, menceritakan kesaksiannya melihat pembantaian puluhan tahun silam itu. Kala itu ia bertugas sebagai anggota Pertahanan Sipil (Hansip) di dusunnya. "Menjelang pembantaian, suasana tegang. Musala dan masjid dipenuhi penduduk yang ketakutan," kata pria 70 tahun itu.

Menurut Sapari, pelaku pembantaian bukan hanya anggota Banser atau Ansor, melainkan juga sejumlah warga lain yang tidak menjadi anggota organisasi itu. Orang-orang PKI itu, ujar dia, diangkut de-

Seorang warga menunjukkan "sumur neraka" di Desa Pragak, Magetan, Jawa Timur.

ngan truk dan digiring ke bantaran sungai di Srebet. Kedua tangan mereka disilangkan ke belakang dan kedua ibu jari diikat dengan benang. Di sana, sejumlah lubang sudah disiapkan untuk mereka.

Sapari mengakui tidak mengetahui asal-usul orang-orang tersebut. Menurut dia, dalam situasi seperti itu sulit dibedakan mana yang anggota PKI dan bukan. "Banyak warga yang sebenarnya bukan anggota PKI ikut dibantai," katanya. "Di mata mereka, PKI itu bahkan dikira singkatan Partai Kiai Indonesia."

Hari, 78 tahun, warga Desa Jogoyudan, Sumbersuko, menceritakan hal sama. "Banyak warga yang tidak tahu-menahu ikut ditumpas," kata pensiunan pegawai dinas pendidikan yang kini membuka warung di rumahnya itu. Hal ini diakui Alim, yang kehilangan ayah angkatnya, Joyo Pranoto, yang saat itu menjabat Kepala Desa Karanganom, Kecamatan Seduro. Joyo, yang ketika itu menjadi Ketua Persatuan Pamong Desa Indonesia Lumajang, difitnah sebagai kader PKI dan dibunuh di sebuah hotel di Lumajang. "Padahal beliau anggota Partai Nasional Indonesia," kata Alim kepada *Tempo*.

Alim mengaku tak tahu siapa pembunuh ayah angkatnya. "Saya masih SMP waktu itu," katanya. Tapi ia tahu nama-nama algojo yang disebut-sebut sebagai pembantai ayahnya. Dua algojo yang paling terkenal saat itu adalah Mochamad Samsi dan Pandi, yang sudah meninggal.

Pekan lalu *Tempo* menemui Samsi di rumahnya di Srebet. Dia mengaku sebagai orang yang membunuh Kepala Desa Karanganom. "Saya disuruh menumpas Kepala Desa Karanganom. Tapi saya lupa namanya...," ujarnya. "Saya hanya menjalankan perintah."

•••

TEMPAT itu dulu adalah sumur. Kini sumur tersebut sudah tertutup dan "mulut"-nya rata dengan tanah. Di atasnya ada pusara berukuran 1,5 x 1,5 meter. Sejumlah kembang warna-warni yang sudah kering terlihat di atasnya.

Inilah sumur "neraka" Dusun Puhrancang, yang terletak di Desa Pragak, Kecamatan Parang, sekitar 30 kilometer selatan Magetan, Jawa Timur. Puhrancang terletak di perbukitan. Tak sulit menuju tempat ini lantaran sebuah jalan cukup bagus–kendati di sejumlah tempat aspalnya mengelupas–membentang dari Magetan.

Puluhan tahun silam, ke dalam sumur itulah ratusan orang yang dicap anggota Partai Komunis Indonesia yang mati dibantai dilemparkan. "Ya, di bawah itu tempatnya," kata Sukiman, menunjuk kuburan–satu-satunya kuburan–di situ. Sukiman pemilik lahan tempat sumur itu berada.

Soal sumur dan orang-orang PKI yang dimasukkan ke sana, Sukiman menyatakan mendapat cerita itu dari mertuanya, yang meninggal dua tahun lalu. "Saya tidak tahu kapan sumur itu ditutup," ujar pria 47 tahun ini.

Yang pasti, tempat itu kini menjadi tempat ziarah. Sejumlah orang kerap datang nyekar dan memanjatkan doa di sana. Kendati tinggal hanya beberapa meter dari bekas "ladang pembantaian", Sukiman mengaku tak merasa takut atau mengalami hal seram. "Sudah biasa. Lewat di sini malam-malam juga enggak ada apa-apa," katanya.

Menurut Kaderun, 69 tahun, Kepala Dusun Jombok, Desa Pragak, Kecamatan Parang, kepada *Tempo*, sumur itu dalamnya 27 meter dan diameternya, dulu, sekitar 2 meter. Eksekutor para korban adalah Yunus. "Dia algojo yang paling disegani di seluruh Magetan," ujarnya.

Kaderun mengenal Yunus. Keduanya berkawan cukup dekat. Menurut Kaderun, ada 82 orang yang dimasukkan ke sumur itu. Mereka dicemplungkan setelah dibunuh. "Mereka bukan orang sini, melainkan dari desa atau kecamatan lain," ujarnya. Daerah itu antara lain Panekan, Maospati, dan Bendo. "Itu basis PKI."

Yunus, ujar Kaderun, saat itu bertugas di Perwira Urusan Teritorial dan Perlawanan Rakyat (Puterpra) Kecamatan Parang. Pangkat terakhirnya pembantu letnan dua. Selain menjadi tentara di Puterpra–kini berubah menjadi komando rayon militer–Yunus dikenal sebagai pawang ular. Dia juga dipercaya memiliki ilmu kebal. "Dia pernah berguru di daerah Batu Ampar, Madura," katanya. Yunus sudah meninggal. Dia, "Meninggal pada 1980 karena digigit ular," ujar Kaderun.

Kuburan massal yang diyakini sebagai "karya" Yunus juga terdapat di alas (hutan) Gangsiran di Dusun Gangsiran, Desa Mategal, Kecamatan Parang. Kawasan hutan produksi yang ditanami pohon mahoni dan sambi ini termasuk wilayah Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan Lawu Selatan.

Menurut Kaderun, para korban di hutan itu dimasukkan ke sejumlah lubang yang dalamnya tak sampai dua meter. "Saya lupa jumlah pastinya, mungkin belasan sampai puluhan," ujarnya. "Begitu penuh, langsung diuruk dan ditandai dengan sebuah pohon," kata Kaderun, yang dulu mengaku aktivis Pemuda Muhammadiyah sebelum menjadi anggota Banser.

Menurut pengamatan *Tempo* di hutan Gangsiran, di sana memang ada sejumlah pohon yang tumbuh di atas gundukan tanah. Pohon-pohon itu terlihat berumur lebih tua ketimbang pohon lain. "Ya, seperti ini, Mas," kata Kepala Dusun Kalitengah, Desa Mategal, Sumarwanto, sambil menunjuk sebuah gundukan tanah.

Sumarwanto mengaku mendengar cerita pembantaian di hutan Gangsiran dari ayahnya. Menurut sang ayah, mereka yang dibunuh di sana terutama berasal dari desa tetangga, Poncol. "Di sana, kata dia, tercatat ada lebih dari 700 orang komunis," ujarnya. Orang-orang PKI waktu itu, ujar Sumarwanto, sangat kejam. Mereka membantai serta membunuh ulama dan tokoh masyarakat yang anti-PKI. "Karena itulah kelompok-kelompok anti-PKI bersatu dan membalas." •

MOCHAMAD SAMSI:

HARAM MEMBUNUH CICAK JIKA BELUM MEMBUNUH KAFIR

NAMA saya Mochamad Samsi. Saya lahir di Dusun Srebet, Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko, Lumajang. Pada 1960-an, saya tergolong orang sukses. Saya memiliki peternakan sapi perah. Setiap hari, berliter-liter susu saya antar kepada para pelanggan. Dari usaha itu, saya menjadi satu-satunya warga yang memiliki televisi. Mereknya kalau tidak salah National.

Setiap hari banyak orang berkumpul di rumah saya sekadar menonton perkembangan berita peristiwa Gerakan 30 September di Jakarta. Tak mengherankan kalau mereka mendengar pernyataan seorang jenderal, "Tumpas PKI sampai ke akar-akarnya." Tak lama berselang, keluar instruksi para ulama Nahdlatul Ulama untuk menumpas habis orang-orang Partai Komunis Indonesia.

Saya banyak mengenal tokoh NU saat itu, seperti KH Amak Fadoli dan KH Anas Mahfudz, serta sejumlah tokoh lain. Sebagai anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser), saya sering menjaga rapat-rapat yang dihadiri para kiai NU. Saya kemudian ditunjuk sebagai ujung tombak dalam penumpasan orang-orang kafir ini.

Pembasmian itu hanya berlangsung dua bulan, sekitar akhir 1965 hingga awal 1966. Lokasi penumpasan dipusatkan di pantai selatan Lumajang, dekat Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh. Juga ada lokasi lain, termasuk di pinggir sungai di dusun saya.

Saya ingat, pertama kali membunuh adalah karena perintah seorang tentara Angkatan Darat, yang saya lupa namanya. Ia menyuruh saya menghabisi nyawa seorang anggota PKI yang tidak saya kenal. "Habisi nyawa orang ini tanpa keluar darah dari badannya," katanya. Saya tidak tahu dari mana asal anggota PKI itu. Tanpa berpikir panjang, saya ambil sepotong rotan yang sudah disiapkan. Saya pukul tengkuk orang itu berkali-kali. Setelah saya pastikan mati, jasadnya langsung saya seret ke tepi laut biar terbawa arus.

Setelah korban pertama saya itu, berturut-turut saya mengeksekusi orang-orang PKI lainnya. Saya tak ingat berapa jumlahnya. Orang-orang PKI tersebut saya lihat diturunkan dari atas truk malam itu. Satu per satu mereka kami bantai. Mayat mereka langsung kami ceburkan ke laut agar hilang ditelan arus.

Tak jarang saya yang mengawali "ritual" pembantaian itu. Pernah suatu kali rekan-rekan sesama eksekutor mendapati seorang anggota PKI melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka jadi ragu menumpasnya. Saya yakinkan kepada teman-teman bahwa orang PKI itu cuma berpura-pura agar lolos dari penumpasan.

Saya habisi saja nyawanya. Dan, betul saja, aksi saya itu membuang rasa canggung rekan-rekan saya. Saya teringat perkataan seorang ulama NU: "Tidak sah sebagai muslim jika tak mau menumpas orang-orang PKI" atau "Haram hukumnya membunuh cicak jika belum membunuh orang-orang kafir ini."

Tipe orang PKI yang harus saya habisi beragam. Ada yang m
dah, ada yang susah. Pernah saya menghadapi seorang saudag
kaya di Lumajang yang dianggap anggota PKI. Waktu itu dia p
lang dari luar kota. Saya harus mencegatnya di dekat jembatan
sekitar Desa Grobogan, Kecamatan Kedungjajang.

Begitu ia muncul, langsung saya tebas lehernya hingga kepa
dan badannya terpisah. Lalu saya lempar mayat itu ke bawah je
batan. Tapi, begitu saya hendak pergi, terdengar suara orang t
tawa. Saya kaget bukan kepalang. Saya seperti melihat badan d
kepala orang itu menyatu kembali dan tertawa-tawa.

Saya tebas lagi lehernya, lalu badan dan kepalanya saya pisa
kan, masing-masing di sisi sungai yang berseberangan. Akhirn
orang itu pun mati. Kini sudah 47 tahun berlalu. Saya tak meny
sal melakukan semua itu. ●

CHAMBALI:

ORANG ITU LANCAR MENGUCAP SYAHADAT...

NAMA saya Chambali. Umur saya 70 tahun. Waktu muda, saya adalah Ketua Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di Kecamatan Rengel, Tuban, Jawa Timur, pada 1964-1967. Saya ingat, saat meletus Gerakan 30 September 1965, Tuban ikut bergolak.

Tuban adalah salah satu daerah "Tapak Merah". Di kabupaten ini, banyak kecamatan yang basis PKI-nya kuat, seperti Kecamatan Plumpang, Palang, Soko, Semanding, Tuban Kota, dan Rengel. Kebetulan Syam Kamaruzaman, tokoh penting dan pejabat Politbiro PKI, berasal dari Tuban. Syam adalah tangan kanan Aidit.

Saya ditunjuk sebagai Ketua Banser Rengel oleh Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Tuban Kiai Haji Murtadji. Menurut Kiai Murtadji, kondisi negara dalam keadaan genting. Diperlukan orang yang tegas dan berani membunuh orang PKI. Permintaan itu langsung saya terima. Kemarahan saya kepada orang-orang PKI sudah di ubun-ubun. Beberapa kali mereka hendak membunuh saya. Saya juga tidak suka cara mereka menistakan para ulama panutan kami.

Dari sekian banyak pemuda Rengel, hanya saya yang berani jadi eksekutor, menyembelih orang PKI. Saya merasa urusan dengan PKI ini bukan cuma perbedaan ideologi, melainkan sudah mirip perang agama. Membunuh atau dibunuh. Kalau mereka tidak dibunuh sekarang, besok mereka yang akan membunuh kami. Merusak agama kami.

Saya membunuh anggota PKI bersama-sama dengan anggota organisasi pemuda lainnya, seperti Pemuda Muhammadiyah dan pemuda Barisan Rakyat (Banra), *onderbouw* Partai Nasional Indonesia. Kami dipanggil setiap kali ada jadwal eksekusi. Biasanya malam hari seusai waktu salat isya. Sudah ada jadwal eksekusi sekaligus nama-nama calon korban dari kantor kecamatan yang diberi komando resor militer.

Malam pertama, saya tidak langsung menjadi eksekutor. Saya ingat kami diajak rombongan Musyawarah Pimpinan Kecamatan Rengel menuju sebuah perbukitan. Tepatnya perbukitan di Jurang Watu Rongko, sekitar tiga kilometer arah barat Kota Kecamatan Rengel. Lokasinya di hutan gelap karena memang jauh dari permukiman. Saat tiba di lokasi, terlihat sudah ada puluhan orang berjejer di tepi jurang dengan tangan terikat di belakang.

(Tempo *mencoba mengecek keberadaan jurang itu. Jurang tersebut sedalam 70-100 meter. Tempat itu masih banyak dihuni binatang liar, seperti monyet, burung gagak, dan ayam hutan. Di dasar jurang terdapat gua dengan panjang sekitar 200 meter. Nama Watu Rongko (Batu Kerangka) mulai digunakan belakangan, saat penduduk yang mulai menempati daerah itu menemukan tulang belulang kerangka manusia. Hingga 1980-an, ratusan kerangka masih ditemukan berserakan di depan mulut gua dan belukar di dasar jurang. Tak ada yang menguburnya. Rangka-rangka manusia itu dibiarkan tergeletak tak beraturan. Semua penduduk di Rengel sudah paham bahwa jurang itu adalah tempat penyembelihan orang-orang PKI. Kepada* Tempo, *Askur, 53 tahun, warga yang mendirikan rumah di sekitar Jurang Watu Rongko, mengatakan hampir tiap pekan sekali ada orang datang untuk* nyekar. *Mereka melempar kembang ke jurang atau di lekukan-lekukan batu*).

Seorang warga menunjukkan lokasi Jurang Watu Rongko.

Kami berbaris. Beberapa menit kemudian, datang seseorang yang berbicara cukup lantang. Di sekitarnya, beberapa orang perwakilan dari kantor Camat, Koramil, dan Kantor Polsek Rengel. Ia mengatakan orang yang diikat ini adalah musuh negara sekaligus membahayakan agama.

Selanjutnya, seorang pemuda dari Kecamatan Soko, Tuban, maju sambil menghunus pedang mendekati tawanan yang berada di paling depan barisan. Pemuda itu mengajukan pertanyaan: *Sampeyan ameh tak pateni. Sak durunge tak pateni, opo sampeyan enek pesen. Nek sampeyan wong Islam, moco syahadat disik* (Anda hendak saya bunuh. Tapi, sebelum saya bunuh, apakah Anda punya pesan. Kalau Anda orang Islam, baca kalimat syahadat dulu).

Pertanyaan itu dijawab dengan gagah oleh anggota PKI tersebut: *Monggo kulo dipejahi. Kulo mboten enten pesen. Kulo mboten sah moco syahadat, tiang PKI kok moco syahadat. PKI mboten tepang Gusti Allah* (Silakan saya dibunuh. Saya tidak ada pesan. Saya tidak usah membaca syahadat. Orang PKI kok baca syahadat. Orang PKI tidak kenal Gusti Allah).

Lalu, dalam hitungan detik, pedang pemuda itu memotong leher korbannya. Darah deras mengalir. Tubuh tak bernyawa itu ditendang masuk ke jurang. Malam semakin larut, satu per satu orang PKI yang kami tangkap berakhir di Jurang Watu Rongko. Itu adalah pertama kalinya saya melihat penyembelihan orang. Perasaan saya bercampur aduk. Badan saya menggigil, perut saya mual sampai muntah-muntah. Saya beberapa hari mengurung diri di rumah.

Saya mulai aktif lagi setelah datang undangan pertemuan para pemuda, tokoh agama dari pelbagai organisasi kemasyarakatan, dan Muspika Rengel. Barangkali Kiai Murtadji mengetahui saya tengah bimbang. Di tengah-tengah pertemuan, tiba-tiba Kiai menghampiri saya, lantas memberikan wejangan. Beliau meminta saya tidak ragu-ragu dalam bertindak, terutama terhadap orang-orang yang dianggap musuh negara dan agama. Setelah itu, saya disodori gelas berisi air putih, yang kemudian saya minum.

Keesokan harinya, ada pemberitahuan dari Muspika Rengel dan Koramil setempat, akan ada eksekusi terhadap orang-orang PKI di Rengel. Seusai isya, saya dan puluhan pemuda lain kembali berkumpul di depan rumah tahanan PKI. Tak berselang lama, dari arah utara, muncul truk yang isinya belasan orang, dengan tangan terikat, yang belakangan diketahui anggota PKI. Truk itu menuju bukit, tepatnya di Jurang Watu Rongko, yang berlokasi di atas Kota Rengel.

Setelah truk itu lewat, ada seorang yang memberi komando kepada kami untuk menyusul ke Watu Rongko. Seperti peristiwa sebelumnya, belasan tahanan sudah berjejer dengan tangan terikat di pinggir jurang. Hati saya tersentak ketika seseorang memanggil nama saya dan memberikan pedang. Malam itu saya diminta menjadi eksekutor.

Tangan saya gemetar ketika pedang yang saya genggam menempel ke leher lelaki yang sudah pasrah di depan saya. Dan, *serrr....* Niat saya suci.... Semoga Allah mengampuni saya. Sejak malam itu, entah berapa nyawa yang tewas di tangan saya.

Satu kejadian yang terus teringat sampai sekarang. Dari sekian orang yang dieksekusi malam itu, ada satu orang yang lolos dari maut. Saya tanya orang itu apakah kamu orang Islam. Dia menjawab: Ya, saya orang Islam. Saya pertegas lagi. Kalau kamu orang Islam, apakah bisa baca syahadat? Orang itu lancar mengucap syahadat.

Tubuh saya langsung gemetar. Pedang di genggaman saya terlepas dan masuk ke jurang. Orang-orang yang menyaksikan eksekusi terdiam. Yang lain meminta saya pergi dari lokasi eksekusi.●

LALU, DALAM HITUNGAN DETIK, PEDANG PEMUDA ITU MEMOTONG LEHER KORBANNYA. DARAH DERAS MENGALIR. TUBUH TAK BERNYAWA ITU DITENDANG MASUK KE JURANG. MALAM SEMAKIN LARUT, SATU PER SATU ORANG PKI YANG KAMI TANGKAP BERAKHIR DI JURANG WATU RONGKO. ITU ADALAH PERTAMA KALINYA SAYA MELIHAT PENYEMBELIHAN ORANG.

PENDEKAR TULUNGAGUNG DALAM PASUNGAN

SEORANG PELAKU PEMBANTAIAN ORANG-ORANG PKI PADA 1965 MENGALAMI GANGGUAN JIWA. KARENA IA KERAP MENGAMUK, AKHIRNYA KELUARGANYA TERPAKSA MEMASUNGNYA.

PRIA 71 tahun itu menyambar celurit di depannya. Senjata tersebut digosok-gosokkan di atas lempengan batu asah sambil sesekali disiram air. Kedua tangannya terus bergerak mengasah hingga salah satu sisi celurit mengkilap. Setelah berkilau tajam, celurit itu dia letakkan begitu saja di depannya. Tak lama berselang, tangan kanannya merogoh saku baju kumalnya dan mengeluarkan rokok. Perlahan dia menyulut rokok kretek itu dan mengisapnya seraya menengadah. Lalu ia mengembuskan asap itu hingga membentuk kepulan-kepulan.

Terkadang terdengar gemerincing rantai besi yang mengikat kaki kirinya saat bergesekan dengan lantai. Rantai itu tampak kokoh dan berat dengan ujung lainnya tertancap pada beton semen. "Dia memang pintar mengasah celurit," kata Marjuni, 67 tahun, tentang kakak kandungnya, Supardi, yang dipasung karena mengalami gangguan jiwa.

Supardi menjalani pemasungan sejak keluar dari Rumah Sakit Jiwa Lawang, Malang, sekitar 30 tahun silam. Sebelum dipasung, Supardi sering membuat warga Podorejo, Sumbergempol, Tulungagung, Jawa Timur, waswas karena kebiasaan pria itu membawa cangkul dan senjata tajam ketika mengamuk. "Tak ada warga yang berani mendekat selain saya," Marjuni, yang selama ini merawat sang kakak, menuturkan.

Ahad siang, 23 September 2012, saat *Tempo* menemui Supardi dan mencoba menyapanya, ia nyaris tak bereaksi. Dia hanya sempat menatap sesaat. Beberapa kali Marjuni memperkenalkan *Tempo* kepadanya, tapi Supardi bergeming. Perokok berat itu malah kembali asyik mengisap rokok kreteknya dalam-dalam.

Namun, ketika *Tempo* dan Marjuni mulai berbincang tentang Partai Komunis Indonesia dan Ansor, Supardi, yang duduk hanya berjarak sekitar satu meter, tampak bereaksi. Dia berdiri dan tiba-tiba raut mukanya memerah. Sorot matanya menatap tajam ke arah kami. Marjuni pun langsung menghentikan perbincangan dan buru-buru mencoba mencairkan suasana dengan menyodorkan sebungkus rokok kepada sang kakak. "Kalau kakak saya tidak segera dibujuk dengan rokok, emosinya akan naik," ujarnya berbisik. "Kalau sudah mengamuk, susah dikendalikan."

Kami berdua kemudian memilih menjauh. Marjuni menuturkan, sejak dulu, sosok Supardi memang ditakuti. Selain perawakannya tinggi besar–kira-kira tingginya 176 sentimeter dan bobotnya 75 kilogram–ia dikenal sebagai pendekar silat yang tangguh. Sejak remaja, dia aktif berguru ke sejumlah pendekar silat di Tulungagung dan Blitar. Kehebatan dia dalam ilmu bela diri itulah yang membuat pengurus Gerakan Pemuda Ansor, organisasi pemuda Nahdlatul Ulama, Tulungagung, merekrutnya menjadi algojo dalam pembantaian anggota PKI pada 1965.

Kala itu, tak ada anggota PKI yang lolos dari sergapan Supardi dan kawan-kawannya. Mereka yang tertangkap diikat menjadi satu sebelum digorok. "Mas Supardi bisa mengikat empat sampai lima orang sekaligus sendirian," kata Marjuni. Mayat mereka kemudian dikubur di dalam sebuah lubang besar di pemakaman desa. Marjuni tak bisa mengingat lagi berapa orang PKI yang disikat kakaknya.

Tak semua pemuda dan anggota Ansor di desanya, tutur Marjuni, ikut melakukan penumpasan. Marjuni sendiri memilih menghindari bentrok fisik karena tak cukup punya nyali. Dari keluarganya, hanya Supardi yang berani ikut dalam pembantaian orang PKI. Menurut Marjuni, dia mengikuti penggemblengan ilmu kanuragan dan belajar pencak silat bersama Supardi di sebuah pondok pesantren di Blitar hanya agar tak dicurigai sebagai simpatisan PKI.

Syarifatul Jannah, 75 tahun, kakak Supardi, yang tempat tinggalnya bersebelahan dengan rumah Marjuni, membenarkan cerita itu. Menurut Jannah, semasa muda, adiknya memang gemar belajar ilmu silat dan kebatinan di sela-sela mencari rumput buat pakan ternak ayahnya. Badannya yang besar juga membuat Supardi disegani remaja sebayanya. "Pokoknya, dia jagoan," ujarnya.

Jannah juga membenarkan kabar bahwa adiknya ikut dalam penumpasan orang PKI di wilayahnya. Dipimpin dua tokoh Ansor, TY dan SR, Supardi berperan meringkus dan mengikat anggota PKI yang tertangkap. Mereka kemudian digiring ke lokasi pemakaman untuk dihabisi.

•••

SETELAH peristiwa pembantaian itu, Supardi diajak seorang temannya bekerja di perkebunan kopi di Sumatera Selatan. Tapi, baru sekitar tiga tahun dia bekerja di sana, Marjuni menerima kabar bahwa sang kakak mengalami gangguan jiwa

MEREKA YANG TERTANGKAP DIIKAT MENJADI SATU SEBELUM DIGOROK. "MAS SUPARDI BISA MENGIKAT EMPAT SAMPAI LIMA ORANG SEKALIGUS SENDIRIAN."

Supardi.

nyediakan bak air besar di depan pondok. Air itulah yang digunakan Supardi untuk mandi.

Meski hidup dalam kondisi seperti ini selama puluhan tahun, tak pernah sekali pun Supardi mengalami sakit fisik. Tubuhnya terlihat bugar dengan beberapa helai rambut putih yang mulai rontok. "Rambut itu dulu sangat hitam dan panjang," ujar Marjuni. "Semasa muda, Supardi sengaja memanjangkan rambutnya, yang merupakan ciri khas seorang pendekar."

Kini sehari-hari Supardi mengisi waktu dengan membuat benda yang disukainya. Salah satunya layang-layang. Belenggu yang melingkar di kakinya tak membuat aktivitasnya terganggu. Saat membuat layang-layang siang itu, tangannya cukup cekatan menajamkan bilah bambu dengan pisau kecil. "Dia tak bisa diam dan selalu membuat sesuatu," Marjuni menjelaskan.

Kepandaian Supardi dalam mengasah celurit dan perkakas tajam lainnya mendatangkan keuntungan. Dia kerap menerima order menajamkan celurit dan ujung cangkul dari warga sekitar rumahnya. Sebagai ongkosnya, warga memberikan beberapa batang rokok, rajangan tembakau, dan makanan.

Bagi Marjuni sendiri, hal itu ikut meringankan beban biaya perawatan sehari-hari kakaknya. Apalagi penghasilan Marjuni sebagai buruh tani dan pembuat batu bata tak banyak menghasilkan pemasukan. Dua kolam ikan yang dia kelola kini terbengkalai. "Sudah lama berhenti karena kehabisan modal," katanya.

Sebenarnya Marjuni tak tega memasung kakaknya seperti itu. Dia kasihan ketika beberapa orang mendatangi rumahnya hanya untuk menonton orang yang dirantai. Namun dia juga tidak memiliki cara untuk mengamankan Supardi jika dilepas seperti dulu. Kebiasaan Supardi yang mengamuk dengan membawa cangkul dan celurit membuat warga ketakutan.

Begitulah. Menjelang sore, saat *Tempo* pamitan, Supardi hanya menoleh sesaat dan kemudian mengangguk. Setelah itu, pendekar tersebut kembali tercenung seraya mengisap rokoknya.

dan sering mengamuk. Karena itu, ayah Supardi memutuskan menjemputnya pulang. "Kami sampai meminjam borgol milik anggota polisi setempat saat membawanya naik kapal laut," kata Marjuni.

Upaya penyembuhan medis, termasuk mengirim Supardi ke rumah sakit jiwa, dan spiritual yang ditempuh keluarga tak membuahkan hasil. Dia masih kerap mengamuk. Dengan kaki dirantai, Supardi kemudian melewati hari-harinya di sebuah kamar kecil berukuran 2,5 x 1,5 meter di belakang rumah Marjuni. Kamar itu dibangun semipermanen dengan setengah bidang dindingnya berupa kain bekas dan karung.

Boleh dibilang, kondisi pondok pengasingan Supardi itu lebih buruk daripada kandang ternak. Tak ada penerangan dan perkakas rumah tangga di dalamnya, selain tumpukan benda bekas seperti ban sepeda, ember plastik, sapu, tas kumal, serta tumpukan kain yang merupakan pakaian Supardi sehari-hari. Satu-satunya benda terawat yang berada di tempat itu adalah sebuah kopiah yang tergantung di salah satu dinding. Menurut Marjuni, kakaknya masih memiliki pakaian Ansor, yang disimpan di dalam tas.

Di belakang pondok itu terdapat jamban keluarga Marjuni. Supardi sendiri tak pernah menggunakan jamban itu. Karena kondisi kakinya yang terikat rantai sepanjang dua meter, dia hanya bisa memindahkan tubuh dari luar ke dalam pondok untuk berteduh. Aktivitas buang air dia lakukan di sekitar pondok, yang dikelilingi tanaman pisang. Namun Marjuni tetap me-

KIAMAT AKIBAT DENDAM KESUMAT

DI BANYUWANGI, PEMBANTAIAN DILAKUKAN SECARA BERGANTIAN. KE JURANG TANGIS, MAYAT-MAYAT DILEMPARKAN.

NAMA pasukan itu Gagak Hitam. Bukan pasukan TNI, karena isinya adalah anggota Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia (PNI), dan organisasi *onderbouw* keduanya di Banyuwangi, Jawa Timur. Tugas mereka adalah menumpas orang-orang komunis di ujung timur Pulau Jawa itu. Dinamakan Gagak Hitam karena pasukan ini memakai atribut serba hitam, dari celana, baju, hingga ikat kepala.

Pasukan ini dibentuk setelah orang NU marah karena 62 anggota Ansor dihabisi di Dusun Cemethuk, Kecamatan Cluring, Banyuwangi. Pemuda Ansor yang bersenjata celurit, pedang samurai, keris, dan bambu runcing itu sebenarnya datang untuk membantai orang PKI, tapi justru mereka yang dihadang di ujung desa dan disekap bersama orang-orang PNI. Peristiwa itu kemudian diabadikan dalam Monumen Pancasila Jaya atau yang dikenal dengan Lubang Buaya di Cemethuk.

Kami menemui salah satu anggota Gagak Hitam di Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri. Namanya Baidawi, umurnya sudah 80 tahun, tapi terlihat masih gagah. Semasa muda, ia cukup disegani. Dia pernah memimpin Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi)–salah satu organisasi afiliasi NU–di Desa Boyolangu. Ia juga ditakuti karena, menurut kabar yang beredar di masyarakat, banyak menghabisi nyawa orang PKI.

Namun, saat bertemu dengan *Tempo* pada akhir bulan lalu, Baidawi membantah. "Kalau ada yang bilang saya tukang bunuh orang PKI, tidak usah didengarkan. Itu salah. Saya hanya melihat," katanya. Baidawi mengatakan menjadi anggota Gagak Hitam karena menganggap komunisme membahayakan negara. "Tapi sekarang saya tak perlu mengingatnya lagi, asalkan PKI tidak bangkit lagi di Indonesia."

Penumpasan orang-orang komunis diumumkan secara terang-terangan oleh seorang pegawai kecamatan. "Sambil bawa pengeras suara, dia mengumumkan bahwa orang-orang PKI harus dihabisi," ujarnya.

Jurang Tangis, tempat pembuangan mayat orang-orang PKI.

Pasukan Gagak Hitam mendatangi markas ataupun rumah anggota PKI dan organisasi afiliasinya. Menggunakan parang, Gagak Hitam lalu menghabisi mereka dan membuang mayatnya ke sungai atau jurang. Rumah milik orang komunis dibakar. "Saat itu seperti kiamat," katanya.

Selain dilakukan oleh warga sipil, pembantaian dilakukan tentara. Suatu ketika tentara kewalahan dengan banyaknya orang yang harus dihabisi. Eksekusi sejumlah tahanan pun diserahkan kepada penduduk sejumlah desa, termasuk Boyolangu. Kata Baidawi, kampungnya pernah mendapat limpahan lima orang komunis, yang terdiri atas empat pria dan satu wanita.

Malam hari, kelimanya dieksekusi di lapangan yang kini menjadi pemakaman desa. Proses eksekusi dihadiri ratusan warga, yang semuanya membawa parang, termasuk Baidawi. Dengan tangan terikat, lima orang komunis itu dibantai beramai-ramai kemudian dikubur dalam satu lubang.

Mantan Sekretaris Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) Banyuwangi Andang Chatif Yusuf mengatakan jumlah korban dari pihak komunis diperkirakan ribuan. Ia pernah dipenjarakan oleh tentara selama dua tahun. Sebelum dipenjara, dia dibawa ke kamp tahanan di sebuah lapangan di Kecamatan Kalibaru. Sepuluh hari di kamp tersebut, Andang menyaksikan ada ribuan orang yang nasibnya sama dengan dirinya. "Dari camat, lurah, carik, semua ada di kamp itu," kata Andang.

Di sana setiap orang kemudian dipisahkan menurut jenis hukumannya. Bila masuk kategori berat, akan langsung dieksekusi pada malam harinya. Mayatnya dibuang ke Jurang Tangis. Jurang yang berlokasi di kawasan Taman Nasional Baluran di wilayah perbatasan Banyuwangi dan Situbondo itu menjadi salah satu kuburan massal orang komunis di Banyuwangi. Lokasi lainnya berada di jurang Gunung Kumitir, di perbatasan Banyuwangi dan Jember.

JASAD TERAPUNG SAMPAI JAUH

DARI JEMBATAN DI PERBATASAN SOLO-SUKOHARJO INILAH APARAT MILITER DAN WARGA SIPIL MEMBANTAI ORANG YANG DITUDUH KOMUNIS.

▲ **Fondasi bekas Jembatan Bacem.** Dulu kerap terdengar tembakan dan suara benda jatuh ke sungai.

MBAH Wiryo merinding ketika menyaksikan tiang fondasi bekas jembatan yang berdiri di tengah Bengawan Solo. Perempuan 80 tahun itu ingat tragedi 47 tahun silam. Bekas jembatan di Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, itu jadi saksi bisu pembantaian terhadap mereka yang dituding terlibat Partai Komunis Indonesia.

Setelah September 1965, dari rumahnya yang berjarak 100 meter dari Jembatan Bacem tersebut, ia kerap mendengar suara tembakan. "Lalu ada suara seperti benda jatuh ke sungai," kata perempuan yang terlahir bernama Suyek ini, Sabtu dua pekan lalu. Suara itu datang dari jasad yang tercebur ke sungai.

Pada saat itu, selama enam bulan, tiap 2-3 hari sekali ada eksekusi terhadap aktivis PKI. Jika bunyi dor senjata api menyalak, penduduk sekitar jembatan memilih mengunci pintu. "Kalau ada di luar rumah takut dituduh PKI," katanya. Penduduk baru berani ke luar rumah ketika pagi menjelang. Kerap, pada pagi hari, ia menyaksikan mayat terdampar di tepi Bengawan Solo. Lalu beberapa orang menggeser mayat bergelimpangan itu ke tengah sungai agar terbawa arus.

Jembatan yang berjarak 4 kilometer dari jantung Kota Solo itu memang merupakan salah satu tempat favorit eksekusi. Sejarawan Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, Sudharmono, mengatakan eksekusi mati orang-orang PKI di atas Jembatan Bacem terjadi pada sekitar Oktober 1965. Akibat pembantaian itu, air Bengawan Solo berwarna darah. Kadang penduduk mendapati jari manusia di perut ikan. Ketika terjadi banjir besar pada 1966, bekas eksekusi di Bengawan Solo hilang. "Sungai kembali jernih," kata Sudharmono.

Bibit, yang pernah ditahan di Komando Distrik Militer Solo karena dituding sebagai PKI, menghitung ada 144 tahanan yang satu per satu diangkut ke tempat pembantaian. Dari banyak orang, ia mendengar para tahanan itu dieksekusi di Jembatan Bacem. Tempat itu, kata dia, juga jadi ladang membunuh tahanan dari tempat lain.

Bibit menyatakan hal ini ketika Paguyuban Korban Orde Baru berziarah ke lokasi pembantaian itu pada 2005. Testimoni Bibit ini dimuat di situs pribadi Umar Said, wartawan Indonesia yang hidup sebagai eksil di Paris. Umar meninggal hampir setahun lalu. Bibit juga mendengar kisah, beberapa hari setelah pembantaian, aparat keamanan memerintahkan masyarakat setempat untuk membersihkan bekas darah yang menempel pada besi pembatas jembatan.

Menurut Supeno, Koordinator Paguyuban, selain militer, yang mengeksekusi orang PKI di Jembatan Bacem adalah Barisan Ansor Serbaguna (Banser), yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama. "Yang saya dengar, Banser ikut menembaki PKI," katanya Sabtu dua pekan lalu.

Tapi sesepuh NU Solo, Kiai Haji Abdul Rozaq Shofawi, membantah anggapan bahwa Banser NU ikut membantai. Menurut dia, Banser hanya bertugas menjaga pesantren dari ancaman orang-orang PKI. Mereka bersiaga karena belum ada militer yang masuk ke Solo. "Waktu itu ada kabar PKI akan membunuh kiai-kiai NU," katanya.

Supeno, kini 82 tahun, masuk penjara milik tentara pada November 1965 dengan tudingan terlibat PKI. Menurut dia, eksekusi di Jembatan Bacem dilakukan setidaknya 71 kali. Eksekusi selalu dilakukan sembunyi-sembunyi pada malam hari. Untuk mengenang mereka yang jadi korban, Supeno, yang punya enam anak, setahun sekali berziarah ke Jembatan Bacem. Ia *nyekar* bersama kawan senasib dan keluarga korban. ●

BURHAN ZAINUDDIN RUSJIMAN, 72 TAHUN:

SAYA PUNYA LICENSE TO KILL

SAYA dijuluki Burhan Kampak. Sebab, saat terjadi konflik pada 1965-1966, saya sering membawa kampak (kapak) panjang untuk memburu orang yang diduga komunis. Tapi saya juga kerap mengeksekusi dengan pistol. Prinsip saya, daripada dibunuh, lebih baik membunuh.

Kebencian saya terhadap komunisme dimulai sejak mahasiswa, ketika menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Saya yakin komunis musuh semua agama. Salah satunya karena fatwa Muktamar Majelis Ulama Indonesia di Sumatera Selatan pada pertengahan 1962. MUI menyatakan komunisme haram karena ateis. Mulai saat itu, saya berpikir, orang PKI kalau bisa dibina ya dibina, kalau tidak mau ya dibinasakan.

Pada awal 1965, tahun ketiga kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, saya dikeluarkan karena memasang spanduk dan poster menuntut pembubaran Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), organisasi di bawah Partai Komunis Indonesia.

Pada saat menempel poster itu, saya ditendang hingga jatuh oleh anak CGMI. Pengurus kampus lalu memberi saya cap mahasiswa kontrarevolusioner dan menentang konsep Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunis) Presiden Sukarno.

Sebelum meletus G-30-S, pada 1963-1964 CGMI merajalela dan meneror kelompok dan mahasiswa Islam. Pendukung PKI hampir tiap hari menggelar orasi dan demo di Malioboro dan di tempat-tempat strategis lain.

Kebencian saya memuncak setelah saya dengar Ketua Comite Central (CC) PKI Dipa Nusantara Aidit berpidato melecehkan HMI. Dalam Kongres III CGMI pada 29 September 1965, Aidit bilang, kalau CGMI tak mampu menyingkirkan HMI dari kampus, sebaiknya mereka sarungan saja.

Ketika G-30-S meletus, perang terhadap PKI dan simpatisan pendukungnya gencar saya lakukan di Yogyakarta. Khususnya setelah kedatangan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) ke Yogyakarta sekitar Oktober 1965 di bawah Kolonel Sarwo Edhie Wibowo.

Operasi pembersihan komunis ini biasa saya lakukan bersama tentara. Kami diminta membuat pagar betis, lalu tentara beroperasi. Tapi, karena masyarakat dan organisasi Islam juga menaruh dendam, kami pun sering bergerak sendiri.

Dengan posisi sebagai staf satu Laskar Ampera Aris Margono dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), saya mendapat *license to kill*. Ada 10 orang yang diberi pistol, lalu dilatih di Kaliurang. Pistol jenis FN diberikan sekitar November 1965.

Saya paling sering kembali ke markas Kostrad di Gedung Wanitatama Yogyakarta untuk minta peluru. Saya menggelar operasi mencari simpatisan dan tokoh PKI di wilayah Yogyakarta hampir saban hari, mulai akhir 1965 sampai pertengahan 1966.

Wilayah operasi saya tidak hanya di Yogyakarta, tapi juga sampai Luweng Gunungkidul serta Manisrenggo dan Kaliwedi di Klaten, Jawa Tengah. Di Luweng, eksekusi dilakukan pada malam hari dengan cara mendorong orang yang ditutup matanya dari tebing tinggi ke aliran sungai yang mengalir ke pantai selatan Jawa.

Di Kaliwedi, sebelah barat Klaten, sebelum eksekusi, warga sekitar diminta membuat parit sepanjang 100-200 meter untuk meletakkan kader PKI yang akan dieksekusi. Eksekusi di Kaliwedi memakai senjata laras panjang dan AK. Laras pendek hanya untuk memastikan korban benar-benar mati. ●

Warga diberi pengarahan tentang G-30-S di Jawa Tengah.

KOLEKSI PERPUSTAKAAN NASIONAL RI, FAST.MEDIAMATIC.NL (PRINCEN)

DARI GUDANG BERAS KE KEBUN PISANG

DI GROBOGAN, KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMBANTAIAN PKI DIKOMANDO LANGSUNG OLEH TENTARA.

SUATU sore pada 1969, sebuah Chevrolet Impala memasuki Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Grobogan, Jawa Tengah. Mobil yang ditumpangi beberapa pejabat serta satu *londo*–sebutan masyarakat setempat untuk kulit putih–itu langsung memasuki kantor kecamatan.

Londo itu adalah Poncke Princen, aktivis hak asasi manusia yang pertama kali menyatakan adanya pembantaian 2.000-3.000 anggota Partai Komunis Indonesia di seluruh Grobogan. Dia datang bersama Panglima Angkatan Darat Jenderal Maraden Saur Halomoan Panggabean dan Menteri Penerangan Budiardjo. Mereka bermaksud mengklarifikasi kebenaran berita yang dibawa Princen itu.

Dari kantor kecamatan, rombongan itu segera meluncur ke kamp tahanan di dekat balai desa. Sebelumnya, bangunan itu hanyalah gudang beras milik Ang Kwing Tian. "Militer lalu meminjamnya untuk tempat penahanan orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI," ujar salah satu saksi yang kini menjabat perangkat desa kepada kami.

Sesampai di kamp tahanan, mereka tidak berhasil membuktikan indikasi pembunuhan, karena jumlah tahanan masih sama dengan data yang tertulis. Di kemudian hari baru ketahuan, sebelum rombongan datang, kamp itu sebenarnya nyaris kosong. Sebagian besar sudah dieksekusi oleh mereka yang tergabung dalam milisi Pertahanan Rakyat (Hanra) Inti, anggota Hanra paling terlatih.

Agar jumlahnya kembali sesuai dengan daftar orang yang ditangkap, tentara kembali menangkapi orang. "Kali ini yang ditangkap bukan orang-orang PKI, melainkan pengagum Sukarno, yang sering disebut Sukarnosentris," ujar saksi mata itu.

Meski misi Princen untuk membuktikan pembantaian seperti yang dituduhkannya gagal, kedatangan Impala itu membawa perubahan di desa tersebut. "Sebelumnya, setiap pukul tiga pagi selalu ada tahanan masuk ke kamp, kemudian siangnya dibawa entah ke mana dan menghilang," ujar Suwito, warga Kuwu lainnya yang menyaksikan penangkapan itu. Setelahnya, kamp itu dibubarkan, tahanan disebar ke tempat lain, dan ketegangan di desa tersebut berangsur terurai.

***

PRINCEN mendapat kabar pembantaian itu dari Romo Wignyo Sumarto, seorang pastor di ibu kota Kabupaten Grobogan, Purwodadi. Kepada Princen, Romo bercerita banyak orang ditangkap kemudian dibunuh dalam operasi pembersihan PKI, yang dikenal dengan Operasi Kikis I dan II, pada 1967-1968.

Romo mendengar sendiri hal itu dari pengakuan penjaga kamp-kamp tahanan di sebelah timur Semarang. Dalam cerita itu, orang yang ditangkap kemudian dibunuh dengan cara dipukul di bagian kepala dengan batangan besi. "Ini dilakukan pada malam hari setelah kereta api Yogya lewat," ujar Princen dalam biografinya, *Kemerdekaan Memilih*.

Salah satu anggota milisi Hanra Inti, bernama Mamik, menceritakan itu dalam pengakuan dosanya. Mamik menyebutkan telah membunuh 50 orang hanya dalam semalam.

Cerita Romo Wignyo ini kemudian diungkap Princen kepada pers nasional dan internasional. Henk Kolb, wartawan harian Belanda, *Haagsche Courant*, menjadikan cerita itu sebagai acuan investigasinya.

Dalam laporannya, Kolb menyebutkan ada tujuh ladang pembantaian atau kuburan massal, yakni di Desa Simo (300 mayat yang terkubur), Cerewek (25), Kuwu (100), Tanjungsari (200), Banjarsari (75), Grobogan (50), dan Pakis (100 mayat).

KEPADA PRINCEN, ROMO BERCERITA BANYAK ORANG DITANGKAP KEMUDIAN DIBUNUH DALAM OPERASI PEMBERSIHAN PKI, YANG DIKENAL DENGAN OPERASI KIKIS I DAN II, PADA 1967-1968.

Sedangkan untuk kamp penahanan, kamp yang paling besar adalah gudang beras milik Ang Kwing Tian itu. "Tahanan berasal dari berbagai tempat. Demikian pula dengan satu regu Hanra Inti yang bertugas jaga di situ," ujar sumber *Tempo* yang saat itu menjadi asisten petugas kesehatan di kamp tahanan.

Di kamp tersebut tahanan mengalami siksaan luar biasa, dari pukulan hingga sengatan listrik. Tidak jarang tahanan hampir gila lantaran siksaan tersebut. Pada malam-malam tertentu, para anggota Hanra Inti mengeluarkan sedikitnya 20 tahanan. Mereka diangkut dengan truk ke suatu tempat. Di lokasi tersebut, para tahanan dieksekusi dengan cara dipancung atau dipukul tengkuknya dengan besi.

Beberapa penduduk juga menyebut hutan Gundih di luar Desa Kuwu sebagai tempat pembantaian. Mereka tahu hutan jati ini merupakan tempat eksekusi lantaran tanpa sengaja algojo meninggalkan satu potongan kepala yang lupa dikubur.

Seorang petani bernama Sugiri, kepada sejarawan Bonnie Triyana, mengaku pernah melihat langsung seseorang yang kepalanya dipukul besi hingga tewas. Mayatnya langsung dikubur di tempat dan di atasnya ditanam pohon pisang.

Wartawan *Harian Indonesia Raya* yang ikut melaporkan kejadian di Grobogan, Maskun Iskandar, menyebutkan razia terhadap PKI di Purwodadi diawali dengan penangkapan Sugeng karena sering merampok. Dalam pemeriksaan, Sugeng mengatakan PKI sedang giat membentuk Tentara Pembebasan Rakyat. "Berdasarkan keterangan awal itulah pembersihan terhadap PKI dilakukan," ujar Maskun.

Menurut Bonnie, berbeda dengan pembantaian di Jawa Timur yang melibatkan masyarakat secara sukarela, di Grobogan tentara langsung memberi komando kepada elemen masyarakat. "Lebih baik kalian (masyarakat) membersihkan (komunis) sendiri daripada saya yang membersihkannya," kata Komandan Kodim 0717 Purwodadi Letnan Kolonel Tedjo Suwarno, seperti dikutip Princen.

Apa yang dilakukan Tedjo sebenarnya merupakan perintah atasannya. Menurut seorang sumber *Tempo*, ada radiogram langsung dari Panglima Kodam VII/ Diponegoro Mayor Jenderal Surono, yang meminta Kodim 0717 melakukan operasi pembersihan PKI. "Operasi pengamanan ini tentunya berbentuk penangkapan dan pembantaian itu," ujar sumber *Tempo* tersebut.

Beberapa hari setelah Princen mengungkapkan cerita mengenai pembantaian PKI kepada pers, Panglima Kodam VII/ Diponegoro Mayor Jenderal Surono membuat bantahan. Dia mengatakan apa yang disampaikan Princen adalah bentuk perang urat saraf yang dilancarkan PKI dalam rangka menggagalkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), yang sedang dilakukan pemerintah Orde Baru.

Bukti adanya perintah dari pusat juga tertuang dalam memori intelijen serah-terima jabatan Kepala Staf Kodam Diponegoro tertanggal 23 Juli 1968. Memori intelijen ini secara gamblang menyebutkan jumlah anggota PKI yang telah ditangkap dalam Operasi Kikis II: 172 orang klasifikasi A, 248 orang klasifikasi B, dan 472 orang klasifikasi C. "Biasanya yang klasifikasi A itu yang kategorinya berat dan pasti dihabisi," ujar sumber *Tempo*. ●

MENGAMBIL JATAH DI DAERAH MERAH

BOYOLALI DAN KLATEN DI KAKI GUNUNG MERAPI JADI LADANG PEMBANTAIAN ANGGOTA PKI.

INGATANNYA selalu kembali ke masa lalu setiap kali orang menanyakan telinga kirinya yang terbelah. Kembali ke pagi, akhir Oktober 1965, ketika Soepomo hendak berangkat mengajar di Sekolah Dasar Ampel, Boyolali. Sekelompok tentara menangkapnya di daerah Mojosongo Utara. Dia dibawa ke kantor Bintara Urusan Teritorial Pertahanan Rakyat atau Komando Rayon Militer Mojosongo, Boyolali.

Di kantor itu, Soepomo–kini 67 tahun–diinterogasi soal pemilikan senjata dan tuduhan pembunuhan. Meski tak terbukti, dia tetap disiksa. "Dua hari dua malam, telinga dan betis dibabat pedang samurai, kepala dipukul popor senjata, punggung dicambuki dengan karet besar ukuran 5-6 sentimeter sepanjang 60 sentimeter," ujar pria yang kini menjadi Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 itu.

Geger peristiwa G-30-S rupanya telah membuat tentara dan massa bergerak di daerah Boyolali, Klaten, Solo, dan sekitarnya. Wilayah Jawa Tengah saat itu disebut daerah merah, yang dikuasai Partai Komunis Indonesia dan afiliasinya. Dia menyebutkan operasi penumpasan PKI oleh Resimen Para Komando Angkatan Darat dan pasukan Komando Daerah Militer VII/Diponegoro mulai berlangsung sejak 22 Oktober 1965.

Soepomo diciduk lantaran aktif sebagai anggota pengurus Pemuda Rakyat Kabupaten Boyolali. Dia mengaku sebelumnya sempat menjadi target pembunuhan, tapi selalu berhasil menghindar berkat bantuan teman-temannya. Namun akhirnya dia ditangkap, ditahan di beberapa kamp, dan bekerja paksa bertahun-tahun.

Hampir 50 tahun berlalu, Soepomo kini bergiat dalam advokasi korban peristiwa itu. Dia bersama seorang saksi yang masih hidup mendata tempat-tempat pembantaian dan penguburan, termasuk yang di Sonolayu. Tempat itu tak jauh dari Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Boyolali di kaki Gunung Merapi.

"Di sanalah ratusan orang dibantai," ucapnya. Sekarang tanah kebun ini ditanami ketela pohon dan pepaya. Beberapa nisan dan batu penanda diletakkan keluarga yang peduli peristiwa itu.

Ladang pembantaian lain adalah di Lapangan Kaligentong, Kecamatan Ampel; Lawang, Kelurahan Jurug; Ketaon, Kecamatan Banyudono; dan jurang Porong di perbatasan Kecamatan Musuk-Klaten. Kuburan ratusan korban juga ditemukan di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Lokasinya ada di daerah Gunung Butak–sebuah bukit kecil–di jalan yang menghubungkan Kecamatan Sruwen, Semarang, dan Kecamatan Karanggede, Boyolali. Tempat lain, menurut penelitian Singgih Nugroho dari Yayasan Persemaian Cinta Kemanusiaan (Percik) Salatiga, ada di Alas Kopen, Kecamatan Bringin, dan Lapangan Skeep Tengaran.

Operasi penumpasan aktivis PKI juga bergerak ke selatan, menuju daerah Tulung, perbatasan Boyolali-Klaten. Gito Sudarmo, 82 tahun, salah satu Komandan Peleton Gerakan Masyarakat di Kecamatan Teras, Boyolali, menceritakan, mereka diminta membantu tentara Batalion E Cilacap menangkap dan menelanjangi korban.

Anggota PKI yang tertangkap di kaki Gunung Merapi.

"Salah satunya di bekas gudang gula Belanda yang sekarang menjadi gedung badminton di sebelah barat Pasar Cokro, Tulung," ujarnya.

Gito bersama 30 pemuda biasanya bertugas "mengambil jatah"–menangkap orang yang diduga anggota PKI. Biasanya, tiga orang yang ditangkap tentara dikawal lima anggota peleton Gito. Kebanyakan tertangkap dalam kondisi babak-belur. Beberapa bahkan tewas lantaran ramai-ramai dipukuli.

Mereka membawa tawanan ke lokasi eksekusi. "Di lokasi tersebut sudah ada lubang untuk menguburkan mayat. Siapa yang menggali, saya tidak tahu," ucap Gito.

Pria sepuh ini mengatakan mereka tak pernah mengeksekusi tawanan di tempat yang sama. Gito juga mengaku hanya mengawasi dan tak ikut mengeksekusi.

Beberapa kali mereka kesulitan saat mengeksekusi karena korban kebal senjata tajam. "Kami geledah, kalau perlu ditelanjangi sampai ketemu jimat. Kekebalan mereka hilang," katanya. ●

SETELAH PISTOL MENYALAK DI TEGALBADENG

PEMBANTAIAN ANGGOTA PKI DI BALI DIMULAI DARI JEMBRANA. RIBUAN ORANG DIBUNUH, NYARIS TANPA PERLAWANAN.

TIDAK banyak yang berubah dari bangunan dua lantai di tepi Jalan Manggis, Desa Lelateng, Kabupaten Jembrana, itu. Gedung bertembok tebal dengan tiga jendela besar di lantai dua itu tampak kokoh. Empat dekade lampau, gedung ini dikenal dengan sebutan Toko Wong.

Ketika *Tempo* berkunjung ke sana, pertengahan September lalu, orang-orang tua di Jembrana masih ingat betul sejarah gelap Toko Wong. Meski sekarang bangunan itu dipakai buat menjual mebel aneka rupa, tak mudah untuk lupa apa yang terjadi di sana pada pengujung November 1965.

"Toko itu dipakai untuk menahan orang-orang PKI," kata Ida Bagus Raka Negara, 73 tahun, bekas Kepala Desa Tegalcangkring, Jembrana. Dia lalu bercerita bagaimana setiap malam truk-truk besar membawa ratusan anggota Partai Komunis Indonesia untuk disekap di sana. "Waktu itu, penjara di pusat kota sudah penuh," ujarnya.

Para tawanan ini tak dipenjara lama-lama. Setiap kali lantai dasar dan lantai dua toko yang semula terkenal sebagai toko kelontong itu padat dengan manusia, truk-truk yang sama akan mengangkut mereka pergi. Tak ada yang kembali. Sampai suatu malam, entah kenapa, para penjaga murka. "Semua tahanan PKI diberondong dengan senapan mesin," kata Raka. Tak kurang dari 200 anggota PKI tewas malam itu.

"Mayat mereka lalu dibuang ke dalam sumur-sumur di sekitar toko," ujar seorang warga di lingkungan itu menimpali kisah Raka. Tak mau disebut namanya, dia seperti enggan mengingat tragedi di Toko Wong. Hanya satu yang membekas di kepalanya: "Darahnya banyak sekali."

•••

PEMBANTAIAN anggota PKI di Bali tidak terjadi segera setelah penculikan dan pembunuhan enam jenderal TNI Angkatan Darat di Jakarta terkuak pada awal Oktober 1965. Ketika berita soal konflik berdarah di Ibu Kota sampai ke Bali, situasi politik memang memanas. Tapi belum ada gerakan yang mengarah pada pembunuhan massal anggota PKI.

Geoffrey Robinson dalam bukunya, *The Dark Side of Paradise*, yang mengulas sejarah kelam pembantaian politik di Bali, merunut kembali peristiwa yang kemudian berujung pada pembumihangusan semua kader komunis di Pulau Dewata itu. Dia menemukan bahwa pembunuhan besar-besaran baru terjadi pada awal Desember 1965, setelah pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat dan Komando Daerah Militer Brawijaya, Jawa Timur, mendarat di Bali.

"Sebelumnya memang ada desakan yang agresif dari Partai Nasional Indonesia dan sejumlah organisasi Islam, seperti Muhammadiyah, untuk mengembalikan

FOTO-FOTO: TEMPO/KONTRIBUTOR BALI

Pantai Baluk Rening, Desa Baluk, Jembrana, Bali, dan Toko Wong.

ketertiban dan menghancurkan pengkhianatan PKI, tapi otoritas militer di Bali tidak meresponsnya," tulis Robinson. Peneliti dari Cornell University, Amerika Serikat, ini menilai petinggi militer di Bali masih kebingungan menentukan sikap: ikut Sukarno atau Soeharto.

Selain itu, Gubernur Bali masih dijabat petinggi PKI: Anak Agung Bagus Sutedja. Kegamangan inilah yang membuat massa PKI di desa-desa relatif masih aman. Konflik sudah terjadi, tapi masih amat sporadis. Di beberapa kabupaten, anggota Pemuda Rakyat–organisasi pemuda afiliasi PKI–bahkan sempat menyerang seterunya dari PNI atau Nahdlatul Ulama.

Pada pertengahan November 1965, misalnya, massa PKI sempat menyerang kader PNI di Gerokgak, Buleleng Barat, dan Desa Bungkulan, Buleleng Timur. Bentrokan pecah, sejumlah pemuda tewas, tapi api tak menyebar ke wilayah lain.

Barulah setelah Sutedja dicopot pada akhir November 1965, mulai terjadi perubahan. Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah–penguasa militer tertinggi di sebuah provinsi pada masa itu–Brigadir Jenderal Sjafiuddin memerintahkan semua orang yang diduga berkaitan dengan PKI membuat pernyataan terbuka mengutuk peristiwa G-30-S. Militer juga mulai menerbitkan berbagai daftar nama orang yang diduga PKI, lengkap dengan dokumen "rencana pemberontakan".

Amarah massa mulai memuncak. Sebuah insiden di Tegalbadeng, Jembrana, kemudian jadi awal pembantaian massal di Bali.

Pada 30 November 1965, seorang tentara dan dua pemuda anggota Barisan Ansor NU mengendap-endap di luar rumah Santun, seorang polisi, di Tegalbadeng. Malam itu, ada kabar bahwa Santun tengah menggelar rapat gelap pengurus PKI di rumahnya. Tak disangka-sangka, Santun memergoki mereka. Pistol menyalak. Tiga orang telik sandi itu terkapar tak bernyawa.

Dengan cepat, berita pembunuhan itu menyebar. Malam itu juga tentara menyerbu Desa Tegalbadeng. "Orang-orang berlarian seperti ayam dikejar-kejar. Suara tembakan terdengar sepanjang hari," kata Dewa Ketut Denda, warga Tegalbadeng, yang kini berusia 78 tahun, ketika *Tempo* datang ke desa itu dua pekan lalu. Tak jelas berapa orang PKI yang dibunuh hari itu, tapi insiden ini membuat massa PNI memutuskan menyerang.

"ORANG-ORANG BERLARIAN SEPERTI AYAM DIKEJAR-KEJAR. SUARA TEMBAKAN TERDENGAR SEPANJANG HARI."

"Semua ketua PNI desa diminta mengumpulkan laki-laki yang jago berkelahi untuk jadi anggota pasukan inti," kata Ketut Denda. Pasukan ini dikenal dengan sebutan "Tameng Marhaenis". Di desanya, 30 lebih orang bergabung. Dia juga diminta ikut, tapi menolak karena takut.

Sejak itulah, kata Ketut Dewa, truk-truk mulai datang ke desa-desa, mengambil anggota serta simpatisan PKI, dan membawa mereka pergi. Di depan, para anggota Tameng membuka jalan. Sebagai warga setempat, mereka tahu betul siapa yang ada di kubu merah. Setiap hari, ribuan orang diangkut. Ada yang dikumpulkan di kuburan desa, ada yang dibawa ke Pantai Baluk Rening, tak jauh dari kampung. Di sana, pembunuhan berlangsung.

Ida Bagus Raka punya kisah serupa. Di desanya di Tegalcangkring, dia didaulat menjadi Ketua Front Pancasila. Tugasnya menyeleksi siapa yang harus dibunuh dan siapa yang boleh hidup. "Di daftar saya, ada 432 nama anggota PKI. Hanya 15 orang yang saya serahkan ke tentara," ujarnya pelan.

Sepanjang Desember, Jembrana mencekam. Adik Gubernur, Anak Agung Bagus Denia, dijemput di rumahnya di Puri Negara. "Dalam keadaan hidup, dia diseret dengan truk yang diikuti sebuah jip tentara," kata Bagus Raka, yang melihat sendiri peristiwa itu. Kemudian mayat Denia diarak dan seluruh kompleks Puri Negara dibakar habis.

Pembantaian terjadi merata di semua kota di Bali. Di Gianyar, *Tempo* menemui seorang pria–sebut saja namanya Wayan–bekas kepala desa yang ikut mengganyang PKI pada 1965. Rapat-rapat untuk menciduk dan menghabisi simpatisan komunis di Gianyar digelar di kantor-kantor kecamatan. "Waktu itu, ada instruksi dari Panglima Komandan Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban di Bali untuk membersihkan PKI sampai akar-akarnya," ujarnya.

Sesuai dengan keputusan rapat di kecamatan, sebagai kepala desa, Wayan merekrut 30 pria untuk menjadi anggota Tameng. Mereka bertugas mengambil 40 anggota PKI di desa mereka sendiri. Penjemputan dilakukan dinihari. "Setelah semua lengkap, kami bawa mereka ke Pantai Saba di Blahbatu, Gianyar, dengan truk," katanya. Sepanjang subuh itu, polisi dan tentara ikut mengawal penjemputan.

Di pantai, tawanan PKI dibagi berdasarkan asal desanya. Sambil menunggu, mereka diminta berjongkok di pasir. Lalu para anggota Tameng diminta bertukar posisi, agar mereka tidak membantai tetangga atau saudara sendiri. Setelah itu, dengan kelewang dan golok seadanya, ratusan–mungkin ribuan–kader PKI tersebut dipenggal. ●

I KETUT MANTRAM: ADA DAFTAR DARI KODIM

UMUR saya sekarang 72 tahun. Saya ingat, saat di Jakarta terjadi Gestok atau Gerakan Satu Oktober 1965, di Bali saya menjabat Sekretaris Partai Nasional Indonesia (PNI) Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Peristiwa penculikan jenderal di Jakarta membuat panas wilayah Jembrana, termasuk Desa Baluk, tempat tinggal saya. Sebetulnya telah lama hubungan antara PNI dan Partai Komunis Indonesia negatif.

Saya ingat ada kejadian berdarah di Desa Tegal Badeng, Jembrana. Saya mendengar seorang tentara tewas terbunuh setelah mengintai rapat gelap orang-orang PKI di sebuah rumah dekat pura di Tegal Badeng. Seorang polisi yang membekingi rapat itu memuntahkan peluru.

Insiden itu menyebar ke seluruh Jembrana. Kodim memutuskan menumpas semua anggota PKI di Kabupaten Jembrana. Di Desa Baluk kebetulan dibangun pos komando tepat di tanah yang sekarang berdiri Balai Desa Baluk. Pemimpinnya Ketua PNI saat itu. Sesuai dengan perintah kodim, PNI kemudian membentuk satu peleton pasukan inti, 37 orang, termasuk saya.

Pasukan inti itu disebut Tameng, yang dibentuk di setiap desa di seluruh Jembrana. Kelompok kami dinamakan pasukan Rantai, berani mati membela partai. Tameng dibekali pedang, mengenakan baju dan celana serba hitam, serta memakai baret merah. Tugas kami menjemput dan mengeksekusi orang-orang PKI menurut daftar nama yang diberikan kodim.

Kami dilatih ketangkasan untuk berjaga-jaga bila ada perlawanan dari orang yang akan kami tangkap. Ada orang PKI yang memiliki ilmu kebal. Regu saya pernah membasmi PKI di Desa Brambang, Jembrana. Di sana ada orang PKI yang tak mempan peluru. Untungnya dia langsung mati setelah kepalanya putus ditebas pedang.

Setiap hari, selama kurang-lebih tiga bulan, kami harus tinggal di pos menunggu perintah dari kodim. Waktu itu suasana sangat mencekam. Siang hari tidak ada penduduk yang berani berkeliaran. Kalau malam, orang tak ada yang menyalakan lampu.

Saya ingat, awalnya kami mendapat "setoran" 90 orang PKI. Sebagian besar dari Desa Tegal Badeng. Malam itu juga mereka kami eksekusi dengan cara ditebas lehernya atau ditusuk dadanya dengan kelewang atau pedang. Saya, yang sebelumnya tak pernah membunuh orang, awalnya merasa takut, tapi terpaksa saya lakukan. Mayat mereka kemudian diangkut dengan truk dan dikubur di lubang-lubang yang sudah disiapkan di pinggir Pantai Baluk Rening.

Wilayah kerja kami terentang dari Yehembang sampai Gilimanuk. Pos komando menjadi salah satu tempat eksekusi. Tapi kadang-kadang kami langsung membawa mereka hidup-hidup ke Pantai Baluk Rening. Di sana, mereka diminta berjajar menghadap pantai, lalu langsung kami tebas dari belakang.

Selain di Pantai Baluk Rening, kami menyediakan lubang-lubang untuk mengubur mayat orang-orang PKI, yang biasa kami sebut lubang-lubang buaya, di Pantai Cupel dan Pantai Candi Kusuma di wilayah Kecamatan Malaya. Kawasan pantai jadi pilihan karena lebih gampang digali. Satu lubang isinya bisa 20 mayat, tergantung berapa orang PKI yang dihabisi saat itu.

Walaupun dari pusat kami diminta menghabisi orang-orang PKI sampai ke akar-akarnya, saya dan teman-teman tetap pilih-pilih. Hanya orang yang betul-betul terlibat yang kami habisi. Berbekal surat perintah dari kodim, saya dan teman-teman satu regu diangkut menggunakan bus–ini juga rampasan dari PKI–ke desa yang menjadi target. Kami ditemani tentara dan seorang pengawal dari desa itu yang menunjukkan rumah orang-orang PKI yang akan dijemput tersebut. Untuk wilayah perkampungan yang jauh dari lubang-lubang buaya, mayat mereka kadang langsung kami cemplungkan ke sumur.

Selama bekerja, kami lebih banyak dikomando tentara dari kodim. Tapi pernah juga datang orang-orang dari RPKAD. Mereka melintasi pos melihat-lihat situasi, menggunakan kendaraan semacam jip. Jumlahnya tidak banyak, hanya beberapa. Tapi mereka ganteng-ganteng, memakai seragam loreng kuning dan berbaret merah dengan senjata berpelitur serba kuning. RPKAD datang ketika keadaan agak aman.

Setelah tiga bulan, turun perintah untuk menghentikan kegiatan. Kami diminta kembali ke rumah. Kalau mengingat bagaimana jerih payah kami waktu itu, rasanya seperti tulisan dengan pensil yang gampang terhapus. Tak ada upah, tak ada yang mengucapkan terima kasih. Selesai, lalu disuruh pulang. Tapi, sudahlah, yang penting saya sudah ikut mengamankan negara. ●

Lokasi pembantaian **Kampung Garam.**

KOMANDO OPERASI TUHAN ALLAH DI MAUMERE

JIKA ADA SATU TAHANAN LOLOS, DUA ALGOJO YANG DIANGGAP LALAI MENJADI KORBAN PENGGANTI.

PENGGALAN adegan ini tak pernah hilang dari ingatan Bapa Peter, 75 tahun, bukan nama sebenarnya. Di suatu malam yang gulita, ada mobil meraung-raung memasuki area Pantai Wairita, sekitar 15 kilometer dari Kota Maumere, ibu kota Kabupaten Sikka. Orang-orang dengan tangan dan kaki terikat diseret ke luar mobil menuju tiga lubang berukuran 2 x 2,5 meter. Di tepi lubang, para algojo siap sedia dengan parang panjang di tangan.

"Saya tak berdaya menyelamatkan mereka. Nyawa saya pun terancam. Saya tak mengenal siapa pun saat itu. Suasana amat gelap," ujar Peter, yang mengaku dibawa tentara ke Wairita untuk menggali lubang bagi para korban. Pekan lalu, pria kelahiran Lembata, Flores, yang masih tampak perkasa ini mengisahkan kembali tragedi itu kepada *Tempo*, yang menemuinya di Maumere.

Saat itu Peter bekerja sebagai juru tulis di koperasi pelabuhan. Usianya 27 tahun. Pagi sebelum pembantaian, dia dan teman-temannya dikumpulkan di Warung Tanta Ia, dekat pelabuhan. Mereka ditanyai apakah mau bertugas membunuh orang Partai Komunis Indonesia, atau dikenai tuduhan sebagai anggota PKI. "Setelah makan, kami berjalan berdua-dua ke berbagai arah. Lalu satu truk mengangkut kami ke Pantai Wairita," katanya.

Setelah pembunuhan, tentara memerintahkan mereka menimbun lubang-lubang itu dengan tanah dan dedaunan. Pekerjaan itu tuntas pada pukul 05.00 Wita. Pihak komando distrik militer setempat melarang mereka menceritakan peristiwa itu kepada siapa pun.

Tapi yang paling dia ingat adalah ketika ikut memarang 10 orang tertuduh anggota PKI di Kampung Garam, Kecamatan Maumere, pada 1966. Kini kampung itu masuk wilayah Kecamatan Alok Barat. Penduduk di sana rata-rata bekerja sebagai tukang masak garam. Bila air laut pasang, rumah-rumah mereka tergenang.

Ada area seluas 400 meter persegi di daerah itu yang diyakini penduduk Sikka sebagai salah satu kuburan massal terbesar korban pembantaian 1966. Konon, jumlah yang dikubur di sana hampir 100 orang, berasal dari Desa Bola dan Desa Baubatun, Kecamatan Kewapante. Menurut warga setempat, ada tiga lubang sedalam 3 meter dan lebar 25 meter untuk menguburkan korban pembunuhan.

Kini tempat itu cuma berupa gundukan tanah ditumbuhi kelapa dan rumput liar. Warga setempat bercerita, bila malam tiba, mereka sering mendengar bunyi-bunyian tak jelas, seperti suara orang sedang bernyanyi.

Peter tak mengenal orang-orang yang dia bunuh. Menurut dia, orang-orang itu ditangkap begitu saja karena nama mereka ada dalam daftar yang dipegang Tentara Nasional Indonesia. Asal daftar itu pun misteri. "Saya kadang dihantui rasa bersalah. Setiap tahun saya meminta misa untuk keselamatan orang-orang ini. Saya yakin Tuhan telah menerima para korban ini di surga," katanya pelan.

Dia lupa hari, tanggal, dan bulan hal itu terjadi. Yang pasti, saat itu jagung-jagung telah berbulir dan berisi. Korban dijejerkan dengan tangan dan kaki terikat. Leher mereka persis di tengah lubang. Tidak ada keributan malam itu. Cuma bunyi parang memutus leher para korban, lalu gedebuk potongan tubuh tumbang ke lubang.

•••

PATER Hubertus Thomas Hasulie SVD, peneliti pada Pusat Penelitian Agama dan Kebudayaan Candraditya, Maumere, pernah meneliti pembantaian di Sikka, salah satu kabupaten di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Hubert—begitu dia disapa—memulainya pada tahun 2000. Menurut dia, pembunuhan mulai terjadi pada Maret 1966. Tapi para korban telah ditahan tanpa

proses pengadilan sejak Desember 1965.

Di Sikka, kekejaman negara yang direpresentasi oleh TNI, menurut Pater Hubert, membenturkan relasi antarwarga dengan berbagai latar belakang: partai politik, agama, suku, dan budaya. Lubang-lubang, misalnya, selalu diberi nama Partai Katolik, Parkindo, dan Nahdlatul Ulama. "Pembantaian korban pun selalu disaksikan utusan partai-partai itu," katanya.

Untuk memperkuat teror, pembantaian sengaja dilakukan di setiap kecamatan. Bila di satu kecamatan itu tak ditemukan anggota PKI, korban didatangkan dari wilayah lain dan dibunuh di sana. Di seluruh Kabupaten Sikka terdapat setidaknya 30 lubang pembantaian, tersebar dari Kecamatan Talibura, Waigete, Kewa, Bola, Alok, Maumere, Nita, Lela, Lekebai, hingga Paga.

Romo Frederikus da Lopez Pr, atau yang dikenal dengan Romo Pede.

Pater Hubert Thomas (bawah).

Menjelang pembantaian, aparat TNI biasanya menjemput wakil Partai Katolik, Parkindo, dan NU serta wakil pemuda Katolik, Protestan, dan Islam untuk menjadi saksi. Algojo-algojo pun diambil mewakili kelompok-kelompok masyarakat itu. Mereka disuruh membantai, seraya aparat TNI dan polisi menjaga serta mengawasi proses pembantaian dengan senjata di tangan. Jika ada satu tahanan lolos, dua algojo yang dianggap lalai dijadikan korban pengganti.

Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban—dulu dikenal luas dengan istilah Komop—merekrut cukup banyak algojo ketika itu. Hubert dalam penelitiannya mewawancarai lima algojo, salah satunya tentara. Setiap orang mengaku membunuh 10-20 orang. Jumlah korban di seluruh Kabupaten Sikka, menurut daftar riset dia, sebanyak 1.000-1.500 jiwa.

Umumnya para algojo dipaksa membunuh di bawah ancaman. Indoktrinasinya adalah orang PKI itu jahat, tak kenal Tuhan. Kalau tidak dibunuh, mereka akan membunuh. "Bahkan, untuk Sikka, indoktrinasi lebih intens: kalau orang-orang PKI ini tak dibunuh, mereka pertama-tama akan membunuh pastor alias romo, suster, bruder, frater," ujar Hubert kepada *Tempo*.

Tak ada yang bisa menghentikan pembantaian. Sebagai institusi, Gereja Katolik di Sikka pun tak mampu berbuat banyak. Cuma ada beberapa pastor yang berani mendatangi para korban untuk mendengarkan pengakuan dosa mereka sebelum dibunuh. Pastor-pastor itu di antaranya Clemens Parera SVD dan Frans Cornelissen SVD.

Romo Frederikus da Lopez Pr, dikenal sebagai Romo Pede, yang waktu itu Pastor Pembantu Paroki Bola—sekitar 20 kilometer dari Kota Maumere—mencoba membela umatnya yang ditangkap secara serampangan. Hasilnya? Dia diancam tentara.

Ditemui di Seminari Ritapiret, Nita, Kabupaten Sikka, Romo Pede, 75 tahun, masih terang mengingat peristiwa 46 tahun lalu tersebut. Ketika itu, sore 6 Maret 1966, satu rombongan Komando Operasi dari Maumere tiba di Bola. Mereka menjemput orang yang telah dikumpulkan di gedung koperasi di desa itu.

Mendengar kabar itu, Romo Pede segera mendatangi gedung koperasi. Dia menemui komandan jaga. "Saya tanya, kenapa orang-orang ini ditangkap. Kalau mereka benar anggota PKI, berarti mereka hanya PKI kelas kambing," katanya.

Sebelumnya, dua guru, yakni Jonas dan Donatus, bercerita bahwa mereka berhasil membebaskan warga dari Kampung Moribelang yang ditahan dengan alasan para tahanan itu telah terdaftar sebagai anggota Partai Katolik. Maka Romo Pede berkata kepada si aparat: "Mereka harus diperiksa, apakah mereka juga terdaftar di Partai Katolik." Tapi permintaan itu ditolak. Romo Pede ditawari untuk ikut saja ke Maumere.

Mereka tiba di Markas Komando Operasi Maumere sekitar tengah malam. Romo Pede disuruh menghadap Mayor Soemarmo, komandan operasi saat itu. Soemarmo bertanya, siapa saja yang akan dibebaskan. Romo Pede menjawab, semuanya. Permintaan itu ditolak. Belakangan diketahui, orang-orang itu dieksekusi di Kampung Garam.

Menyusul "perlawanan" itu, semua surat yang keluar dari seminari diperiksa aparat. Tentara khawatir kisah pembantaian PKI di Kabupaten Sikka disiarkan ke luar. Pada 15 Maret 1966, Komandan Operasi Kodim 1607 Mayor Infanteri Soemarmo mengirim surat peringatan kepada Deken—semacam pastor wakil uskup—Maumere.

Perihal surat itu: campur tangan kaum rohaniwan dalam urusan Komop Nomor B.061/III/1966. "Setiap campur tangan dan sumbangan negatif terhadap usaha-usaha Komop Kabupaten Sikka dan Flores Timur identik dengan perbuatan melindungi Gestapu-PKI beserta antek-anteknya," tulis Soemarmo. Para rohaniwan diperingatkan untuk tidak mencampuri urusan Komop. Deken Maumere pun diminta segera memindahkan Pater Pede dari Paroki Bola, "Sebelum Komop mengambil tindakan mendahuluinya."

Atas persetujuan Uskup Ende, Mgr Gabriel Manek SVD, Romo Pede akhirnya dipindahkan ke Ndona, Kabupaten Ende. Kata Romo Pede saat diwawancarai *Tempo*: "Di Ende, saya melapor kepada Uskup. Di Maumere, Komando Operasi sudah jadi Tuhan Allah." ●

BAPA TENGKORAK:

KELUARGA PUN HARUS DIBUNUH

PULUHAN tahun lalu saya bekerja sebagai buruh di Pelabuhan Maumere–kini Pelabuhan Lorens Say. Pada 18 Maret 1963, saya dimasukkan penjara karena membunuh paman. Saya kesal karena dia tak mau membagi uang hasil penjualan ikan. Saya tebas dia dengan kelewang saat kami berdua di warung.

Untuk pembunuhan itu, saya dihukum penjara 12 tahun. Tapi, baru tiga tahun saya di bui, suatu hari Kodim 1603, yang dikomandani Gatot Suherman, berkirim surat kepada kepala penjara. Mereka mau merekrut saya dan sembilan tahanan lain untuk menjadi algojo–dan saya diangkat jadi komandan.

Setelah direkrut, kami dibawa ke Kodim Maumere, dan diberi tahu bahwa ada tugas membela negara. Kami disuruh kejar anggota Partai Komunis Indonesia sampai habis. Kami juga diminta bersumpah melakukan itu. Lalu kami disuruh pulang ke rumah masing-masing, tapi harus siap jika sewaktu-waktu dipanggil menjalankan tugas. Pemanggilan dilakukan melalui Radio Pemerintah Daerah saat itu.

Pada Februari 1966, kami mendapat panggilan berkumpul di Kodim. Kami dibekali tiga sekop, tiga cangkul, dan empat tanduk rusa. Setiap algojo mendapat satu parang. Setelah itu, kami diangkut ke lokasi pembantaian yang ditentukan Komandan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Komop). Di sana, kami disuruh menggali lubang sedalam tiga meter, lebarnya lima meter.

Mula-mula bertugas di Desa Wairita. Di sana kami menggali tiga lubang untuk menguburkan 45 orang yang diduga terlibat PKI. Eksekusi terjadi tengah malam, atas perintah Komandan Komop. Kami tak bisa menolak karena ini tugas negara. Harus dilaksanakan, walaupun orang yang kami potong kepalanya adalah keluarga sendiri.

Malam itu para terduga anggota PKI diturunkan dari mobil Komop dengan tangan dan kaki terikat ke belakang. Mata mereka tak ditutup. Mereka dibawa ke dekat lubang, kemudian kami tebas kepala mereka dengan kelewang. Darah muncrat membasahi tubuh dan wajah saya.

Setiap orang yang ditebas langsung kami buang ke lubang yang telah disiapkan. Aparat kepolisian dan TNI bersenjata mengawal dengan ketat. Setelah semuanya masuk ke lubang, kami diminta menutupnya dengan tanah. Sebagai penanda, di atasnya kami tanam batang pohon reo, atau dahan kedondong.

Saya tidak tahu orang-orang yang kami bunuh datang dari mana. Banyak juga yang saya kenal. Bahkan saya harus membunuh dua anggota keluarga saya sendiri.

Aksi pembantaian berlanjut sampai ke Desa Waidoko, Kebun Misi (belakang kantor Bupati Sikka saat ini), Watulemang, Koting, Nita, Pauparangbeda, Rane, Detung, Higetegera, Baungparat, dan Pigang. Ratusan orang dibunuh. Saya tahu jumlah korban karena, setiap kali ada eksekusi korban, selalu dicatat oleh Komandan Komop Mayor Soemarmo.

Pembantaian berlangsung empat bulan hingga Mei 1966. Setelah itu, kami bersepuluh dibayar Rp 150 ribu per algojo dan diberi beras lima karung ukuran 50 kilogram. Karena sudah menjalankan tugas negara selama berbulan-bulan, saya tak lagi dikembalikan ke penjara, tapi langsung dibebaskan. Saya tak akan lupa Komandan Kodim Gatot Suherman dan Mayor Soemarmo, yang perintahkan kami mengeksekusi anggota PKI.

Saya sekarang tinggal berdua dengan istri, dan menjadi penggali kubur. Orang-orang kampung memanggil saya Bapa Tengkorak. Saya bersyukur bisa hidup damai dengan keluarga korban, termasuk mereka yang keluarganya telah saya bunuh. Mereka tahu apa yang kami lakukan dulu karena paksaan tentara. •

KARENA WIBAWA SANG JENDERAL

TAK ADA PEMBUNUHAN MASSAL DI JAWA BARAT. RPKAD TAK MERANGSEK KE SANA.

Ibrahim Adjie (kanan).

PERINTAH itu datang dari Mayor Jenderal Ibrahim Adjie. Kepada Benedict Anderson, Indonesianis dari Universitas Cornell, Amerika Serikat, Panglima Komando Daerah Militer VI Siliwangi itu menegaskan, "Saya sudah kasih perintah kepada semua kesatuan di bawah saya, orang-orang ini ditangkap diamankan, tapi jangan sampai ada *macem-macem*." Ibrahim dan Anderson bertemu pada 1968.

Kepada A. Umar Said, mantan Pemimpin Redaksi *Ekonomi Nasional*—surat kabar yang dilarang terbit bersama *Harian Rakyat*, *Bintang Timur*, dan *Suluh Indonesia* pasca-G-30-S—Anderson menyampaikan cerita Ibrahim itu. Dari wawancara pada September 1996 itu, Umar memuat cerita Anderson di blog pribadinya. Umar wafat pada 7 Oktober 2011 di Paris, tempatnya bermukim sejak Oktober 1965 sebagai eksil.

Pembunuhan di Jawa Barat bukan tak terjadi. Di Indramayu, misalnya, ada orang yang dituding anggota PKI jadi korban. Tapi kejadian tak meluas. Perintah Ibrahim tampaknya diikuti tentara sampai level paling bawah. "Saya tidak ingin ada pembantaian di Jawa Barat, karena merasa bagaimanapun sebagian besar adalah orang kecil. Akan mengerikan kalau mereka dibunuh," katanya.

Sikap Ibrahim Adjie tak lepas dari sikap setianya kepada Sukarno. Pada 1 Oktober, presiden pertama itu mengeluarkan perintah agar semua pihak menghentikan aksi agar suasana tak runyam. Pada hari yang sama, Sukarno mengirimi Ibrahim sepucuk surat yang isinya meminta Ibrahim datang ke Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma jika keselamatan Presiden terancam.

Sehari kemudian, Pimpinan Sementara Angkatan Darat Mayor Jenderal Soeharto melapor kepada Sukarno bahwa situasi dapat dikuasai. Dalam surat yang ditulis tangan pada 2 Oktober 1965, Soeharto menyatakan berhasil mencegah pertumpahan darah. "*Nyuwun dawuh lan nyadong deduko*—bila saya bertindak lancang," ujar Soeharto menutup suratnya.

Belakangan terbukti Soeharto berbohong. Pembantaian ribuan anggota PKI dan simpatisannya terjadi di berbagai tempat, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sejumlah peneliti, seperti Robert Cribb dari Universitas Nasional Australia, juga Benedict Anderson, menyatakan tindakan brutal itu terjadi di daerah-daerah yang didatangi satuan elite militer Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD).

"Dalam banyak kasus, pembunuhan dimulai setelah kedatangan kesatuan elite militer, yang lalu memerintahkan dan memberi contoh tindakan kekerasan," kata Cribb dalam buku *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*. Jawa Barat beruntung: RPKAD tak merangsek di sana. Alhasil, kata Anderson, "Di Jawa Barat tak terjadi pembantaian." ●

PEMBUNUHAN MASSAL 1965-1966:

VENDETTA DAN JINGOISME

DUA peristiwa sosial-politik dan ekonomi terbesar dalam sejarah Indonesia modern terjadi pada 1965 dan 1998. Pada yang pertama, historiografi telah mengalami perubahan dalam tiga tahap, yaitu pra-1971, sepanjang masa *consolidated* Orde Baru (1971-1998), dan pasca-1998. Pada yang kedua, historiografi bahkan masih *in the making*, seiring dengan pertarungan wacana politik yang sekarang sedang dan masih berlangsung. Tafsir-tafsir yang belum, dan barangkali tak akan pernah, selesai.

Pada pra-1971, kekuasaan Orde Baru (baca: Soeharto) belum terkonsolidasi, sehingga masih mudah ditemukan bahan-bahan teks tanpa sensor. Bahkan risalah Mahkamah Militer Luar Biasa diterbitkan tanpa sensor. Namun, demi konsolidasi kekuasaan Orde Baru, seluruh sumber bahan G-30-S "menghilang" karena disimpan oleh Kopkamtib. Sejak saat itu, historiografi hanya diisi oleh *discourse* tunggal, yaitu PKI adalah pelaku tunggal kejahatan terhadap negara. Karena itu, penyebutan peristiwa G-30-S pun memerlukan *suffix* PKI, menjadi G-30-S/PKI.

Discourse tunggal itu pun hanya atas peristiwa politik di tingkat nasional. Sama sekali tidak ada studi apa pun mengenai gejolak sosial-politik yang menewaskan korban yang sangat banyak, dengan angka bervariasi antara 78 ribu dan 1,5 juta orang. Akibatnya, dalam historiografi Indonesia modern, periode 1965-1966 merupakan tahun-tahun yang hilang dan terlupakan. Kemudian Reformasi 1998 telah membuka ruang penafsiran dalam historiografi 1965 menjadi sangat terbuka. Kini banyak penulisan G-30-S tanpa *suffix* PKI lagi.

Dalam hal substansi, kedua aras tafsir sejarah pun mengalami "revisi". Pada aras peristiwa nasional, gejolak G-30-S memperkuat tafsir-tafsir yang sebelumnya kalah oleh *discourse* tunggal tentang PKI sebagai pelaku utama percobaan kudeta G-30-S. Satu tafsir percaya bahwa G-30-S merupakan pergulatan internal militer, mengikuti mazhab Cornell White Paper. Lalu ada tafsir bahwa dalangnya tak lain adalah Bung Karno sendiri. Tafsir lain lagi menyebutkan Soeharto adalah dalang G-30-S. Dan, tentu saja, tafsir bahwa semua itu ulah CIA.

Namun kekosongan historiografi atas aras massa, yaitu pembunuhan massal, terutama di Jawa, Bali, dan sebagian Sumatera, tetap belum sepenuhnya terisi. Beberapa peneliti aras bawah ini memang mulai menguak sebagian tabir pentas horor itu, tapi masih tetap banyak tabir berikutnya yang belum tersentuh. Dengan mengesampingan faktor politik, salah satunya adalah penjelasan kultural atas jalinan relasi sosial yang penuh kekerasan. Tetangga saling bunuh, kenalan saling terkam, dan kerabat saling curiga.

Pendekatan ini penting, mengingat karakter kekerasan tersebut melekat hampir di semua komunitas di semua wilayah di Indonesia, bahkan hingga sekarang. Bagaimana menjelaskan berbagai konflik komunal, tawuran, konflik berbasis ekonomi-politik, kultural, keagamaan, dan seterusnya, pada masa sekarang, jika kita tidak pernah memahami pembunuhan massal 1965-1966? Sebagai analogi, masyarakat Barat selama berabad-abad berusaha memaknai konsep "*amok*" dari dunia Melayu, hanya untuk menjelaskan fenomena orang "mengamuk" tanpa alasan, yang tidak tersedia dalam kosakata kultural mereka.

Salah satu penjelasan kultural itu dapat didekati dari konsep Jingoisme dan *vendetta*. "Jingoisme" muncul sebagai wacana publik pada 1970-an. Istilah ini berasal dari judul film koboi populer pada masa itu, *Django*. Tentu saja, sang tokoh protagonis adalah pemenang dalam duel-duel koboi di kawasan *frontier* Amerika–terutama Arizona dan New Mexico–yang masih merupakan *terra incognita*, tanah baru yang tak bertuan dan belum terkenali. Di kawasan seperti itu, "hukum" ditentukan oleh senjata dan kekuasaan fisik, dan relasi-relasi sosial dibangun bersifat *macho*.

Dalam bahasa "Pengantar Sosiologi", situasi Jingoisme adalah *anomie*, yaitu norma dan nilai-nilai lama telah runtuh, sementara norma dan nilai-nilai yang baru belum terbentuk. Maka, siapa pun yang memiliki *mighty power*, kekuatan fisik, akan mampu membangun kekuasaan (sosial) atas orang atau pihak lain, karena per definisi, kekuatan fisik memang salah satu sumber kekuasaan sosial-politik. Konsekuensinya, Jingoisme yang hadir di suatu komunitas juga membuka ruang bagi ekspresi kebencian dan dendam melalui tindak kekerasan.

> SEKADAR CAP "PKI LU" SUDAH DAPAT MENJADI SALURAN KEBENCIAN YANG TELAH TERTANAM SEBELUMNYA. MEMBUNUH LAWAN POLITIK MERUPAKAN *VENDETTA*, SUATU KONSEP BALAS DENDAM YANG BERSIFAT *MACHO*, DI BAWAH KONTEKS JINGOISME.

HERMAWAN SULISTYO, SEJARAWAN, PROFESOR RISET LIPI, PENULIS BUKU *PALU ARIT DI LADANG TEBU*
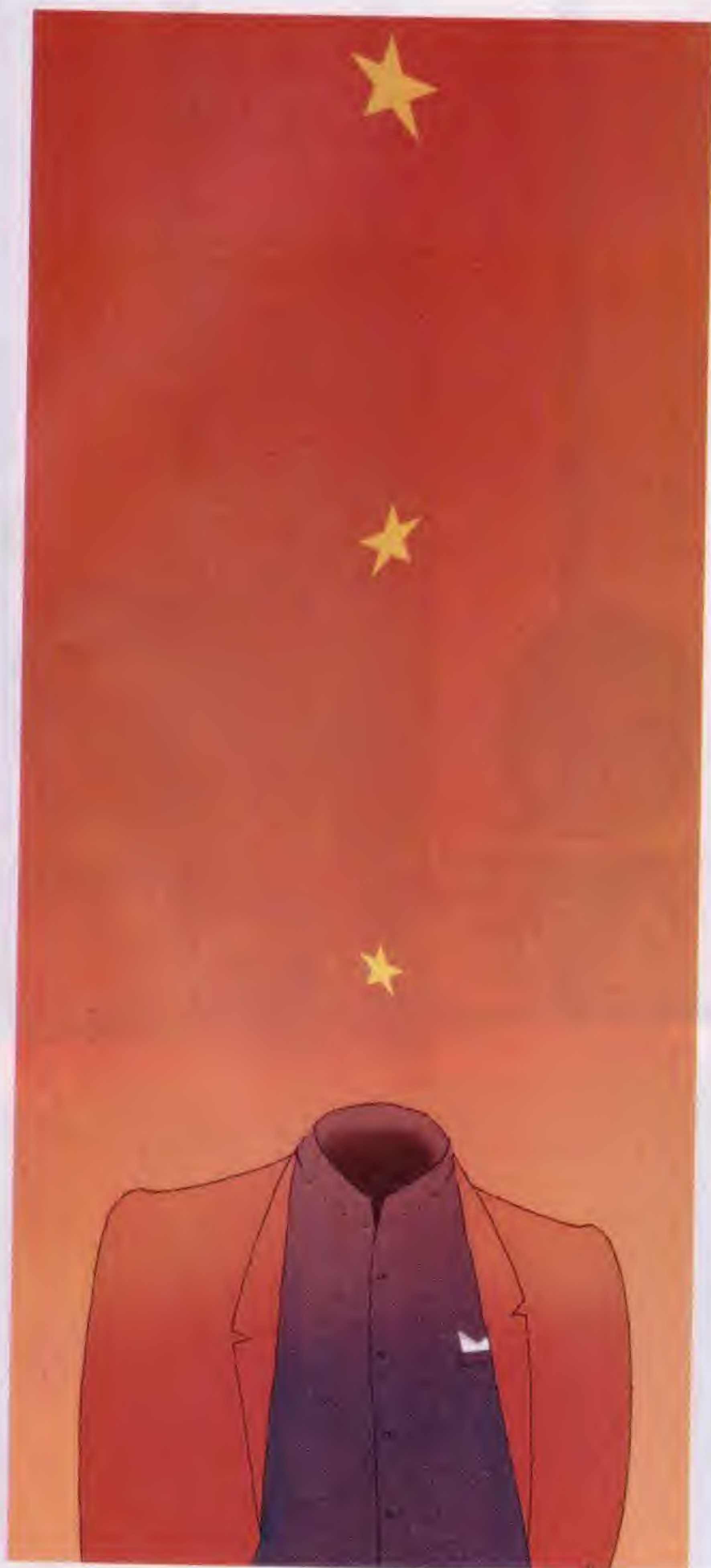
Pembunuhan massal 1965-1966 pun tidak terlepas dari konteks kehadiran Jingoisme. Penelusuran atas seluruh media massa sejak pemilu sela 1957–bahkan sebelumnya, pemilu 1955–menunjukkan karakter dari konstruk relasi sosial seperti itu. Di daerah-daerah yang pada pasca-1965 mengalami pertarungan massal yang fatal dan mematikan, hampir tidak ada minggu yang terlewatkan tanpa perkelahian, perorangan maupun kolektif. Ideologi politik lalu sekadar menjadi *backdrop* kekerasan massal. Jargon-jargon politik yang konfrontatif di tingkat nasional diterjemahkan sebagai pembenar untuk membunuh lawan perkelahian dari masa-masa sebelumnya.

Sekadar cap "PKI lu" sudah dapat menjadi saluran kebencian yang telah tertanam sebelumnya. Membunuh lawan politik merupakan *vendetta*. Suatu konsep balas dendam yang bersifat *macho*, di bawah konteks Jingoisme, yang populer sejak masa awal perilaku para mafioso di Sisilia. Gejalanya terlihat dari, antara lain, *local parlance*, "pilihannya adalah membunuh atau dibunuh". *Vendetta* dalam Jingoisme ini dilakukan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil (*vigilante*) yang mengejar lawan hingga ke rumah-rumah mereka. Membawa pulang sepotong kuping, atau seutas jari korban, menjadi semacam token atas *mighty power* dalam Jingoisme.

Mereka yang hidup pada ujung 1950-an hingga awal 1970-an pasti mengalami situasi betapa sangat mudah mencap seseorang sebagai PKI dan melakukan *vendetta* pribadi ataupun kelompok atas orang atau pihak lain itu. Dalam ruang dan waktu yang lain, pelaku "semacam preman", minus *backdrop* ideologi dan kelompok politik. Aspek kultural semacam ini akan memperkaya tafsir atas pembunuhan massal 1965-1966. Juga akan bermanfaat untuk mengenali konteks berbagai konflik massal pasca-1998.

Tapi anakronisme sejarah adalah menilai masa lampau dengan standar norma dan nilai-nilai masa kini. Maka pemahaman atas sejarah kelam Indonesia pada 1965-1966 hanya dapat dilakukan melalui pembacaan konteks pada masa itu. Suatu pembacaan yang memerlukan potret longitudinal atas proses-proses yang terjadi, bukan potret semasa (kontemporer). Dalam paralelisme, begitu pula tafsir atas rangkaian tindak kekerasan massal yang marak sejak 1998, hingga hari ini.

Akhirnya, sejarah adalah tafsir logis atas serangkaian peristiwa pada masa lampau yang disusun secara kronologis dalam hubungan sebab-akibat. Karena bersifat tafsir, tidak ada "sejarah yang bengkok" dan tidak ada pula "sejarah yang lurus". Jadi, merupakan kesia-siaan saja untuk "meluruskan sejarah". Bangsa ini tidak akan pernah belajar jika berupaya "meluruskan sejarah", karena sejarah hanyalah tafsir dominan atas serangkaian peristiwa oleh pemenang dalam pertarungan politik. Karena itu, biarkan sejarah 1965–dan sejarah kemudiannya–tetap bengkak-bengkok. •

TAK HANYA DI PULAU BURU

Tahanan yang diduga anggota Partai Komunis Indonesia ditangkap oleh tentara di penjara Tangerang, 1966.

DOK: KOLEKSI PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

Setelah tragedi politik 1965, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) menggelar Operasi Kalong dan Operasi Trisula. Mereka menangkap, menahan, dan menginterogasi orang-orang yang dituduh PKI di berbagai tempat. Selanjutnya, tanpa proses pengadilan, orang-orang itu dibuang ke kamp penahanan. Tak hanya di Pulau Buru, mereka menjalani hidup sebagai tahanan politik di sejumlah penjara, seperti di Gunung Sahari II (Jakarta), Pelantungan (Jawa Tengah), Jalan Gandhi (Medan), Pulau Kemaro (Palembang), dan Moncongloe (Sulawesi Selatan). Tempat-tempat itu adalah Guantanamo Indonesia. Di sana mereka mengalami berbagai bentuk penyiksaan, dari yang ringan hingga berat.

KISAH PILU DARI SARANG KALONG

BERBAGAI CARA DILAKUKAN APARAT UNTUK MENGOREK PENGAKUAN TAHANAN. MULAI AYAT KURSI SAMPAI PECUTAN BUNTUT PARI.

LELAKI setengah baya itu mewanti-wanti agar sejarah rumah tua di dekat kediamannya di Jalan Gunung Sahari II, Jakarta Pusat, tak usah diungkit. Kisah masa lalu itu dianggapnya ibarat mala. "Itu bahaya. Tak ada artinya untuk diingat," katanya sembari meminta identitasnya tak dikutip. Tetua warga ini malah balik menginterogasi *Tempo*, yang menemuinya Ahad siang dua pekan lalu. "Dari mana kamu tahu itu? Ini kasus sudah lama," ujarnya, menyelidik.

Rumah bernomor 8 itu merupakan bekas markas Tim Operasi Kalong, regu militer yang menangkap dan memeras pengakuan dari ratusan orang pasca-Gerakan 30 September 1965. "Saya masih berusia sekitar 10 tahun waktu itu." Begitu pembicaraan menukik soal siapa pemilik rumah besar tadi, ia lantas menggeleng.

Penjaga rumah pun menyatakan tak mengetahui siapa pemiliknya. Pria itu mengaku sebagai penjaga baru. "Yang punya rumah tak tinggal di sini. Ini menjadi tempat taruh barang si engkoh yang jualan di Senen," ujarnya. Dia melarang *Tempo* melewati pagar setinggi 2,5 meter yang dikelir hitam dengan gulungan kawat berduri di pucuknya.

Rumah itu kini lusuh tak terawat. Temboknya yang berwarna putih terlihat kusam. Halamannya tak dibersihkan. Dedaunan kering pohon kapuk dan petai cina menutupi sebagian pelataran yang disemen. Gundukan puing dan kardus bekas bungkus barang elektronik teronggok di teras yang "dijaga" dua pilar kotak kaku. Pada salah satu pilar tersemat stiker bertulisan "TNI AD".

"Kondisi rumah itu masih sama seperti dulu," kata Syaiful, sebut saja begitu, medio September lalu. Dia mantan tahanan politik yang pernah disiksa di tempat itu. Sebelum menjadi markas Operasi Kalong pada 1966, menurut Syaiful, rumah itu tadinya kantor persatuan tukang becak. Ketika itu, tembok depannya dipenuhi pajangan rambu lalu lintas untuk mengingatkan para pengayuh becak.

Syaiful ditangkap pada 1968, kemudian dijebloskan di Pulau Buru, dan baru dibebaskan pada 1979. Bekas jurnalis *Harian Rakyat* dan aktivis Lekra ini berusia 27 tahun ketika berurusan dengan Kalong. Menurut dia, penyiksaan sudah menjadi prosedur tetap Kalong. "Saya disetrum, lalu dipukuli," kata Syaiful.

Bekas "anak asuh" Kalong lainnya, Jawito, 62 tahun, dan Bedjo Untung, 64 tahun, menuturkan, setengah dari markas disulap menjadi aula, bagian administrasi, dan ruang interogasi. Sedangkan sisanya, sekitar 200 meter persegi di bagian belakang, untuk menampung tahanan.

Dua warga Pemalang, Jawa Tengah, ini "mencicip" Kalong sekitar setahun. Bedjo bekas aktivis Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia Pekalongan, sedangkan Juwito anggota Pemuda Rakyat, organisasi di bawah PKI. Kala itu jumlah tahanan sekitar 200 orang, yang tidur di selasar. Namun hanya ada dua kamar mandi, yang semuanya berlantai becek.

Berbagai cara dilakukan petugas Tim Kalong untuk menuai pengakuan agar bisa dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Sering kali pemeriksa mengadu tahanan dengan tahanan lain atau membuat tahanan menjadi kaki tangan. Pengakuan yang diincar biasanya mengenai jaringan dan orang-orang yang dikenal si terperiksa.

Penyiksaan menjadi cara yang paling lazim untuk mengorek keterangan, seperti menyetrum, memukul, menginjak dengan sepatu lars, dan memecut punggung tahanan dengan buntut ikan pari. "Sekali setrum sekitar lima menit. Rasanya minta ampun di pangkal lengan," ujar Juwito kepada *Tempo* di Jakarta, pertengahan September lalu.

Bekas tahanan politik Tan Swie Ling dalam buku *G30S 1965: Perang Dingin dan Kehancuran Nasionalisme* membeberkan sadisnya 80 kali cambukan buntut pari yang dialami sahabatnya. Pria yang ditangkap bersama Sekretaris Jenderal PKI Sudisman oleh Kalong ini juga mengungkap metode favorit lainnya, yaitu jurus "ayat kursi": jari-jari kaki digencet dengan kaki kursi yang diduduki petugas.

Syaiful menuturkan penyiksaan menjadi pilihan lantaran petugas buta soal para kader dan organisasi PKI. "Bisa dibayangkan, mereka harus memeriksa banyak sekali orang dengan persiapan dan pengetahuan yang minim," ujar mantan tahanan Pulau Buru itu. "Kantor saja tak punya, sampai mengambil kantor tukang becak."

Tim Operasi Kalong dibentuk oleh Ko-

Bekas markas Kalong di Jalan Gunung Sahari II Nomor 8 , Jakarta Pusat.

mando Daerah Militer V/Jaya pada 15 Agustus 1966. Tugasnya menangkap, menginterogasi, lalu mengklasifikasikan orang-orang berdasarkan beratnya tuduhan keterlibatan dengan PKI dan pembunuhan tujuh pahlawan revolusi pada 1965.

Operasi Kalong dipimpin duet Mayor Suroso-Kapten Rosadi. Salah seorang pemeriksanya bernama Kapten Syafei. Menurut Suroso, seperti dikutip *Kompas*, 15 Agustus 1966, tim itu dinamakan Kalong karena kalau siang orang-orangnya berada di kantor dan malam hari kelayapan seperti kelelawar.

Kendati bukan satu-satunya satuan tugas intel di Jakarta, Kalong sangat beken berkat kebengisannya. Tim itu juga paling banyak memeriksa orang. Ada lagi Satuan Tugas Intel Kebayoran Lama, yang dikomandani Cecep di bekas kantor Studio Film Infico; Satgas Intel Tanah Abang di bawah Mayor Endang Surawan, yang bermarkas di gedung eks kantor berita Cina, *Xinhua;* dan Satgas Intel Kramat 5 di bekas kampus Universitas Rakyat. "Sampai 1974, Kalong masih ada," katanya.

Dari semua komandan satgas, Cecep terkesan paling mumpuni. Syaiful menuturkan, dia bisa mengambil tahanan dari satgas mana pun untuk diperiksa di markasnya. Kebayoran Lama memang lebih berfokus mendalami keterlibatan tahanan yang dianggap gembong PKI. "Pangkat Cecep tak jelas. Kadang dia pakai pangkat kopral, kadang brigjen," ucapnya.

Penangkapan yang bisa berujung pada penyiksaan, bahkan kematian, orang yang dicurigai terlibat PKI dilakukan secara sistematis, serempak, dan masif. Pekerjaan itu dilakukan aparat negara, terutama militer, di semua level, baik pusat maupun daerah. Tak ada tentangan dari penyelenggara negara lainnya, seperti parlemen dan kekuasaan peradilan.

Pembersihan gelombang kedua setelah operasi pasca-30 September 1965 terjadi pada 1968. Kodam VIII/Brawijaya di Jawa Timur, misalnya, melancarkan operasi Trisula pada Juli 1968 untuk menyapu Blitar Selatan sebagai basis PKI. Dalam keterangan pers pada 9 Agustus tahun yang sama di Malang, Panglima Kodam Brawijaya Mayor Jenderal M. Jasin mengumumkan keberhasilan Trisula, yang bertulang punggung pasukan tempur dan intelijen.

Jasin mengungkapkan kepiawaiannya menginterogasi tokoh PKI daerah dengan teknik ancaman pembunuhan. "...akan saya tembak mati dengan penghormatan terakhir sebesar-besarnya dari saya terhadap sikapnya yang konsekuen membela ideologi partai," katanya seperti dikutip dalam buku *Operasi Trisula Brawidjaja Menghantjurkan PKI-Gaja Baru*.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono tak mau banyak bicara perihal operasi besar-besaran pasca-1965 itu, termasuk soal Kalong. Ia berdalih tak tahu persis keadaan kala itu sehingga harus mempelajari lebih dulu. Namun Agus berpendapat tak perlu membicarakan masa lalu agar tak memancing keresahan masyarakat. "Sudahlah, yang sudah berlalu sudahlah. Itu bagian dari sejarah kita," ucapnya di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Ahad dua pekan lalu "Mari kita melangkah ke depan dengan lebih baik."

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menunjuk peran Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), yang mengusut pelaku peristiwa Gerakan 30 September 1965. Komando itu dibentuk oleh Presiden Sukarno dengan panglima pertama Mayor Jenderal Soeharto.

Belakangan Kopkamtib melakukan kejahatan kemanusiaan, seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, dan penculikan. Sekitar 3 juta orang dilaporkan tewas lantaran dituding sebagai anggota atau simpatisan PKI. "Kopkamtib yang paling bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat tersebut," kata Ketua Tim Penyelidik Kasus 1965 yang juga anggota Komnas HAM, Nurkholis, kepada *Tempo*, Kamis dua pekan lalu.

Kopkamtib terus berlanjut ketika Soeharto menjadi presiden. Kerja lembaga itu terstruktur dari pusat sampai daerah. Tugasnya mengidentifikasi, menangkap, dan menahan. Dari begitu banyak orang yang ditahan, hanya segelintir yang diadili. Namun Komnas HAM tak memiliki dokumen otentik, semisal surat perintah operasi yang spesifik. "Keterangan kami peroleh dari para mantan tahanan politik," ujar Nurkholis.

Para korban biasanya hanya mendapatkan surat pembebasan dari penjara atau pengasingan. Namun tak pernah ada surat penahanan. "Sewaktu saya dibebaskan dari Pulau Buru, suratnya berbunyi: 'tak terlibat G30S/PKI'," kata Syaiful, getir. ●

Mayor Jenderal Soeharto (tengah) seusai peristiwa G-30-S di Jakarta, Oktober 1965.

DI BAWAH CENGKERAMAN KOPKAMTIB

SOEHARTO MEMBENTUK ORGANISASI SUPER UNTUK MELINDAS PKI. OTAK DAN MOTOR PEMBANTAIAN MASSAL.

HARI-HARI setelah penculikan enam jenderal di Jakarta merupakan periode konsolidasi kilat di tubuh Angkatan Darat. Satu-satunya jenderal paling senior, Abdul Haris Nasution, terluka dan dirundung duka setelah kehilangan putrinya, Ade Irma Suryani.

Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat Mayor Jenderal Soeharto tampil mengambil alih pucuk pemimpin Angkatan Darat. Dua perwira penting yang menyokong langkahnya adalah Panglima Komando Daerah Militer Jaya Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah dan Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhie Wibowo.

Setelah memastikan kontrol atas tentara, Soeharto membentuk dan memimpin sendiri operasi pemulihan keamanan, yang kemudian dikenal sebagai Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). "Soeharto membentuk lembaga itu pada 2 Oktober untuk menumpas PKI," ujar Asvi Warman Adam, sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Kopkamtib mendapat pijakan hukum setelah Sukarno meneken Surat Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi/Komando Operasi Tertinggi ABRI pada 1 November 1965. Isinya tentang pemulihan keamanan dan ketertiban pasca-30 September.

Hasil penyelidikan yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menunjukkan Kopkamtib sebagai pelaku utama pelanggaran hak asasi manusia berat peristiwa 1965-1966. "Individu/komandan/anggota kesatuan dapat dimintai pertanggungjawaban."

Lembaga itu memiliki wewenang sangat besar. Semua komandan Kopkamtib adalah komandan militer di tiap tingkatan. Kopkamtib berwenang pula memakai tenaga dari institusi sipil untuk melaksanakan tugasnya. Mereka hanya bertanggung jawab kepada satu orang: Soeharto.

Sebagai Panglima Kopkamtib, Soeharto bergerak cepat. Ia menerbitkan berbagai kebijakan untuk melacak serta menangkap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia. Salah satu perintahnya adalah pembentukan Tim Pemeriksa Pusat/Daerah, yang dipimpin panglima daerah militer.

Tim pemeriksa inilah yang menjadi malaikat penentu hidup-mati jutaan orang pada masa itu. Di kantor-kantor Pelaksana Khusus Daerah Kopkamtib, tim pemeriksa membuat daftar nama orang yang dianggap anggota atau simpatisan komunis dan keluarganya.

Orang yang namanya tercantum dalam daftar menjadi korban kebrutalan aparat atau massa yang dilatih oleh tentara. Mereka diciduk pada malam hari dan kebanyakan tak pernah kembali. Bahkan ada yang langsung dihabisi di tempat.

Dalam buku *The Indonesian Killings*, Michael van Langenbert menyebutkan operasi penumpasan kian menjadi setelah Panglima Kopkamtib mengeluarkan instruksi kepada semua personel Angkatan Darat pada 17 Oktober 1965. Instruksi itu menyebut PKI sebagai pengkhianat dan menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Untuk memuluskan penumpasan orang komunis di Indonesia, Kopkamtib, melalui Kostrad dan RPKAD, menebar propaganda yang mengasosiasikan PKI sebagai musuh seluruh rakyat. Komunis dituding nyaris menghancurkan bangsa sehingga harus dimusnahkan tanpa ampun.

Foto pengangkatan mayat para jenderal dari sumur Lubang Buaya berulang kali dimuat di media massa, yang semuanya sudah berada di bawah kontrol tentara. Tak lupa dibumbui cerita bahwa mereka tewas setelah disiksa secara perlahan oleh perempuan anggota Gerwani.

Selain memastikan semua daerah bebas dari elemen komunis, Kopkamtib membersihkan pemerintahan Sukarno dari pejabat-pejabat yang diduga berkaitan dengan PKI. Menurut Van Langenbert, pembersihan dilakukan setelah Soeharto, berbekal Surat Perintah Sebelas Maret 1966, mengumumkan PKI sebagai partai terlarang.

Kopkamtib menjadi penopang utama rezim Orde Baru. Ibarat sistem layanan satu atap, dalam bukunya, *Gerwani: Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan*, Amurwani Dwi Lestariningsih menuturkan lembaga itu melakukan semua proses hukum dengan dalih keadaan darurat.

Tak cuma menentukan tersangka, menggeledah, dan menangkap, Kopkamtib juga menyelidik, menuntut, dan menghukum tanpa lewat pengadilan. Lembaga itu bahkan memantau dan menentukan nasib tahanan yang sudah dibebaskan.●

IRONI GANDHI DI MEDAN

Kalau abang masuk Jalan Gandhi
Badan abang habis dipukuli
Pulang-pulang tinggal holiholi (tengkorak).

POTONGAN lirik lagu berjudul *Abang Pareman* itu mungkin masih akrab di telinga sebagian warga Medan. Jalan Gandhi yang dimaksud si pencipta lagu, entah siapa namanya, adalah tempat berdirinya sebuah bangunan berlantai dua yang difungsikan sebagai rumah tahanan selama lebih dari satu dekade setelah peristiwa Gerakan 30 September. Inilah neraka bagi siapa pun yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia dan organisasi yang bernaung di bawahnya.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebutkan rumah tahanan Gandhi merupakan salah satu lokasi penyiksaan, pengurungan, dan pemusnahan yang dilakukan aparat negara. Menurut laporan penyelidikan peristiwa 1965-1966 yang dibuat Komnas HAM, selain pemukulan, penyiksaan yang paling banyak dialami para tahanan adalah disekap di dalam WC bersama tumpukan tinja. Di penjara Gandhi, tahanan biasanya hanya transit beberapa waktu sebelum dipindahkan ke penjara lain.

Empat tahun lalu, bangunan yang pernah menjadi sekolah itu dirobohkan. Kini sebuah gedung berbalut cat hijau metalik tampak mencolok di antara bangunan sekitarnya. Gedung itu menjadi pusat perkumpulan warga etnis Tionghoa, Teo Chew Sumatera Utara. Gedung lama sudah hilang. Tapi, bagi tahanan yang keluar dengan selamat, Jalan Gandhi tetap menyisakan kisah pilu. "Dulu di situlah saya disekap dan menjalani siksaan," kata Astaman Hasibuan, 73 tahun, yang dituduh terlibat PKI.

Cerita Astaman berawal setelah peristiwa 30 September 1965. Di Sumatera Utara, Pelaksana Khusus Daerah Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Laksusda Kopkamtib) mengambil alih sekolah dasar milik Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki), organisasi warga etnis Tionghoa yang dituduh menjadi pendukung PKI, itu. Di sinilah para pesakitan yang dicap antek komunis menjalani interogasi. Seusai interogasi, sebagian dikirim ke pusat tahanan lainnya, sisanya menetap menjalani hari-hari panjang.

Setelah gempa politik 1965, kantor PKI dan organisasi yang dianggap berafiliasi ke partai komunis di Medan hanya menyisakan jelaga. Astaman, yang anggota Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), adalah anak seorang pengurus PKI Simalungun. Cukup alasan untuk mengantarnya menemui maut, meski ia mengaku bukan komunis. "Saya bukan PKI. Orang tua saya memang PKI," ujarnya dua pekan lalu. Astaman ditahan empat setengah tahun di Jalan Gandhi, sebelum dioper ke rumah tahanan lainnya, dan bebas pada 1978.

Rumah tahanan di Jalan Gandhi sulit dilupakan. Lantai satu bisa memuat 1.800 orang, sedangkan lantai dua adalah ruang petugas. Astaman masih ingat beberapa rekan sesama pesakitan yang dibawa ke lantai dua dan terjun bebas lalu terkapar di jalanan. Pukulan di sekujur tubuh yang berulang kali membuat hilang kesadaran, dikurung di WC gelap penuh tinja selama berminggu-minggu, dan kelaparan sudah dilalui bekas wartawan yang kini menjadi aktivis Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia ini.

Jalan Gandhi di Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara.

Gandhi bahkan lebih ganas bagi anggota TNI yang dituduh simpatisan PKI. Bintara yang bertugas di bagian logistik Angkatan Darat, Eddy Sartimin, kini 72 tahun, adalah salah satu korban. Setelah menjalani pemeriksaan dan penyiksaan di markas satuan tugas intelijen di Jalan H.M. Yamin, Eddy dikirim ke Gandhi. Selain mendapat siksaan reguler yang bisa membuat cairan perutnya merembes, ia sempat disekap 40 hari di WC, tidur di atas kotoran. "Seorang perwira bahkan diikat dan mendekam tiga tahun di WC," katanya.

Eddy Sartimin mungkin tergolong orang yang paling apes, walaupun bisa lepas dari Gandhi dengan tetap membawa nyawa. Ia ditahan sebelas tahun, dari tahanan ke tahanan. Setelah dibebaskan, ia dinyatakan masuk golongan F alias tidak terlibat PKI. "Saya membantah tuduhan PKI. Saya tidak terlibat seperti Lekra, buruh (organisasi afiliasi PKI) itu. Tidak ada keluarga saya terlibat PKI," tegas katanya. Sudah kadung dicap PKI, Eddy ditinggalkan oleh istri dan anak-anaknya. Aktivis lembaga swadaya masyarakat itu kini hidup sendiri. ●

BERAS ERWIN DAN BUBUR TAJIN

PARA TAHANAN POLITIK MENJEJALI RUANG TAHANAN SEMPIT. MAKANAN MINIM DAN MEREKA AKRAB DENGAN BERBAGAI METODE PENYIKSAAN.

Salah satu bentuk **interogasi** tentara.

TIGA peluru menembus tubuh lelaki itu. Dua di dada dan sebuah lagi di lengan kirinya. Berondongan tembakan dari bedil tentara itu tak membunuh Eko Wardoyo, kini 89 tahun. Tapi mata kirinya buta karena tusukan bambu yang dihunjamkan anggota Zeni Tempur 8 dan Komando Distrik Militer Jatinegara pasca-Gerakan 30 September 1965.

Eko dituduh sebagai Komandan Pos Koordinasi Barisan Tani Indonesia Jakarta Selatan. Pria asal Klaten ini memang bekerja di Departemen Pertanian. Setelah ditangkap di daerah Tanjung Priok, dia dibawa ke Balai Masyarakat Desa Pasar Minggu, lalu dipindahkan ke markas tentara Zeni Tempur 8 di Lenteng Agung. Di ruang tahanan, penyiksaan menjadi santapannya sehari-hari.

"Kedua tangan dan kaki saya diikat dengan tambang, lalu badan saya digebuki dari belakang," ujarnya. "Seorang tentara menyiram spiritus, lalu menyileti perut saya hingga berdarah-darah."

Kisah Eko hanya sepenggal cerita pedih para tahanan politik pasca-Gerakan 30 September. Para anggota satuan tugas Angkatan Darat di bawah Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban menangkap, menahan, dan menginterogasi mereka di berbagai tempat: penjara, kamp penahanan, atau tempat subrehabilitasi di Jakarta dan sekitarnya. Banyak tempat yang tak disiapkan untuk jadi bui dijejali ratusan manusia.

Kebanyakan tahanan merupakan hasil Operasi Kalong di Jakarta dan Operasi Trisula di Blitar Selatan. Selanjutnya, para tahanan politik ini menjalani hukuman tanpa proses pengadilan di penjara atau kamp inrehabilitasi di Jawa atau di luar Jawa. Di tempat itu, mereka akrab dengan berbagai metode penyiksaan.

Simak kembali cerita Eko. Setelah diperiksa di Kodim, dia dipindahkan ke penjara Cipinang. Di sana, penderitaannya tak reda. Para petugas hanya memberi makan dua kali sehari dengan menu tetap: sayur bayam, nasi berpasir, dan sesekali jagung rebus. "Jagungnya dipipil. Saya hitung jumlahnya 142 biji, pernah cuma 98 biji," ujarnya mengenang masa pahit itu.

Eko meringkuk empat bulan di Cipinang. Seterusnya, ia dikirim ke Rumah Tahanan Salemba, yang lebih longgar. Di Salemba, ia merawat dan berteman dengan tokoh PKI, Latief. Setelah itu, Eko ditempatkan di penjara Tangerang. Dia menjalani hidup dari sel ke sel selama 13 tahun.

Bedjo Untung, 64 tahun, dan Jawito, 62 tahun, mengalami nasib serupa di Salemba. Di sana, beras Erwin menjadi makanan sehari-hari. Mereka tak tahu mengapa beras apak dan berpasir itu disebut Erwin. Sebelum makan, mereka harus memisahkan dulu batuan atau pasir dari nasi.

Nasi itu dibanjiri kuah sayur yang hanya berisi dua helai daun bayam. Lauknya potongan kecil tempe. "Kami juga pernah diberi bubur, tapi seperti tajin, encer sekali," ujar Jawito.

Bedjo dan Jawito semula menjalani tahanan di markas Kalong di Jalan Gunung Sahari II. Setelah berpindah-pindah penjara, mereka disuruh kerja paksa membuat jalan dan membuka lahan pertanian di daerah Cikokol, Tangerang. Jawito selanjutnya dibuang ke Nusakambangan dan Pulau Buru.

Tahanan perempuan mengingat penjara Bukit Duri dan markas Kalong sebagai tempat penyiksaan. Dengarlah cerita Sri Sukatno, anggota Gerwani yang pernah mendekam di Bukit Duri selama bertahun-tahun. Penyiksaan, menurut mantan jurnalis koran *Ekonomi Nasional* itu, juga kerap terjadi jika para tahanan *dibon* malam hari ke Gang Buntu.

Gang Buntu merupakan sebutan untuk sebuah tempat di Jalan Kebayoran Lama, tak jauh dari lampu merah Pasar Bunga Rawa Belong. Tempat itu merupakan bangunan besar yang dulunya dipakai sebagai studio dan untuk memutar film bagi Lekra. Kini bangunan besar itu dipakai sebagai gudang distribusi sandal dan sepatu plastik.

Di tempat tersebut, para tahanan mengalami siksaan fisik dan psikis dengan berbagai metode, bahkan penyiksaan di daerah genital. "Saya disetrum di sini," ujar perempuan sepuh ini sambil memperlihatkan gigi-giginya yang tanggal karena siksaan itu.

Tempat penahanan dan penyiksaan lain adalah Pusat Investigasi Komando Militer Jakarta Raya di Lapangan Banteng. Penulis buku *Bertahan Hidup di Gulag Indonesia*, Carmel Budiardjo, pernah ditahan di sini. "Tempatnya sekarang ya di Kementerian Agama itu," ujar Bedjo.

Mereka yang diduga terlibat PKI dan berasal dari kalangan militer bakal menjalani pemeriksaan di kompleks Guntur, sekitar Kantor Polisi Militer Kodam Jaya di Manggarai, Jakarta Selatan. Di tempat itu, mereka harus pasrah menjalani nasib yang kelam. •

Soemiran D.P., 70 tahun, korban tahanan politik PKI 1965-1979, menunjukkan masjid peninggalan yang dibangun tapol di Moncongloe.

KERJA RODI DI MONCONGLOE

KAMP PENGASINGAN INI HAMPIR TERLUPAKAN. BANYAK TAHANAN SAKIT HEPATITIS KARENA BERATNYA PEKERJAAN DAN MINIMNYA GIZI.

KEBUN singkong memenuhi sebagian area di perbatasan Kabupaten Gowa dan Maros, Sulawesi Selatan. Beberapa pengembang mulai membangun perumahan di kawasan penyangga pengembangan Kota Makassar ini.

Mungkin tidak sampai lima tahun lagi daerah ini menjadi bagian Kota Daeng. Sejarah kelam kampung di Desa Paccellekang, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Gowa, itu makin terlupakan. Tapi tidak bagi Soemiran.

Laki-laki 69 tahun ini salah satu dari seribuan bekas penghuni Instalasi Rehabilitasi Moncongloe, kamp pengasingan bagi orang-orang yang terlibat Partai Komunis Indonesia. Dibuka pada 1969, tempat penahanan ini resmi dibubarkan sepuluh tahun berselang.

Soemiran dulu polisi yang bertugas di Pelabuhan Makassar. Ia dijebloskan ke rumah tahanan militer karena dianggap membantu pelarian seorang tokoh PKI dengan kapal ke Jawa. "Saya hanya ingin membantu guru saya. Saya lihat surat-suratnya lengkap, saya persilakan naik ke kapal," kata lulusan Sekolah Kepolisian di Mojokerto, Jawa Timur, yang melanjutkan belajar di SMA Sawerigading, Makassar, untuk mendapatkan kenaikan pangkat itu.

Ia baru masuk kamp tersebut pada 1978, ketika semua tahanan politik telah dibebaskan. Moncongloe berubah menjadi tempat

penahanan bagi militer. Mereka masing-masing diberi lahan satu hektare dan sepetak rumah. Setahun kemudian, mereka dibebaskan. Saat ini tinggal Soemiran yang bertahan, sedangkan rekan-rekan seangkatannya sudah pindah dan menjual lahannya.

Menurut buku *Kamp Pengasingan Moncongloe,* yang ditulis Taufik, tempat penahanan ini dibuka pada Maret 1969. Sebelas tahanan politik, yang terdiri atas tujuh laki-laki dan empat perempuan, dibawa ke Moncongloe untuk mendirikan barak darurat. Dua bulan kemudian, masuklah 44 tahanan, yang diberi tugas menyiapkan kamp pengasingan.

Anwar Abbas, salah seorang dari 44 tahanan politik itu, masih menyimpan semua kenangan di tempat tersebut. Dia menunjukkan kepada *Tempo* setumpuk dokumen terbungkus plastik berisi catatan dengan tulisan dari mesin ketik, peta lokasi Moncongloe, beberapa helai foto, dan dua lembar kliping koran. "Ini catatan singkat saya," kata pria 66 tahun itu ketika ditemui di rumahnya di Gowa, dua pekan lalu.

Dengan peralatan seadanya, tahanan yang kemudian disebut Kelompok 44 membuka hutan dan membangun kamp. Di bawah pengawasan ketat anggota polisi militer, kelompok ini membangun kompleks pengasingan lengkap dengan lima barak berukuran 120 meter persegi, masjid, gereja, poliklinik, dan aula.

Pada Desember 1969, Moncongloe menampung tahanan politik yang sebelumnya menghuni rumah tahanan militer di berbagai kota di Sulawesi Selatan, mulai Majene, Tana Toraja, Palopo, Makassar, Bulukumba, sampai Selayar. Pemindahan ini bertahap hingga 1971.

Anwar, Ketua Pemuda Rakyat Pangkajene Kepulauan (Pangkep), sebelumnya ditahan di kantor polisi di kotanya pada 1965. Namun ia minta dipindahkan ke rumah tahanan militer di Makassar karena seorang temannya yang ditahan di sini telah dibebaskan. Dia baru bebas pada 1977.

Di tahanan militer ini, mereka diinterogasi. Menurut Anwar, di sinilah mereka disiksa. Keluar dari ruang pemeriksaan, para tahanan politik ini mendapat kategori B atau C. "Kriterianya apa, tidak tahu. Suka-suka petugasnya," kata Anwar sambil mengisap rokok kreteknya.

Ia mengakui kondisi di kamp lebih baik daripada saat di penjara Makassar. Untuk makan, setiap tahanan mendapat jatah setengah liter beras per hari. Lauknya, mereka mengupayakan sendiri dari kebun dan hutan. Tempat tinggal mereka pun lebih baik daripada sel sempit untuk 20 orang.

Tapi di sini mereka diperlakukan seperti budak oleh para penjaga kamp. M. Jufri Buape, 71 tahun, mengatakan para tahanan harus menggarap lahan tentara tanpa dibayar minimal enam jam sehari. "Jangankan upah, bisa-bisa kami kena pukul jika dianggap kerja tidak benar," kata laki-laki yang belum lama ini terkena *stroke* ringan itu.

Sekretaris Lekra Sidrap ini enggan memerinci bentuk hukuman yang diterima jika pekerjaan tidak sesuai dengan kemauan penjaga. "Ya, macam-macamlah," katanya. Sering pula para tentara memerintahkan tahanan mengambil kayu di hutan atau bambu untuk dijual. Tentu saja mereka tidak mendapat bagian.

PARA TAHANAN HARUS MENGGARAP LAHAN TENTARA TANPA DIBAYAR MINIMAL ENAM JAM SEHARI. "JANGANKAN UPAH, BISA-BISA KAMI KENA PUKUL JIKA DIANGGAP KERJA TIDAK BENAR.

Jufri masih ingat nama para penjaga kamp. "Banyak yang sudah meninggal," ujarnya. Saat jabatan komandan kamp dipegang Kapten Siregar dan Kapten Lubis, kekerasan fisik terhadap para tahanan sering terjadi. Menurut Anwar, tidak ada tahanan yang sampai meninggal karena penyiksaan. Ada beberapa dari mereka yang sakit dan meninggal. Kebanyakan tahanan menderita hepatitis akibat beratnya pekerjaan dan kurangnya asupan gizi.

Sebagai bentuk perlawanan, tahanan sering kali bekerja sekadarnya asalkan tidak mendapat hukuman. Mereka lalu mencuri kesempatan menggarap ladang penduduk atau lahan milik tentara yang ada di luar kamp. Dari kerja sampingan ini, mereka memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan, mulai peralatan mandi, pakaian, sampai rokok. Apalagi beberapa tahanan suami-istri ada yang membawa anak.

Tahanan perempuan, menurut Anwar, juga sering menjadi korban pelecehan para penjaga. Dalam buku Taufik disebutkan tentang tahanan perempuan berprofesi perawat yang hamil dan dikeluarkan dari kamp, tapi kemudian nasibnya tidak jelas.

Selama di kamp, para tapol juga merasakan kerja rodi: membangun jalan sepanjang 20 kilometer dari Moncongloe ke Daya, Makassar. Mereka dibagi dalam beberapa kelompok, yang bertugas mulai mencari batu di gunung sampai mengeraskan jalan.

Taufik, peneliti di Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar, ketika meneliti tentang Moncongloe berhasil mewawancarai tiga tentara yang bertugas menginterogasi tapol. Mereka membenarkan adanya penyiksaan di kamp pengasingan. Sayangnya, para penjaga kamp tidak bercerita lebih gamblang.

Menurut Taufik, sebelum ia menulis buku, tak ada informasi tertulis tentang kamp yang hanya berjarak 28 kilometer dari Makassar itu. "Tidak ada referensi saat itu. Saya harus mewawancarai puluhan tapol dan mencari pelaku," ujarnya.

Taufik mengatakan awalnya banyak tahanan politik yang menolak bicara. Dia harus beberapa kali bertemu untuk meyakinkan mereka. Kesulitan terberat: saat hendak mewawancarai eks petugas. Para pensiunan tentara itu menolak dengan alasan beragam. "Mereka khawatir dituntut balik dan paham komunis bangkit kembali," kata Taufik, yang menjadikan penelitian tentang kamp itu sebagai bahan tesis pascasarjana di Universitas Hasanuddin, Makassar.

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Nurkholis, dua tahun lalu meninjau Moncongloe bersama sejumlah bekas penghuninya. Moehamad Arman dari Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, yang mendampingi korban gerakan antikomunis itu, berharap negara segera memulihkan nama baik mereka, melakukan rekonsiliasi , dan menyelesaikan kasus 1965.

BANGSAWAN KARAENG LIRA

MENGGANYANG KELUARGA SENDIRI

BICARANYA sudah mulai terbata-bata. Namun Bangsawan Karaeng Lira, 72 tahun, masih berapi-api kala menceritakan kiprahnya mengganyang anggota Partai Komunis Indonesia dan Barisan Tani Indonesia (BTI) di desanya, Bontolanrang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, pada pengujung 1965.

Bangsawan menyimpan dendam karena pernah dikejar-kejar anggota PKI. Gara-garanya, saat mengikuti pelatihan soal Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) yang diadakan Bupati Takalar Makkatang Daeng Sibali, dia melontarkan pernyataan komunis yang tidak mengenal Tuhan tak bisa disatukan dengan agama.

Begitu pecah peristiwa G-30-S dan PKI dianggap berada di belakangnya, Bangsawan menjadi motor penumpasan anggota partai komunis dan *onderbouw*-nya di desanya. Kebetulan basis BTI Takalar adalah kampungnya. "Saya yang memimpin massa mengganyang rumah pimpinan BTI itu. Paginya, rumah itu hancur. Tentara dan polisi, yang datang belakangan, bilang, 'Luar biasa gerakan ini'," katanya.

Dalam serangan itu, beberapa anggota PKI dan BTI tewas. Sejumlah korban masih kerabatnya. "Saya ini orang keras," ujar Bangsawan, yang pada 1975 diangkat menjadi kepala desa. Ia kemudian menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Takalar pada 1992 setelah berhasil mengajak penduduk desa masuk Partai Golkar, terutama eks anggota PKI dan BTI.

Ada ribuan anggota Barisan Tani Indonesia di Bontolarang. Mereka bergabung karena dijanjikan akan diberi tanah. "Kalau secara ideologi, mereka tidak mengerti," katanya. Setelah ditangkap, mereka ditahan di komando rayon militer dan dipaksa melakukan berbagai pekerjaan, mulai membersihkan lapangan sampai membuat irigasi dan jalan.

Rahim, yang menjadi pengawas dalam kerja paksa ini, mengatakan para tahanan politik itu membuat irigasi sepanjang 3 kilometer dari pagi sampai pukul 10 malam. Ada seorang yang tewas karena kelaparan dan terserang penyakit. "Mereka tidak dikasih makan. Kadang-kadang saya diam-diam yang memberi makan," ujarnya. Makanan biasanya dikirim anggota keluarga masing-masing.

"Tidak ada siksaan fisik, tapi siksaan batin luar biasa," katanya. "Mereka tidur tanpa alas (tanah) dalam satu kamp." Para tapol ini juga dipaksa bekerja dengan alat seadanya. Bahkan, untuk merobohkan pohon, mereka mencabut akarnya dari tanah menggunakan tali ditarik beramai-ramai. Sejumlah jalan, irigasi, dan pasar di Galesong yang ada sekarang adalah hasil kerja paksa ini.

▲ **Para tahanan politik** di Moncongloe, Sulawesi.

Pemimpin BTI Kecamatan Galesong, Kamaruddin Bella, mengaku belum bisa memaafkan mereka yang mengganyang keluarganya. Rumahnya dihancurkan oleh Bangsawan Lira. Ayah mertuanya meninggal setelah disuruh lompat dari atas rumah. "Termasuk anak saya juga dibunuh," kata Kamaruddin, 80 tahun, ketika ditemui di rumahnya di Galesong. Ia lolos dari sergapan, meski akhirnya tertangkap dan ditahan di Gowa. ●

Bekas kamp tahanan PKI di Pulau Kemaro, Palembang.

SEBUAH KAMP DI TENGAH SUNGAI

KAMP KONSENTRASI MILITER ITU DIBANGUN DI PULAU KEMARO, PALEMBANG. KINI JADI TEMPAT WISATA.

PULAU itu terletak di tengah Sungai Musi dan dapat dicapai sekitar 15 menit dengan perahu motor dari Jembatan Ampera. Daratan yang luasnya sekitar sepertiga Kebun Raya Bogor itu disebut Pulau Kemaro (kemarau), karena pulau itu tak pernah kebanjiran meskipun Musi sedang pasang besar.

Di dekat dermaganya terdapat sebuah pagoda besar, Kelenteng Hok Tjing Rio, dan makam Siti Fatimah. Menurut legenda, pulau itu menjadi saksi bisu kisah cinta Tan Bun An, seorang saudagar Tionghoa, dengan Siti Fatimah, seorang putri raja, yang meninggal dengan tragis di sungai itu.

Pulau Kemaro kini jadi tempat wisata dan ziarah umat Buddha. Tapi, pada 1960-an dan 1970-an, pulau itu adalah kamp konsentrasi yang mengerikan bagi orang-orang PKI dan yang disangka komunis. Tim Ad Hoc Peristiwa 1965-1966 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendapat kesaksian bahwa sekitar 30 ribu orang telah dibunuh dan hilang di provinsi itu, termasuk di pulau tersebut. Para korban dibiarkan mati kelaparan di kamp atau dibuang ke sungai.

Menurut Suwandi, bekas guru di Bengkulu yang 12 tahun ditahan tanpa pengadilan di sana, pulau itu dulu dikelilingi pagar kawat berduri dan dijaga polisi militer. Dia ditangkap karena dituduh sebagai anggota PKI. Di dalam pagar itu berdiri beberapa barak dengan ruang-ruang seluas kamar mandi yang diisi banyak tahanan dari berbagai daerah di Sumatera, seperti Palembang, Jambi, dan Lampung.

Penyiksaan oleh militer pada masa pemberantasan PKI tak hanya terjadi di Kemaro, tapi juga sejak para tahanan disekap di Pomdam Sriwijaya. Mochtar Effendy, bekas perwira Kodam IV Sriwijaya, disekap di sana selama belasan tahun karena dituduh komunis. "Saya lihat sendiri banyak tahanan yang diseret, disiksa, sebelum diangkut menuju Sungai Musi," kata kakek 84 tahun ini kepada *Tempo,* 17 September lalu. Dia kini mengelola Yayasan Rumah Sakit Islam Siti Khadijah di Palembang.

"Katanya PKI itu tak bertuhan. Tapi, yang saya heran, mereka sendiri memperlakukan tahanan semaunya," ujar Mochtar, yang merekam pengalamannya selama ditahan dalam buku *Perjuangan Mencari Ridha Tuhan: Catatan Tiga Zaman dari Balik Terali Penjara Rezim Tirani Soeharto.*

Di buku itu dia menggambarkan bagaimana dirinya disiksa satuan tugas intel pada 1972, yang terdiri atas Capa Siahaan, Sersan Tindaon, dan seorang tentara lagi. "Akhirnya, dengan jawaban yang tidak mau mengikuti kehendaknya, Capa Siahaan marah. Dia dengan dua temannya mengeroyok aku dengan pukulan karate, dengan kayu, dengan karet, dengan kursi, setiap dia berbicara. Darah segar sudah memenuhi mukaku dan kepalaku," tulis Mochtar.

Beberapa korban yang selamat dari penyekapan di Pulau Kemaro menyatakan pembunuhan besar-besaran terjadi pada akhir September dan awal Oktober 1966. Dalam tiga malam jumlah tawanan di sana berkurang dari ratusan orang menjadi 17 orang. Mayat-mayat itu diangkut dengan kapal motor dan dibuang di tengah sungai.

Suwandi termasuk yang dapat bertahan hidup, tapi tawanan lain, "Ada yang dilaparkan. Ada juga yang disiksa sampai mati," ujar lelaki 71 tahun yang kini jadi tukang cukur di samping kantor Wali Kota Palembang itu, Rabu dua pekan lalu.

Kini kamp-kamp itu telah lenyap. Semua bangunan sudah diratakan dengan tanah dan ditumbuhi semak belukar. "Di dekat pohon besar itu dulu ada bangunan bekas penjara, tapi sudah lama rusak ketika kami masih kecil," ujar Zulkifli, lelaki separuh baya yang bermukim di sana, seraya menunjuk sebuah pohon yang paling besar di pulau itu. Zulkifli hidup dengan bekerja mencari barang rongsokan di dasar sungai. Selain dia, ada beberapa keluarga lain yang tinggal dan menggarap beberapa petak sawah di sana. ●

GULAG TEPI SUNGAI LAMPIR

TAHANAN POLITIK PEREMPUAN MENGHUNI KAMP PLANTUNGAN. DIANGGAP LEBIH BAIK DARIPADA SEL-SEL DI TEMPAT LAIN.

SUATU pagi pada September 1971, C.H. Sumarmiyati diperintahkan berkemas. Ia melihat rekan-rekannya, 30-an tahanan politik perempuan penghuni penjara Wirogunan, Yogyakarta, juga diminta melakukan hal sama. Semua tanpa penjelasan. Menjelang tengah hari, mereka diangkut dengan truk.

"Ternyata kami dibawa ke Bulu, Semarang, untuk transit sebelum dibawa ke Plantungan," kata Sumarmiyati kepada *Tempo* di Yogyakarta, Kamis dua pekan lalu.

Sepanjang tiga jam perjalanan, tutur Mamik, begitu ia dipanggil, penumpang bak truk berusaha ceria. Semua bernyanyi, tapi menghindari lagu-lagu yang mengundang kesedihan. Mereka antara lain melantunkan *Di Timur Matahari*. Dua pekan di Bulu, Mamik dan kawan-kawan kembali diperintahkan berkemas.

Mereka diangkut ke Plantungan, Kendal, sekitar 70 kilometer dari Semarang. Mereka menuju "Tempat Pemanfaatan Sementara Tahanan G-30-S/PKI Golongan B Wanita". Mantan aktivis Ikatan Persatuan Pelajar Indonesia itu menuturkan, tempat tahanan tersebut berupa bangunan kosong yang ditumbuhi semak belukar. Tidak ada lampu. "Kami diminta membersihkan semuanya, *ngepel*, pasang lampu, *nyapu*, cabut rumput," ujar Mamik.

Tak sedikit tahanan disengat kalajengking. Ular juga banyak ditemukan. Namun ia mengatakan bukan hal itu yang dikeluhkan para tahanan. "Yang kami pikirkan cuma satu: sampai kapan kami di sana."

Tahanan "Golongan B" adalah mereka yang dituduh "nyata-nyata terlibat tidak secara langsung" G-30-S. "Tempat Pemanfaatan Sementara" Plantungan merupakan bekas rumah sakit militer yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Bangunan itu kemudian dijadikan rumah sakit pengidap lepra, yang ditutup pada 1960.

Kompleks itu berada di lembah Lampir, diapit Gunung Perahu, Gunung Butak, dan Kamulan, dataran tinggi yang membentang di selatan Kendal. Kamp di sana biasa disebut kompleks "inrehab", berdampingan dengan rumah tahanan anak negara yang hingga kini masih dipakai. Dua area ini dipisahkan Sungai Lampir. Adapun blok-blok kamp telah runtuh, diterjang banjir bandang 12 tahun silam. Tak ada yang tersisa.

Pada Juni 1971, kamp Plantungan dibentuk untuk "pusat rehabilitasi" tahanan politik dari berbagai kota di Jawa. Sebab, puluhan ribu orang berjejalan menjadi tahanan politik setelah peristiwa 30 September 1965. Amurwani Dwi Lestariningsih, Kepala Subdirektorat Pemahaman Sejarah Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala serta penulis buku *Gerwani: Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan*, menyebutkan pada 1968 tercatat 63.894 orang menjadi tahanan politik. Jumlah itu diperkirakan meningkat hingga 30 persen pada tahun-tahun berikutnya.

Pada 22 Maret 1971, Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban mengeluarkan surat perintah tentang pemindahan 500 tahanan politik B wanita di Jawa ke Plantungan. Tapi jumlahnya terus menggelembung. Dilam, mantan pembina kerohanian Katolik kamp Plantungan, mengatakan, pada awal dia bertugas, Mei 1974, kamp itu dihuni 870 tahanan.

Banyak tokoh penting menghuni kamp itu, baik aktivis Gerakan Wanita Indonesia

▲ **Bangunan** yang tersisa di kamp Plantungan, Kendal, Jawa Tengah.

◄ **Pembebasan** penghuni kamp Plantungan, 1978.

(Gerwani) maupun organisasi lain yang dinyatakan sebagai *onderbouw* Partai Komunis Indonesia. Misalnya dokter Sumiyarsi Siwirini, aktivis Himpunan Sarjana Indonesia, yang dicap militer sebagai "dokter Lubang Buaya". Ada juga Siti Suratih, yang bekerja sebagai bidan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto. Ia istri anggota Politbiro PKI, Oloan Hutapea, yang ditembak mati di Blitar pada 1968. Juga ada Mia Bustam, istri pelukis S. Sudjojono.

Para tahanan sebelumnya menghuni beberapa lokasi interogasi dan penahanan. Misalnya, Sumiyarsi pernah ditempatkan di Markas Kepolisian Bandung Seksi VIII; sel di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta; Rumah Tahanan Pesing; Satgas Kalong Gunung Sahari; Lidikus Lapangan Banteng; juga penjara perempuan Bukit Duri.

Awalnya, para tahanan politik itu tak bersentuhan dengan penduduk sekitar. Tentara menjaga ketat mereka. "Masyarakat juga telah diindoktrinasi: anggota Gerwani adalah istri para anggota PKI yang jahat," ujar Slamet Shabu, 68 tahun, sesepuh Desa Pesanggrahan, di sekitar bekas kamp.

Meski Plantungan dianggap tidak nyaman, para tahanan mengatakan lebih menyenangkan berada di sana. Tempat-tempat tahanan lain dinilai menyeramkan. Dalam buku *Bertahan Hidup di Gulag Indonesia*, Carmel Budiardjo mengisahkan, tahanan politik di Bukit Duri berbisik-bisik mengenai tempat pembuangan terakhir. "Inilah penyelesaian final. Dicampakkan di tempat yang jauh dari keluarga dan sahabat-sahabat untuk selama-lamanya sejauh kita memperkirakan," ia menulis.

Di Plantungan, para tahanan menemukan kehidupan dan lokasi baru yang tak terlalu seram-seperti yang sebelumnya mereka bayangkan. Ada delapan blok besar di kompleks yang hanya dipagari kawat berduri. Tak ada sel tempat tahanan berdesak-desakan di dalamnya. "Kami tidak lagi terkungkung di sel," kata Pujiati, 87 tahun, mantan aktivis Serikat Buruh Unilever yang sebelumnya mendekam enam tahun di Bukit Duri. Tahanan sesekali dibolehkan keluar dari kompleks dengan pengawalan.

Di sana, kata dia, tak ada siksaan fisik walau tahanan tetap menanggung beban psikologis dan menerima pelecehan seksual. Ia menganggap kadar penderitaan di Plantungan jauh berbeda dibandingkan dengan saat ia diinterogasi dan ditahan di CPM dan penjara Wirogunan. Di dua tempat itu, pada saat interogasi, ia disiksa, dilecehkan secara seksual, dan diperlakukan keras.

Tetap saja, sesekali ada kejadian yang membuat tahanan tertekan. Misalnya, Mamik menyebutkan, tahanan asal Solo bernama Sumiyatun yang gila karena ditangkap hanya sebulan setelah menikah. Ada juga dua tahanan yang hamil oleh penjaga dari militer. Dilam membenarkan informasi ini. "Dipaksa atau suka sama suka, saya tidak tahu," ujarnya.

Para tahanan diberi pilihan kegiatan. Ada yang bercocok tanam, beternak, atau membuat kerajinan seperti menyulam. Dilam menyebutkan ada tahanan yang dipekerjakan di rumah-rumah dinas petugas kamp dan lembaga pemasyarakatan. "Tapi dipilih yang lolos evaluasi," ujarnya.

Setiap Kamis, tahanan menerima pelajaran agama. Sabtu merupakan hari indoktrinasi yang disebut "santi aji". Para tahanan diminta mempelajari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta pelajaran ilmu politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Hubungan dengan masyarakat sekitar kian lama kian cair. Warga kerap memanfaatkan klinik di kamp yang dikelola dokter, bidan, atau perawat yang merupakan tahanan. Tak jarang merekalah yang mendatangi pasien di desa dengan pengawalan tentara. "Persalinan tiga dari enam anak kami dibantu bidan dari tapol," ujar Siti Chamidah, istri Slamet.

Selain pelayanannya sopan dan bersahabat, menurut Siti Chamidah, berobat ke klinik kamp "inrehab" dekat dan murah. Sebagai perbandingan, sementara biaya persalinan di puskesmas saat itu Rp 1.000, di klinik "inrehab" cuma Rp 100. Menurut Dilam, klinik di kamp menyingkirkan rumah sakit. "Sampai mobil-mobil, truk, bawa rombongan," tuturnya.

Hubungan baik terus terjalin hingga kamp kosong. Setelah didesak Palang Merah Internasional agar tahanan politik dikembalikan ke masyarakat pada 1975, pemerintah mulai membebaskan mereka. Dalam bukunya, Amurwani menyatakan 45 tahanan yang digolongkan *die hard*–berideologi komunis kuat–direlokasi ke "inrehab" Bulu, Semarang, pada 1976. Di antaranya dokter Sumiyarsi dan Mia Bustam, juga wartawan Istana, Roswati. Tahanan lain meninggalkan Plantungan pada 1978-1979.

Sebagian mantan tahanan masih menjalin hubungan kekeluargaan dengan penduduk di sekitar bekas kamp. Bidan Mujiati, misalnya, dua kali berkunjung ke rumah Slamet, termasuk kunjungannya setahun lalu. "Dia mengaku kangen dan napak tilas ke Plantungan," tutur Slamet. Dilam, yang kini tinggal di Playen, Gunungkidul, juga beberapa kali disambangi mantan tahanan politik. ●

JALAN MASIH BERLIKU

PERISTIWA 1965-1966 dan tahun-tahun sesudahnya merupakan suatu tragedi kemanusiaan yang menjadi lembaran hitam dalam sejarah bangsa Indonesia. Tak ada satu pun kebenaran mengenai besarnya korban yang terbunuh ataupun korban penghilangan orang secara paksa. Sejumlah sumber menyebutkan, korban terbunuh dan hilang ada 300 ribu-2,5 juta jiwa.

Peristiwa tersebut terjadi akibat kebijakan negara pada waktu itu. Mereka disangka sebagai anggota dan pengikut komunis yang dianggap melawan pemerintah. Pada saat itu ada semacam kebijakan negara yang diikuti munculnya berbagai tindakan kekerasan terhadap warga negara yang dituduh sebagai anggota ataupun simpatisan PKI.

Para korban yang selamat dan keluarganya mengalami berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Penderitaan psikologis mereka pikul hingga turun-temurun. Selain kehilangan harta benda dan usaha, mereka mengalami diskriminasi hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Pasca-Reformasi 1998, peristiwa 1965-1966 mendapat perhatian kembali. Presiden Abdurrahman Wahid berupaya memperjelasnya dalam kebenaran sejarah Indonesia. Saat itu, DPR mengesahkan pemberlakuan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ini merupakan upaya menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran berat di masa lalu. Undang-undang ini banyak mendapat inspirasi dari apa yang dilakukan Nelson Mandela di Afrika Selatan.

Komnas HAM periode 2002-2007, yang banyak mendapat pengaduan dari korban dan keluarganya, merespons hal ini. Mereka, antara lain, beberapa kali mengeluarkan surat rekomendasi kepada presiden untuk segera memulihkan hak asasi dengan cara mengakhiri semua bentuk diskriminasi dan stigma terhadap para korban dan keluarganya.

Upaya penuntasan kasus kejahatan 1965 oleh Komnas HAM adalah sebuah catatan panjang yang dilakukan lembaga ini. Pada 2003, Komnas HAM membentuk tim penyelidikan untuk mengkaji lima pelanggaran berat hak asasi yang dilakukan rezim Soeharto. Salah satunya, kejahatan 1965.

Komnas HAM periode 2007-2012 menindaklanjuti hasil kajian sebelumnya dengan melakukan kajian hukum terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia di masa Orde Baru. Hasilnya adalah ditemukan dugaan kuat bahwa telah terjadi pelanggaran berat dalam peristiwa 1965. Dalam sidang paripurna Mei 2008, Komnas HAM memutuskan membentuk tim *ad hoc* penyelidikan pro-yustisia.

Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa 1965-1966 bekerja mulai 1 Juni 2008 hingga 30 April 2012. Pengumpulan bukti dilakukan selama empat tahun. Bekerja dengan mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, tim ini memeriksa saksi serta korban sebanyak 349 orang. Dalam menjalankan penyelidikan, tim melakukan peninjauan secara langsung ke se-

YOSEP ADI PRASETYO
WAKIL KETUA I KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

jumlah daerah. Waktu yang panjang ini menunjukkan kehatihatian Komnas dalam menyelidiki peristiwa sensitif itu.

Ada dua bentuk kejahatan dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 yang disebut sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tim Komnas menyimpulkan, dalam Peristiwa 1965, diduga telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Hasil penyelidikan menyimpulkan, dari 10 jenis kejahatan terhadap kemanusiaan–yang tercantum dalam Pasal 9 UU Nomor 26 Tahun 2000–telah terjadi sembilan jenis kejahatan. Antara lain, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, kejahatan seksual, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa.

Perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan secara langsung terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan dari kebijakan penguasa saat itu.

Kejahatan terhadap kemanusiaan ini masuk yurisdiksi universal. Setiap pelaku kejahatan tersebut dapat diadili di negara mana pun, tanpa mempedulikan tempat perbuatan dilakukan dan kewarganegaraan pelaku ataupun korban. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip *no safe haven* (tidak ada tempat berlindung) bagi pelaku kejahatan yang digolongkan dalam *hostis humanis generis* (musuh seluruh umat manusia). Kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana kejahatan perang dan genosida, tak mengenal daluwarsa. Pasal 56 UU Nomor 26 Tahun 2000 juga mencantumkan hal tersebut.

Dalam menjalankan tugas, Tim Penyelidikan Peristiwa 1965-1966 menemui aneka persoalan. Antara lain luasnya sebaran geografis. Pelanggaran yang berat terhadap hak asasi manusia ini terjadi hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia dan memakan banyak korban, kecuali Irian Barat (sekarang Papua dan Papua Barat). Hal lain adalah luasnya cakupan geografis serta banyaknya korban serta saksi. Juga, berbagai kompleksitas dalam pelaksanaan penyelidikan, yang tidak didukung anggaran memadai.

Untuk itu, tim mencoba melakukan optimalisasi dengan cara memilih dan memilah beberapa sampel kejahatan serupa. Hal ini untuk membuktikan elemen *chapeau*, yaitu terjadinya kejahatan secara sistematis dan meluas.

Lamanya waktu kejadian juga menjadi masalah. Peristiwa 1965-1966 terjadi hampir 47 tahun silam. Para korban maupun keluarganya yang menjadi saksi sulit mengingat secara detail semua kejadian: peristiwa, waktu kejadian, serta nama dan pangkat orang-orang yang patut dimintai pertanggungjawaban. Sebagian besar pelaku utama dan penanggung jawab bahkan telah meninggal.

Korban umumnya mengalami tindak kekerasan yang membekas selama berpuluh-puluh tahun, baik fisik maupun mental. Hal ini mengakibatkan rasa traumatis mendalam, sehingga para korban yang menjadi saksi mengalami kesulitan atau enggan memberikan keterangan. Berkali-kali hasil laporan penyelidikan peristiwa 1965 dibahas dan mengalami penundaan pengambilan keputusan akibat sidang paripurna meminta tim memperbaiki dan memperbaiki kualitas laporan.

Pada Juli 2012, melalui mekanisme sidang paripurna, Komnas HAM menerima laporan tim dan menyatakan bahwa patut diduga telah terjadi pelanggaran berat hak asasi dalam peristiwa 1965-1966. Berkas laporan telah disampaikan kepada Jaksa Agung, yang akan bertindak sebagai penyidik. Pada akhir Agustus 2012 telah berlangsung pertemuan antara pimpinan Komnas HAM dan pimpinan Kejaksaan Agung untuk membahas tindak lanjut hasil penyelidikan.

Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita menunggu dua hal: langkah hukum dan langkah politik. Langkah hukum berupa tindak lanjut terhadap hasil penyelidikan Komnas HAM dalam ranah penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Hal ini memerlukan rekomendasi DPR, yang notabene adalah lembaga politik, serta penerbitan keputusan presiden mengenai pembentukan pengadilan HAM *ad hoc*.

SELAIN KEHILANGAN HARTA BENDA DAN USAHA, **MEREKA MENGALAMI DISKRIMINASI** HAK SIPIL DAN POLITIK, SERTA HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA.

Langkah politik adalah langkah yang harus diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia dalam Peristiwa 1965-1966 secara menyeluruh. Wujudnya bisa berupa permintaan maaf pemerintah, bisa dengan segera mencabut peraturan perundangan yang diskriminatif terhadap korban dan keluarganya, atau bisa pula dengan mengungkapkan kebenaran sejarah. Tapi yang lebih penting adalah melakukan reparasi terhadap para korban dan keluarganya berupa pemberian rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi.

Pemerintah SBY punya peluang besar menyelesaikan persoalan ini. Apalagi SBY tak akan maju lagi menjadi kandidat presiden setelah 2014. Semuanya terpulang kepada Presiden bagaimana dia akan menggunakan kesempatan besar ini: menjadikannya *milestones* untuk menyelesaikan utang masa silam atau mewariskannya kepada pemerintahan mendatang. ●

SEBUAH PENGAKUAN DARI KERUMUNAN POHON KAPUK

BEBERAPA PELAKU PEMBUNUHAN ANGGOTA PKI DI PALU MENGAKU DAN MEMINTA MAAF KEPADA KORBAN. REKONSILIASI SEDANG DIRAJUT DI KOTA ITU.

TAK ada penanda apa pun di kerumunan pohon kapuk tak jauh dari jalan besar yang menghubungkan dua kelurahan, Loli dan Watusampu, di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tapi di tengah-tengah semak itulah tiga tokoh PKI dieksekusi dan dikubur pada Mei 1967. Mereka adalah Abd Rahman Maselo dan Hairi Ruswanto, masing-masing Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan Comite Daerah Besar PKI Sulawesi Tengah, serta Sunaryo, Ketua Pemuda Rakyat Sulawesi Tengah.

Ahmad Bantam, pensiunan tentara dengan pangkat terakhir sersan dua, tahu persis letak kuburan itu karena dialah yang menggalinya. Waktu itu, tutur lelaki kelahiran Ambon yang kini berusia 82 tahun ini, kuburan dia gali bersama dua rekannya atas perintah Kapten Umar Said, komandannya di Markas Komando Resimen 132 Tadulako di Jalan Sudirman, Palu.

Tiga petinggi PKI itu kemudian mereka jemput di penjara Donggala, lalu dibawa ke tempat galian. Ahmad diminta menjaga mobil, sedangkan Umar dan beberapa tentara lain turun sambil membawa tahanan. Beberapa menit kemudian Ahmad mendengar letusan senapan. "*Dorang* sudah tumbang," kata Ahmad dalam hati. Mobil kemudian melaju cepat kembali ke Palu dan Ahmad melihat ada bekas darah segar menempel di sekop di mobil itu.

Penelusuran Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa kuburan itu pernah digali pada 1977 dan kerangkanya dikuburkan kembali di samping gedung Korem. Tapi di samping kiri dan kanan gedung itu kini sudah berdiri gedung lain.

Ahmad memegang erat-erat rahasia itu selama puluhan tahun. Namun, makin tua

◄ **Lokasi** yang diperkirakan tempat eksekusi tiga petinggi PKI Sulawesi Tengah, antara wilayah Loli dan Watusampu.

usianya, beban itu makin menyesakkan dada. Apalagi dia dikambinghitamkan sebagai pembunuh para petinggi itu. Sebenarnya, pada 1977, saat diperiksa Detasemen Polisi Militer Palu, ia sudah menuturkan dengan jelas soal laporan hilangnya tiga petinggi PKI itu, tapi laporan tersebut hanya terkunci di arsip militer.

Akhirnya, Ahmad memutuskan mencari keluarga ketiga tokoh komunis itu pada 2006. "Saya beri tahu bahwa keluargamu bukan hilang, tapi sudah ditembak mati. Saya yang menggali kuburannya," ujar Ahmad. "Sebentar lagi saya meninggal. Saya tidak mau rahasia ini tidak dibuka, kasihan keluarga korban."

Pengakuan Ahmad ini seperti pentil dilepas dari ban bagi keluarga korban. "Lega, plong hati ini. Selama ini saya sudah ke mana-mana menanyakan keberadaan Bapak, ke Manado, Makassar, Jakarta, bahkan ke Cina dan Rusia," kata Maryam Labonu, istri Abd Rahman, yang kini berusia 74 tahun.

Sejak suaminya ditangkap, Maryam hidup bersama tiga anaknya yang berusia 8 bulan hingga 2 tahun, yakni Gagahrismus, Rulian, dan Gamal Bardi. Dia bersama anak-anaknya sempat ditahan selama setahun di sebuah penjara di Jalan Nusa Indah. Tak ada yang tersisa dari kejayaan suaminya sebagai tokoh partai, termasuk rumah besarnya di Jalan Jenderal Sudirman pun dilego orang. "Saya tak mempermasalahkan, yang penting jiwa ini tak diambil," kata bekas guru SD Negeri 10 Palu yang menghidupi keluarganya dengan berjualan kue hingga kini itu. Tapi, "Yang masih ada dalam benak saya, kenapa saya ditangkap? Apa salah saya?"

Ahmad sebenarnya juga mempertanyakan kenapa orang-orang PKI di sana ditangkap dan dibunuh. "Belasan tahun saya sebagai intel tidak pernah ada indikasi orang PKI Sulawesi Tengah mau memberontak. Itu sebabnya saya yakin orang dieksekusi itu tidak tahu masalah," katanya.

Ahmad juga memberikan pengakuannya kepada Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Sulawesi Tengah, termasuk laporan palsu yang dibuat Umar Said, yang menyatakan bahwa ketiga korban dieksekusi karena mencoba melarikan diri ke laut saat pamit buang air kecil. "Bagaimana mau lari, ikatannya pendek-pendek, dan ikatannya saling terkait ketiganya," kata Ahmad.

Sejak 2006, kelompok solidaritas ini mendata lebih dari seribu korban peristiwa 1965-1966 di provinsi tersebut. Empat di antaranya belum kembali, yakni tiga petinggi PKI yang dihabisi di Watusampu dan Zamrud, pemimpin PKI di Donggala. Kelompok itu lalu mencoba menggulirkan upaya rekonsiliasi antara para pelaku dan korban. Salah satunya dengan acara Dialog Terbuka Memperingati Hari Hak Korban Pelanggaran HAM atas Kebenaran dan Keadilan pada 24 Maret 2012 di Taman GOR.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Palu Rusdi Mastura secara terbuka meminta maaf kepada para korban atas kejadian di masa lalu. Rusdi bercerita, saat itu dia berusia 16 tahun dan bersekolah di SMA 1. Sebagai anggota Pramuka, dia disuruh kepala sekolahnya menjaga tempat-tempat tahanan di sekitar kota itu selama 1-2 bulan. "Jadi saya tahu peristiwa itu. Saya tahu Umar Said membunuh empat orang itu di Watusampu. Dalam perhitungan saya, dia hanya menutup belangnya dan akhirnya dia juga ditangkap," kata Rusdi, yang mengaku tak turut menyiksa para tahanan.

Dalam pidatonya, Rusdi mengatakan saat itu politik jadi panglima, dan peristiwa pemberontakan PKI di Madiun terus-menerus diangkat, sehingga timbul rasa dendam. Karena itu, "Sebagai pemerintah Kota Palu, saya minta maaf. Saya juga sebagai orang Masyumi dan bisa dikatakan pelaku juga pada saat itu karena ikut menangkap dan menjaga rumah tahanan," katanya.

Rusdi dan pejabat pemerintah Palu berjanji memberikan kesehatan gratis kepada keluarga korban dan beasiswa bagi anak-anak korban serta mendirikan monumen di lokasi kerja paksa PKI. Pada 1970-an, para tahanan dipaksa membuat sejumlah jalan dan gedung perkantoran di kota itu. "Ada 15 titik jalan yang dikerjakan orang PKI secara kerja paksa," kata Nurlaela Lamasitudju, Koordinator Solidaritas Korban.

AHMAD BANTAM: "SAYA BERI TAHU BAHWA KELUARGAMU BUKAN HILANG, TAPI SUDAH DITEMBAK MATI. SAYA YANG MENGGALI KUBURANNYA. SEBENTAR LAGI SAYA MENINGGAL. SAYA TIDAK MAU RAHASIA INI TIDAK DIBUKA, KASIHAN KELUARGA KORBAN."

Pelan-pelan rekonsiliasi mulai bergulir di kota itu. Setiap bulan, para korban dan pelaku bertemu. Para pelaku atau keluarganya mulai muncul dan meminta maaf. Misalnya Shinta, putri Darman Sura, seorang pensiunan polisi yang bertugas di Kepolisian Distrik Parigi pada masa 1965-1966. Shinta datang di pertemuan itu dan meminta maaf kepada korban atas nama bapaknya, karena bapaknya ternyata pernah memukul hingga gigi korban rontok. Seminggu kemudian, Darman meninggal. Pengakuan para pelaku itu telah menyemai benih rekonsiliasi di Palu. ●

SOAL STATISTIK KORBAN

ROBERT CRIBB, GURU BESAR POLITIK DAN SEJARAH ASIA DI AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY, CANBERRA

TAK ada angka pasti mengenai jumlah korban tewas dalam pembantaian 1965-1966. Perkiraannya berkisar dari 200 ribu sampai 3 juta jiwa. Jumlah yang paling mungkin sekitar setengah juta. Catatan resminya, jikapun ada, belum diterbitkan. Kita tahu bahwa sebagian tentara Indonesia mengawasi pembunuhan di beberapa wilayah Indonesia. Andai unit itu telah membuat laporan tentang pembantaian, hasilnya akan ada dalam arsip militer. Tapi banyak pembunuhan dilakukan di luar kerangka kerja resmi–di mana Partai Komunis Indonesia merupakan kekuatan signifikan, dan masyarakat tengah dilanda suasana ketakutan. Suasana ngeri ini timbul dari ketegangan dan ketidakpastian yang merajalela sebelum upaya kudeta.

Situasi itu timbul dari keyakinan yang meluas bahwa Partai Komunis telah merencanakan pembantaian musuh lokal mereka–menyusul kudeta di Jakarta. Keyakinan ini didorong propaganda tentara tentang penganiayaan para jenderal di Lubang Buaya, yang ternyata tidak benar. Milisi antikomunis mendapat dorongan serta bantuan dari pihak tentara dan kadang menerima pelatihan serta senjata. Banyak di antara mereka mengadakan operasi sendiri terhadap anggota PKI. Ini terutama terjadi di Jawa Timur–di mana unit Barisan Ansor Serbaguna bertanggung jawab atas pembunuhan banyak anggota PKI.

Dari daerah lain–Timor, Lombok, dan Medan–juga ada laporan tentang milisi yang melakukan banyak pembunuhan. Tak semua orang yang hilang tewas. Menyadari risiko menjadi korban, banyak yang mencoba melarikan diri. Beberapa ditangkap, dipenjarakan, atau dibunuh. Ada yang tak diketahui jejaknya dan menjalani hidup baru di tempat-tempat lain di negeri ini. Sebagian besar orang ini–sejauh yang kita tahu dari beberapa cerita–sulit hidupnya dan menjadi masyarakat pinggiran.

Pada Desember 1965, banyak sekali orang tewas di Pulau Jawa. Presiden Sukarno mengirimkan Komisi Pencari Fakta yang dipimpin Menteri Oei Tjoe Tat untuk menyelidiki jumlah korban. Kerja Komisi tidak lancar karena pembantaian masih berlangsung dan akses ke daerah terbatas. Komisi pun takut terhadap pembalasan tentara kalau mereka mencantumkan jumlah korban yang tinggi. Karena itu, angka Komisi Pencari Fakta–78 ribu korban jiwa–tak bisa dipercaya.

Belakangan, seorang anggota Komisi mengatakan jumlah korban sebetulnya sepuluh kali lipat dari yang dipublikasikan. Satu laporan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada 1966–yang disusun atas dasar survei sejumlah "lulusan universitas"–menyebutkan angka korban tewas sekitar 1 juta orang. Sepuluh tahun kemudian, Komandan Kopkamtib Laksamana Sudomo merevisi angka ini menjadi setengah juta. Pada 1989, mantan Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (sekarang Komando Pasukan Khusus) Brigadir Jenderal Sarwo Edhie Wibowo menyebut jumlah korban sebanyak 3 juta. Dan para aktivis kiri memberi angka 2 juta jiwa.

Sayang, kita tak bisa mengandalkan perkiraan-perkiraan di atas karena orang-orang yang mengeluarkannya punya alasan mendistorsi angka. Kaum kiri membesar-besarkan skala pembantaian untuk menekankan kesalahan para pelaku. Para penentang komunis juga punya alasan: angka yang tinggi akan menegaskan bahaya Partai Komunis bagi masyarakat Indonesia, angka yang rendah akan mengurangi kesalahan mereka.

Pada saat pembunuhan, tak ada yang mau menghitung mayat korban. Selama periode Orde Baru dan di era reformasi, tak ada kemungkinan menggali kuburan secara sistematis untuk membuat sensus kematian yang berarti, seperti yang terjadi di Kamboja. Memori saksi untuk keperluan statistik juga sulit digunakan. Kenangan orang sering bermasalah, membingungkan, dan detailnya tak dapat diandalkan.

Kita harus mengandalkan keadaan waktu itu. Misalnya, PKI mengklaim keanggotaannya 3 juta orang (mungkin angka ini bersumber dari estimasi Sarwo Edhie), tapi sebagian besar pengamat memperkirakan jumlah aktivis partai itu sekitar setengah juta, dengan puluhan ribu di organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan PKI. Partai Komunis Indonesia hancur karena pembantaian. Beberapa pemimpinnya mendirikan basis perlawanan di Blitar, sedangkan yang lain berhasil bertahan dalam persembunyian atau di pengasingan. Tapi secara keseluruhan partai itu dibasmi.

Jika kita membandingkan catatan sensus 1961 dengan 1971, amat sulit menemukan jejak demografi pembantaian. Populasi Ponorogo, misalnya, tempat pembantaian luas terjadi, agak kecil pada 1971 dibandingkan dengan angka yang semestinya–jika populasinya meningkat secara normal sejak 1961. Namun Kediri, tempat beberapa pembantaian paling biadab terjadi, mengalami tingkat pertumbuhan penduduk yang sehat. Jikapun ada kesenjangan di daerah tertentu akibat pembunuhan, hal itu tampaknya telah diisi migrasi.

Pembunuhan cukup parah di beberapa tempat menyisakan desa-desa yang berisi janda dan anak-anak, menimbulkan kekurangan guru–hingga level kritis–di sebagian besar wilayah Jawa (banyak guru didominasi serikat guru komunis), dan membatasi kegiatan kebudayaan di Bali karena pembunuhan banyak anggota Lekra.

Pada akhirnya, kita tak dapat menemukan bukti yang menunjukkan jumlah kematian di seluruh Indonesia lebih tinggi dari sekitar setengah juta jiwa. ●

PENGAKUAN ANWAR CONGO

Untuk pertama kalinya dalam sejarah film Indonesia, sebuah film dokumenter menampilkan pengakuan seorang algojo PKI. Namanya Anwar Congo. Ia preman bioskop Medan. Dalam film *The Act of Killing* yang dibesut sutradara Joshua Oppenheimer itu, ia memperagakan ulang kekerasan-kekerasan yang pernah dilakukannya.

Film itu menampilkan kesadaran Anwar tentang bagaimana menjadi seorang pembunuh dan bagaimana seandainya menjadi korban yang dibunuh. Saat *The Act of Killing* diputar di Festival Film Toronto, pers Barat menyebut film itu mengerikan dan mengguncang batin. Itu karena Anwar tampak bangga dengan tindakannya. Bisakah film ini mengubah cara pandang masyarakat Indonesia tentang sejarah kelam 1965?

Film *The Act of Killing*.

CARLOS ARANGO DE MONTIS/THEACTOFKILLING.COM

DARI SERDANG BEDAGAI SAMPAI MEDAN

FILM *THE ACT OF KILLING* MENGGUNCANG FESTIVAL FILM TORONTO. BAGAIMANA JOSHUA OPPENHEIMER BISA MENEMUI PARA PEMBANTAI PKI DI SUMATERA DAN BERKENALAN DENGAN ANWAR CONGO?

FESTIVAL Film Telluride di Colorado, Amerika Serikat, awal September lalu. Begitu film dokumenter *The Act of Killing* (*Jagal*) selesai diputar, seorang perempuan bergegas menemui sang sutradara, Joshua Oppenheimer.

Perempuan itu kelihatan seperti habis menangis. Kepada Oppenheimer, ia berkata, "Film yang kamu buat bukan cuma tentang Indonesia. Film ini tentang kita semua."

Seminggu setelah diputar di Colorado, *The Act of Killing* ditayangkan perdana di Festival Film Internasional Toronto, Kanada (6-16 September). Sejumlah media mencatat *The Act of Killing* sebagai salah satu film favorit di antara 300 film yang diputar. Film ini sekaligus dipandang sebagai film yang mengerikan dan mengguncang batin.

Film ini mengisahkan Anwar Congo, seorang preman bioskop di Medan yang di masa mudanya, pada 1965-1966, tanpa belas kasihan menjadi pembantai utama orang-orang Partai Komunis Indonesia di kota itu. Dalam film, penonton bisa melihat bagaimana Anwar tanpa tedeng aling-aling menceritakan keganasannya.

•••

BAGAIMANA bisa Oppenheimer sampai ke Sumatera dan kemudian bertemu dengan Anwar Congo? Oppenheimer menginjak Sumatera pada 2001. Saat itu, ia membuat film dokumenter mengenai buruh perkebunan sawit di kawasan Matapao, Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

"Saya ingin mengangkat persoalan mereka, seperti kesulitan membentuk serikat buruh," kata Oppenheimer mengenang.

Oppenheimer ingat, selama pembuatan film itu, ia mendapatkan fakta menarik. Para buruh tersebut ternyata hidup bertetangga dengan orang-orang yang banyak membunuh buruh PKI pada 1965-1966. "Mereka bertetangga dengan jagal yang membunuh bapak, paman, dan bibi mereka sendiri," ujarnya.

Pada satu kesempatan, Oppenheimer berbincang-bincang dengan salah satu jagal. Jagal itu bercerita bagaimana dia membunuh anggota serikat buruh yang berafiliasi dengan PKI–dengan perincian yang mengerikan. "Bayangkan, ia bercerita di depan cucu perempuannya yang berusia 9 tahun," kata Oppenheimer.

Oppenheimer mengaku terpana oleh ke-

Pasar Pekan Minggu, Desa Pematang Setrak, dekat Simpang Matapao.

terbukaan jagal ini. Setelah menyelesaikan film buruh perkebunan, ia kembali ke Inggris. Tapi ia kemudian memutuskan balik ke Sumatera untuk membuat film tentang para algojo tersebut. Ia kembali ke Matapao pada 2004.

Pada Februari tahun itu, Oppenheimer memfilmkan mantan pemimpin pasukan pembunuh bernama Amir Hasan yang tinggal di Kecamatan Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai. Amir ternyata seorang penulis buku. Ia mencatat semua pengalamannya mengganyang orang-orang PKI di Teluk Mengkudu dalam sebuah stensilan 100 halaman berjudul *Embun Berdarah*. Di stensilan itu, ia menceritakan secara detail pemberantasan PKI di Teluk Mengkudu. Oleh Amir, Oppenheimer diberi stensilan itu.

•••

TEMPO berusaha menemui Amir Hasan. Dari Medan, *Tempo* naik mobil ke arah timur, sekitar dua jam, ke Teluk Mengkudu. Tapi, saat *Tempo* mendatangi rumah Amir, Jumat pekan lalu, ternyata ia sudah meninggal–tiga tahun lalu. Anak bungsunya, Zulfansyah, mengaku tidak tahu ayahnya menulis apa yang terjadi di Teluk Mengkudu pada 1965-1966 itu. Zulfansyah menaruh curiga terhadap kedatangan *Tempo*.

Tempo memperoleh stensilan *Embun Berdarah* dari Yohana, 59 tahun, kerabat Amir. "Ini cerita tentang kampung di sini," katanya. Dalam buku ini, Amir mencatat, di seluruh Kecamatan Teluk Mengkudu pada 1965 itu ada 702 orang yang terlibat PKI. Amir menyertakan daftar nama warga desa yang menjadi anggota PKI berikut *onderbouw*-nya, seperti Barisan Tani Indonesia, Serikat Buruh Perkebunan Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, dan Pemuda Rakyat.

Amir menulis, dia bersama rekannya banyak mengambil orang PKI yang ditahan di penjara Tanjang Kasau. Misalnya, ia mencatat seperti ini. Pada 22 Februari 1966, pukul 22.00, mereka memenggal leher seorang anggota PKI bernama Tris, yang mereka cokok dari penjara Tanjung Kasau. Seorang rekannya bernama Marik mengeksekusi, *crokkk...*, leher Tris putus dari badan.

Tempo bertemu dengan warga Teluk Mengkudu bernama Maeran yang mengenal Amir. Maeran pada masa itu menjadi anak buah Amir. Maeran bercerita operasi dikendalikan dari sebuah pos jaga di Simpang Matapao, persimpangan antara Jalan Lintas Timur Sumatera dan jalan masuk ke Pematang Setrak. "Kami berkumpul di situ," katanya.

•••

SETELAH memfilmkan Amir Hasan, Oppenheimer bertemu dengan banyak tokoh jagal lain. Pada 2005, Oppenheimer berkenalan dengan Anwar Congo. Anwar dikenal sebagai preman bioskop. Dia dulu menguasai pasar gelap karcis di Medan Bioskop.

Oppenheimer menemukan bukti bahwa anggota pasukan pembunuh di Medan pada 1965 rata-rata direkrut dari preman bioskop. Ini terjadi karena preman bioskop membenci kaum kiri lantaran mereka memboikot film-film Amerika. Film Amerika pada saat itu adalah film yang paling menguntungkan bagi para preman pencatut karcis. Warga Medan saat itu menggemari film Amerika. Di Medan, sampai ada *fans club* James Dean yang punya banyak anggota berdandan dan berlagak layaknya James Dean. Pemboikotan film Amerika berarti penurunan penghasilan bagi preman bioskop.

Oppenheimer juga berkenalan dengan Adi Zulkadry, kawan sepermainan Anwar sejak masih remaja. Bersama Adi dan beberapa teman lain, Anwar melakukan penangkapan, penculikan, interogasi, penyiksaan, pembunuhan, serta pembuangan mayat di Medan. Mereka membentuk pasukan pembunuh yang terkenal dan ditakuti di Medan, yaitu Pasukan Kodok.

Pasukan ini berada di bawah koordinasi organisasi sayap pemuda partai Ikatan Perintis Kemerdekaan Indonesia, yang didirikan Jenderal A.H. Nasution: Pemuda Pancasila. Di Pemuda Pancasila, Anwar bisa dikatakan salah satu pendiri dan pinisepuhnya. Adi Zulkadry sendiri pernah aktif dan menjadi bendahara Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Namun, karena konflik pribadi dengan sesama anggota, Adi keluar dari organisasi. Walau demikian, persahabatannya dengan Anwar tidak pernah putus.

"Saya memperkenalkan diri kepada mereka sebagai sutradara film dengan keinginan membuat sebuah dokumenter tentang pengalaman hidup mereka dan sejarah penumpasan PKI pada 1965-1966," kata Oppenheimer. Menurut Oppenheimer, saat syuting kadang Anwar menyampaikan rasa khawatirnya akan adanya aksi balas dendam dari keluarga korban. Tapi Anwar selalu yakin bahwa dia dan rezim di Indonesia telah menciptakan ketakutan dan kepasrahan yang sedemikian rupa sehingga keluarga korban tidak akan melakukan balasan apa pun.

Oppenheimer menceritakan, dalam setiap tahap proses pembuatan film, mulai wawancara hingga syuting, ia selalu berdiskusi dan menjelaskan kepada para kru apa yang sedang mereka kerjakan dan apa tujuannya. "Pendekatan yang saya ambil sebetulnya mendudukkan saya lebih banyak sebagai fasilitator dan pengawal teknis," ujarnya.

Menurut Oppenheimer, gagasan mengenai bagaimana adegan harus dibuat, dan dengan kostum seperti apa, lebih banyak datang dari para peserta. *The Act of Killing* bukanlah film yang berangkat dari sebuah skrip atau *outline* tertentu. Film ini justru mengandalkan tangkapan atas peristiwa-peristiwa *candid*, spontan, bahkan emosional yang tidak bisa diprediksi. "Modal saya hanyalah kesabaran dan membiarkan kamera terus merekam," katanya.

Untuk membantu Anwar menuangkan fantasinya, Oppenheimer mempertemukan Anwar dengan kawan lamanya, Ibrahim Sinik, pemilik harian *Medan Post*–yang lantai atas kantornya sering digunakan Anwar untuk melakukan pembantaian.(Ibrahim Sinik sendiri pernah memproduksi film *Batas Impian*, pada 1974, yang dibintangi artis pendukung Camelia Malik).

"Saya tidak menyalahkan Anwar. Saya berterima kasih atas kejujurannya. Pembuatan film ini, betapapun demikian, melalui proses yang menyakitkan," ujar Oppenheimer kepada *Tempo*. Ia mengatakan respons penonton di Toronto dan Telluride yang tersentuh oleh film *The Act of Killing* sangat berarti baginya. "Melalui penontonlah saya dapat meredakan sakit yang saya rasakan selama beberapa tahun terakhir ini saat memfilmkan Anwar," katanya. •

KESAKSIAN BINAL-BUGIL DARI REPUBLIK PREMAN

ENAM bulan sebelum Partai Komunis Indonesia dinyatakan sebagai partai terlarang, ratusan ribu orang Indonesia sudah dibunuh dengan tuduhan mendukung komunisme. Kurang dari setahun kemudian, jumlah korban nyawa mencapai sekitar satu juta. Derita berlanjut puluhan tahun bagi keluarga korban yang masih hidup. Hingga kini.

Yang masih samar bagi banyak orang, bagaimana pembantaian massal 1965-1966 itu dipahami oleh pembunuhnya sendiri. Atau di mana dan bagaimana sekarang kehidupan mereka sehari-hari.

Berbagai film tentang pembantaian 1965 dan dampaknya (baca "Film, Teror Negara, dan Luka Bangsa" dalam edisi ini) dapat dibagi dua jenis. Semuanya bungkam tentang para pembunuh itu. Jenis pertama, film propaganda, disponsori rezim antikomunis Orde Baru. Dalam film jenis ini, kejahatan *terhadap* kaum komunis ditampilkan secara terbalik menjadi kisah kejahatan *oleh* komunis. Tak ada adegan pembantaian terhadap komunis selama beberapa bulan sesudahnya.

Jenis kedua, sebut saja film gugatan, berwujud film dokumenter pasca-1998 yang menampilkan kesaksian korban dan keluarga yang selamat dari pembantaian 1965. Bagi mereka, neraka adalah hidup di Indonesia sesudah 1965 sebagai orang atau anggota keluarga yang dituduh komunis, pernah ditahan bertahun-tahun, walau tanpa pernah diadili dan dibuktikan bersalah. Dalam film jenis ini, kekejaman Orde Baru dikecam, tapi sosok para algojo 1965 tidak tampil.

Kini, untuk pertama kalinya, sosok dan suara otentik beberapa pembantai 1965-1966 tampil di layar lebar sebagai tokoh utama. Sebuah film dokumenter berjudul *The Act of Killing (Jagal)* berisi kesaksian terperinci dan blak-blakan dari sejumlah tokoh preman yang memimpin pembantaian lebih dari 10 ribu tersangka komunis di Sumatera Utara. Mereka bersaksi secara sukarela dengan mengobral cerita, contoh peragaan, tawa, nyanyian, dan dansa-dansi. Kejahatan mereka juga dirayakan dalam siaran *talkshow* di *TVRI* lokal dan tepuk tangan!

Menyaksikan film jenis pertama dan kedua menguras emosi. Tapi tidak ada artinya jika dibandingkan dengan pengalaman menyaksikan *Jagal*. Di sini nalar dan norma moralitas yang lazim kita kenal seperti dipelintir dan dijungkir-balikkan habis-habisan.

Jagal hasil kerja keras sutradara Joshua Oppenheimer bersama awak produksinya selama tujuh tahun, yang menghasilkan rekaman kasar sepanjang ratusan jam. Atas kebaikan sutradara, saya sempat menyaksikan beberapa versi kasar dari film ini dalam dua tahun terakhir proses produksi, sebelum hasil akhirnya diluncurkan. Inilah film paling dahsyat, dan secara politis terpenting, tentang Indonesia yang pernah saya saksikan.

Film ini berbicara tentang titik terpenting dari seluruh sejarah Republik Indonesia. Hadirnya film ini sendiri merupakan sebuah peristiwa bersejarah yang sulit dicari duanya. Satu-satunya bandingan yang layak disebut adalah empat novel karya Pramoedya Ananta Toer pada 1980-an selepas dari pembuangan di Pulau Buru: *Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah*, dan *Rumah Kaca*.

Novel-novel Buru melacak awal terbentuknya bangsa-negara Indonesia. Film dokumenter *Jagal* bersaksi tentang hancurnya sendi dasar bangsa-negara ini di tangan pembantai Indonesia sendiri. Yang ikut dihancurkan dalam peristiwa itu adalah salah satu kekuatan sosial yang melahirkan Indonesia, yakni komunisme. Di atas bukit mayat rekan-sebangsa itulah dibentang karpet merah bagi pertumbuhan dua kekuatan pesaing komunisme, yakni kapitalisme yang berjaya sejak 1966, dan politik Islamisasi sejak 1990-an.

Sesudah 1965, dua generasi anak Indonesia menjadi mangsa teror negara, propaganda antikomunisme, serta pembodohan nasional. Mereka dibesarkan sebagai makhluk cacat, yakni buta sejarah. Ada beberapa yang tumbuh kritis, tapi mayoritas generasi ini gamang menghadapi berbagai peristiwa mutakhir di sekitarnya. Misalnya, menyaksikan aparat negara di garis terdepan penegakan hukum ternyata paling ganas memperkosa hukum untuk menjarah harta negara.

Dari generasi ini pula bisa dijumpai mereka yang dengan lugunya berharap aparat

THE ACT OF KILLING (JAGAL)
Sutradara: Joshua Oppenheimer
Produksi: Final Cut for Real, Denmark
Durasi: 117 dan 159 menit

negara menindak organisasi preman yang melakukan kekerasan di berbagai tempat umum. Seolah-olah negara RI pasca-1965 dan premanisme dua hal yang terpisah, dan kepentingan mereka bertentangan. Dengar ucapan santai seorang gubernur yang akrab dengan dunia preman, dan dituturkan khusus untuk *Jagal*: "Ajaran komunis itu tidak bisa diterima di Indonesia. Karena di sini banyak preman." Menurut peneliti Loren Ryter, hampir separuh parlemen pasca-Orde Baru diisi mereka yang berlatar belakang organisasi kepemudaan dan preman.

Oppenheimer tidak berniat menggugat sejarah palsu, dan mengajukan secara utuh sebuah kebenaran sejarah lain sebagai gantinya. *Jagal* menjelajahi beberapa wilayah di mana fakta dan fiksi, nilai benar atau salah, kadang-kadang bercampur-aduk dan saling teranyam.

Seperti Toer, Oppenheimer sadar bahwa medium yang mereka pakai bukan alat netral untuk berkisah tentang kebenaran sejarah. Dalam filmnya, Oppenheimer bertindak lebih radikal ketimbang Toer dalam dua hal. Pertama, *Jagal* menampilkan secara binal dan bugil ironi terbesar dalam seluruh wacana dominan tentang pembunuhan 1965, juga tentang kebangsaan dan keadilan. Kedua, semua keberhasilan itu dicapai *Jagal* berkat metode pembuatan film yang dipilih secara jenius dan berani oleh sutradaranya. Kedua faktor ini akan saya jelaskan satu per satu.

Film-film propaganda Orde Baru menutupi fakta kejahatan berat atas kemanusiaan. Sejumlah film dokumenter pasca-Orde Baru membongkar kejahatan itu. Kedua upaya itu menjadi mubazir dengan tampilnya *Jagal*.

Dalam *Jagal*, secara santai para pembantai 1965 mengumbar kebanggaan bersaksi tentang kekejaman yang mereka lakukan. Sambil mengejek film *Pengkhianatan G30S/PKI* (Arifin C. Noer, 1984) yang dianggap menyesatkan, mereka bersaksi pernah melakukan kejahatan yang jauh lebih keji daripada yang dituduhkan para korban dalam berbagai film dokumenter terdahulu.

Seorang tokoh dalam *Jagal* mengaku: "Yang kejam itu bukan PKI.... Yang kejam kita, ha-ha-ha...." Klaim itu mereka buktikan dengan berkisah terperinci, mempertontonkan alat-alat yang mereka pakai untuk membantai, tahap demi tahap pembantaian, dan reka ulang tindak kejahatan di beberapa lokasi kejadian yang mereka lakukan sendiri.

Jagal bukan sekadar kisah pembantaian 47 tahun lalu. Sejumlah adegan hasil rekaman di lapangan menunjukkan mesranya para pembantai 1965 dengan pejabat negara pasca-Orde Baru, baik di tingkat nasional (DPR, kepresidenan, kementerian negara) maupun daerah (DPRD, gubernur, media cetak, dan *TVRI* lokal). Film ini bersaksi tentang kesinambungan mulus praktek jagal politik, hukum, dan ekonomi masa kini, setengah abad setelah PKI dibinasakan. Penyakit kronis yang diidap bangsa ini nyaris telah merata menjadi milik dan tanggung jawab nasional.

Dunia mencatat pembantaian 1965 sebagai salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah modern. Yang lebih memualkan, dan gamblang dalam *Jagal*, sebagian besar pembunuh itu memamerkan impunitas yang mereka nikmati. Bahkan mereka menduduki berbagai jabatan pemerintahan. Sebagian tidak cukup puas hidup berlimpah kuasa dan harta, mereka masih menuntut dihormati sebagai pahlawan.

Semua itu dicapai *Jagal* berkat keberanian Oppenheimer memilih sebuah metode pembuatan film yang penuh risiko. Para pembantai 1965 bukan sekadar narasumber yang jadi obyek di depan kamera, seperti sebagian besar film bertema 1965. Para pembantai itu diajak terlibat langsung dalam pembuatan film, dengan membuat kisah fiksi mereka sendiri berdasarkan ingatan, khayalan, angan-angan, dan tanggapan mereka di masa kini atas kekejaman yang mereka lakukan dulu. Metode ini tidak dipilih secara iseng, tapi telah teruji dalam karya Oppenheimer sebelumnya, *The Globalization Tapes* (2003), tentang nasib kaum buruh perkebunan di Sumatera.

Mereka diberi kebebasan penuh untuk menyusun cerita, menjadi bintang utama, serta memilih pemain pendukung, musik latar, *setting*, kostum, dan pengambilan gambar. *Jagal* merupakan sebuah film dokumenter tentang pembuatan film fiktif oleh para pembantai 1965, tentang kejahatan faktual mereka sendiri. Dalam *Jagal* ditunjukkan kesibukan mereka mencari pemain, berlatih akting, hingga membahas dampak film ini bagi Indonesia dan dunia.

Sebuah fantasi absurd seorang pembantai disertakan dalam *Jagal* dalam adegan bangkitnya sebagian arwah korban 1965. Mereka menghampiri si tokoh jagal di sebuah tempat nan indah-permai, bukan untuk mengutuk atau membalas dendam. Tapi menyampaikan ucapan terima kasih dan menyematkan medali, karena pembantaian 1965 menghantar nyawa mereka ke surga. Menurut kesaksian si jagal, dalam kehidupan nyata arwah korban itu hadir dalam mimpi buruk yang menyiksa.

Terjadi pula sejumlah peristiwa tak terduga yang jeli direkam dalam *Jagal*. Misalnya, ketika seorang pembunuh 1965 berperan sebagai korban yang 47 tahun lalu disiksa dan dibunuhnya sendiri.

Jagal jauh lebih rumit, kaya nuansa berlapis, penuh kejutan-kontradiksi-dan-perubahan pada tokohnya ketimbang yang kita jumpai dalam berbagai film lain dengan tema serupa, atau film mana pun. Film ini membuka ruang bagi kajian kritis atas beberapa masalah terpenting dalam sejarah republik ini, bahkan sejarah manusia umumnya, juga makna film dokumenter, tanpa mendesakkan sebuah pesan tunggal kepada penontonnya.

● ARIEL HERYANTO,
ASSOCIATE PROFESSOR, AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY

Adegan dalam film *The Act of Killing.*

ALGOJO DAN NARASUMBER SKRIPSI

IA memajukan kakinya satu langkah, kemudian memundurkannya lagi, sambil menggoyang-goyangkan tangannya ke atas. Dengan kemeja pantai hijau dan celana putih, Anwar Congo menari-nari. "Ca... ca... tita... tita... hei... hei...," badannya dengan luwes menari-nari.

"Dia ini suka joget," kata Syamsul Arifin, bekas Gubernur Sumatera Utara, tentang sosok Anwar, seperti terekam dalam fim *The Act of Killing* garapan Joshua Oppenheimer. Meskipun gemar joget, Anwar ternyata orang yang ditakuti. "Dia itu *serem*, ditakuti karena ikut *grekkk*...," kata Syamsul sambil menyilangkan jari ke leher.

Bagi Anwar, menari adalah cara untuk menyenangkan diri sesudah membunuh. Ini menjadikannya sebagai sosok pembunuh berdarah dingin. Disertai alunan musik, ditambah sedikit alkohol, mariyuana, sedikit ineks, Anwar sudah siap terbang, "*Fly..., happy*, ca... ca... ca...," katanya sembari mengentakkan kakinya.

Menurut Oppenheimer, Anwar sering diajak berdansa-dansi di berbagai tempat hiburan malam dan diskotek di Medan. "Teman-temannya tahu bahwa Anwar pedansa ulung," katanya kepada *Tempo*. Menurut Joshua, mengapa dia mudah menampilkan pengakuan Anwar di film lantaran Anwar punya obsesi: ingin menunjukkan perannya pada 1965-1966. "Kita harus tunjukkan inilah kita. Kita tidak perlu dalam film-film yang besar," seperti kata Anwar dalam film.

Namun belum juga film tersebut diedarkan dan ditonton secara luas di Tanah Air, Anwar tampak menciut. "Saya belum siap, ujung-ujungnya saya yang menderita," katanya saat *Tempo* mendatangi rumahnya di Lingkungan 17 Medan Area, Medan, beberapa pekan lalu. Anwar tampaknya ragu-ragu menjadi "selebritas". Dia enggan menjelaskan keterlibatannya dalam film tersebut. "Saya belum mau bercerita tentang film itu. Capek. Saya ditelepon dari mana-mana," katanya.

Raut wajahnya tak banyak berubah dibandingkan dengan saat ia tampil di *The Act of Killing*. Rambutnya uban perak dengan kulit hitam sedikit berminyak. Siang itu dia hanya menggunakan kaus oblong lusuh dan celana pendek kuning. "Kalian ini usil, *gak* usah tanya-tanya," katanya.

Sikapnya ini berbeda jauh dibanding saat dia menjelaskan caranya menghabisi orang-orang PKI. Dengan mengambil lokasi lantai atas kantor *Medan Post*, Anwar, misalnya, dengan tenang menunjukkan bagaimana dia membunuh orang PKI. Dengan sigap dia memperagakan: seorang kawannya ia dekatkan ke tiang, lalu seutas kawat dia lilitkan ke leher. Kawat itu kemudian ditarik. "Ini supaya tidak ada darahnya," katanya. "Ini saya tiru dari film-film gangster."

•••

IA lahir di Pangkalan Brandan dengan nama Anwar. Menurut Oppenheimer, marga ayahnya adalah Matulessy. Tapi, karena dia membantu pasukan TNI yang akan dikirim ke Kongo, dia mendapat julukan Congo. Jadilah namanya Anwar Congo.

Anwar menikahi Salmah pada 1983. Salmah mengetahui bahwa Anwar adalah preman Medan. "Saya sudah kenal dia 14-15 tahun sebelum nikah," katanya. Menurut Salmah, ibu Anwar berasal dari Banten. Anwar lebih dekat dengan keluarga ibunya. "Dia lebih condong ke Banten, kayaknya *gak* pernah kumpul sama keluarga bapaknya," katanya.

Salmah menilai suaminya adalah sosok romantis. Suaminya itu, kata Salmah, sejak muda suka bunga. "Enggak peduli berapa harganya, dia beli," katanya. Anwar juga suka ikan. Di teras ada akuarium besar, seluas 1 x 5 meter. Akuarium itu berisi ikan koi. Menurut Salmah, suaminya sangat rajin membersihkan kolamnya itu. "Dia *gak* mau *jualin* telur, padahal telurnya banyak," kata Salmah.

Pada masa tuanya, Anwar sering menghabiskan waktunya bertemu dengan teman-teman lamanya di kantor Eksponen 66, Laskar Ampera, atau kantor Pemuda Pancasila Sumatera Utara. "Dia orang yang mudah bergaul, baik di kalangan preman maupun pengusaha di Medan," kata Oppenheimer.

Anwar, menurut Salmah, juga sibuk menerima pelajar dan mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. "Katanya mereka sedang membuat skripsi," ujarnya. Sebagai sesepuh Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Anwar dinilai mengetahui banyak hal tentang sejarah. •

ARIEL HERYANTO, ASSOCIATE PROFESSOR, AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY

FILM, TEROR NEGARA, DAN LUKA BANGSA

BAYANGKAN seandainya separuh mahasiswa Indonesia bersumpah tidak pernah mendengar nama Golkar atau Sukarno. Pengandaian itu sama absurdnya dengan isi laporan jurnalistik Armando Siahaan (*Jakarta Globe*, 30 Juni 2009). Lebih dari separuh dari sejumlah mahasiswa Jakarta yang diwawancarainya mengaku seumur hidup belum pernah mendengar adanya pembantaian besar-besaran di Indonesia pada 1965-1966.

Ada kiasan, ikan yang hidup di air tak tahu apa artinya air. Bukan masalah seandainya semua ikan hidup di air bersih dan sehat. Masalahnya, hampir setengah abad terakhir masyarakat Indonesia ibarat ikan hidup dalam air beracun. Racun yang tidak terlihat pemiliknya itu bernama militansi kebencian dan normalisasi kejahatan: penipuan, fitnah, penyangkalan, pembantaian, pemerkosaan, dan penjarahan. Asal-usulnya bisa dilacak jauh ke masa lampau, ke masa kolonial atau sebelumnya. Tapi pembantaian 1965-1966 merupakan faktor terkuat dan paling mutakhir yang ikut membentuk watak dan luka kehidupan sosial Indonesia masa kini.

Dunia mencatat pembantaian 1965-1966 sebagai salah satu peristiwa paling biadab dalam sejarah modern. Tapi, di negerinya sendiri, peristiwa itu lenyap dari buku teks sejarah dan diskusi publik. Mayoritas generasi pelaku, korban, dan saksi mata cenderung bungkam. Dua generasi pasca-1965 menjadi korbannya. Mereka menderita buta sejarah tentang masyarakat sendiri, walau bersekolah hingga ke perguruan tinggi. Dalam kebutaan, berkali-kali mereka gagap, atau ikut-ikutan kalap, ketika berkobar militansi kebencian dan kekerasan komunal dalam skala yang sulit dicari duanya sebelum 1965.

Tulisan ini berupaya menengok kembali sejarah terorisme negara sejak 1965, dan pentingnya peran film dalam sejarah tersebut. Juga akan dicatat beberapa upaya sineas pasca-1998 untuk menggugat sejarah 1965 yang dengan sengaja dikubur atau dipalsukan oleh negara.

▸ Bukan Kudeta Terselubung?

Jumat malam, 4 November 1988, sejumlah pejabat tinggi negara menemani Presiden Soeharto di Istana Negara, menyaksikan pemutaran awal film *Djakarta 1966* (Arifin C. Noer, 1982). Film ini berkisah tentang lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar). Dalam pidatonya, Soeharto berkali-kali mencoba meyakinkan hadirin, mungkin juga dirinya sendiri, bahwa Supersemar bukan "kup militer terselubung yang dilakukan TNI.... Sama sekali tidak pernah dan tak akan terjadi TNI melakukan kup untuk merebut kekuasaan dalam pemerintahan". Film sepanjang 3 jam 20 menit itu diproduksi lembaga negara (Pusat Produksi Film Nasional, PPFN) dengan tujuan "menghilangkan citra seolah-olah militer pernah mengkup Bung Karno" (*Kompas*, 6/11/1988).

Yang layak dipertanyakan: bukan saja apa yang terjadi di Jakarta pada 1966, tapi mengapa 22 tahun kemudian Soeharto merasa perlu menyatakan sanggahan dan pembelaan diri? Mengapa pesan serius itu disampaikan melalui film?

Supersemar ditandatangani Presiden Sukarno di Bogor, setelah ia mengikuti saran penasihatnya untuk menjauh dari ancaman serbuan militer terhadap Istana di Jakarta. Dalam keadaan terasing dan menderita tekanan dari dalam dan luar negeri, di Bogor, Sukarno menerima kunjungan Mayjen M. Panggabean, Mayjen B. Rachmat, Brigjen A. Machmud, dan Brigjen M. Yusuf. Kunjungan itu menghasilkan Supersemar. Isinya memberi wewenang kepada Mayjen Soeharto untuk memulihkan keamanan, melaksanakan kebijakan Presiden Sukarno, serta menjaga keamanan pribadi Presiden Sukarno sendiri.

Menurut seorang saksi mata, dalam pertemuan di Bogor itu Sukarno dipaksa menandatangani Supersemar di bawah todongan senjata Brigjen B. Rachmat. Saksi mata itu Soekardjo Wilardjito, letnan dua dan perwira jaga Istana Bogor. Ia mendampingi Sukarno menerima empat tamunya. Ketika Sukarno ditodong senjata, ia mencabut senjatanya sendiri, berusaha membela Sukarno. Tapi Sukarno mencegahnya. Presiden memilih menandatangani surat yang sebelumnya ditolaknya karena berkop surat militer, bukan kepresidenan.

Keesokan malamnya, Istana Bogor dibersihkan petugas militer. Soekardjo ditahan selama 14 tahun dan disiksa hingga cacat fisik. Ia pernah diadili dengan tuduhan menyebarkan kabar bohong. Namun Pengadilan Negeri Yogyakarta (November 2006), dikuatkan Mahkamah Agung (Agustus 2007), menyatakan Soekardjo tidak bersalah (*Koran Tempo*, 25/6/2008).

Hingga hari ini, naskah asli Supersemar dinyatakan hilang (*Kompas*, 11/3/2010).

Salah satu adegan film *Pengkhianatan G30S/PKI*.

Terlepas sejauh mana kesaksian Soekardjo lengkap dan benar, Soeharto menggunakan Supersemar bertolak belakang dari niat Sukarno. Menurut Magnis-Suseno, yang mengaku antikomunis, "Supersemar menjadi legitimasi pengambilalihan kekuasaan oleh Soeharto.... Ia langsung melarang Partai Komunis Indonesia dan segera–tanpa menghiraukan protes Presiden Sukarno–menangkap sekitar 12 menteri Kabinet 100 Menteri, lalu membentuk kabinet baru. Sejak tanggal itu, kekuasaan efektif di negara RI terletak di tangan Soeharto" (*Kompas*, 11/3/2011).

PKI dinyatakan terlarang mulai 12 Maret 1966, sehari setelah Soeharto menerima Supersemar. Sehari sebelumnya, PKI masih menjadi partai sah dan terbesar di Indonesia, dan partai komunis terbesar ketiga di dunia. Tapi, pada tanggal itu, ratusan ribu warga negara Indonesia sudah dibunuh dengan tuduhan mendukung PKI.

Berkat Supersemar, Soeharto menjadi diktator militer Indonesia selama 32 tahun. Supersemar dijadikan alat pembenar bagi pembantaian PKI setengah tahun sebelumnya, dan pembantaian PKI dilanjutkan berbulan-bulan selanjutnya. Kurang dari setahun kemudian jumlah korban sekitar satu juta nyawa. Dampaknya melimpah hingga hari ini, ibarat air beracun tempat jutaan ikan bernama Indonesia berenang-renang.

DUA GENERASI ABSURD

Sejak itu, tersebar propaganda besar-besaran bertema "Pengkhianatan G30S/PKI". Kehidupan sosial diatur oleh sebuah kerangka logika dan retorika absurd, yang dari saat ke saat menjungkir-balikkan norma politik negara, sistem pendidikan dan pengetahuan umum di sekolah dan media massa, juga kehidupan sehari-hari.

Pembantaian terhadap PKI dikisahkan sebagai penumpasan terhadap "partai terlarang", padahal mereka sudah dibantai setengah tahun *sebelum* dilarang. Sejumlah menteri kabinet negara dan para pendukung setia Sukarno ditahan dan diadili rezim Orde Baru dengan tuduhan absurd, yakni memberontak terhadap pemerintahan yang mereka pimpin sendiri! Presiden Sukarno dikenai tahanan rumah, hingga meninggal dalam keadaan merana.

Kisah kejahatan tiada tara pada 1965-1966 *terhadap* korban yang dituduh "komunis" disebarluaskan secara terbalik sebagai kisah kejahatan, pengkhianatan, dan pemberontakan *oleh* komunis. Para pembunuhnya menampilkan diri sebagai korban kejahatan komunis, atau pahlawan yang berhasil menumpas komunis.

Pada 30 September 1965, beberapa gelintir perwira militer menengah yang menamakan diri Gerakan 30 September menculik dan membunuh tujuh perwira tinggi. Setelah pasukan Soeharto menumpas gerakan ini, disebarluaskan propaganda bahwa gerakan itu mewakili PKI. Pimpinan dan anggota Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), yang berafiliasi ke PKI, ditahan, diperkosa, dan disiksa. Tapi, dalam koran tentara, sejarah resmi, museum Lubang Buaya, dan film *Pengkhianatan G30S/PKI*, para korban itu digambarkan sebagai kaum tidak bermoral yang mencincang mayat tujuh jenderal. Hasil otopsi resmi, oleh dokter yang diangkat Soeharto, dinyatakan tidak ada mayat di Lubang Buaya yang disayat-sayat.

Banyak orang secara tidak sengaja ikut terbunuh atau terpenjara bersama puluhan ribu yang lain. Tidak penting apakah ada atau tidak kaitan mereka dengan Gerakan 30 September, semuanya divonis bersalah dengan stigma "terlibat G30S/PKI". Yang lebih absurd, sanak keluarga dan anak-cucu mereka yang belum lahir sudah dikutuk hukuman sipil dengan stempel stigma "terlibat G30S/PKI". Yang menjadi korban absurditas ini bukan hanya PKI dan keluarganya, melainkan juga akal sehat dua generasi warga bangsa pasca-1965. Selama 30 tahun mereka menjadi bulan-bulanan banjir propaganda, indoktrinasi, fitnah, penipuan sejarah, pembodohan, dan teror negara.

FILM SEBAGAI PROPAGANDA

Amburadulnya logika-retorika antikomunisme dalam masyarakat direkayasa negara dalam berbagai bentuk. Di tingkat dasar, dilancarkan berbagai kekerasan jasmaniah secara sistematik dan berkala. Di wilayah mental, cuci otak berlangsung lewat penataran, pidato resmi, pelajaran sejarah, berita media massa, museum, dan monumen. Tapi yang terpenting adalah film.

Sejak awal berkuasa, militer memahami kekuatan film sebagai alat propaganda. Pada 15 April 1969, Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Keter-

Film *40 Years of Silence.*

Film *The Year of Living Dangerously.*

tiban (Kopkamtib) mengeluarkan keputusan tentang dibentuknya "Projek Film Kopkamtib" untuk memproduksi film dokumenter sebagai "media *psywar*". Menurut Laporan Komnas HAM 2012, Kopkamtib merupakan lembaga yang paling bertanggung jawab atas kejahatan berat kemanusiaan dalam kurun 1965-1966.

Jauh sebelum film *Djakarta 1966* diedarkan, rezim Orde Baru telah membuat sejumlah film propaganda. Selain *Janur Kuning* (Alam Surawidjaja, 1979) dan *Serangan Fajar* (Arifin C. Noer, 1981) yang membesar-besarkan jasa Soeharto dalam perang di Yogyakarta 1945, ada dua film lain bertema gejolak politik 1965: *Pengkhianatan G30S/PKI* (1984) dan *Penumpasan Sisa-sisa PKI Blitar Selatan* (1986).

Film *Operasi X* (Misbach Yusa Biran, 1968) bertema mirip, dengan intelijen militer sebagai pahlawan. Sementara itu, beredar sebuah film drama produksi swasta hampir bersamaan waktu dengan *Djakarta 1966*, yakni *Gema Kampus 66* (Asrul Sani, 1988).

Di televisi, *Pengkhianatan G30S/PKI* (Arifin C. Noer, 1984) bukan satu-satunya film propaganda yang wajib disiarkan. Menurut Dirjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edi Sedyawati, sejak 1996, selalu ada film penunjang yang juga ditayangkan pada 30 September. Pada 1996 ditayangkan sinetron *Terjebak*, dan pada 1997 *Nyanyian Dua Bersaudara* dengan sutradara Dedi Setiadi dan penulis skenario Arswendo Atmowiloto.

Pada 1998, Wakil Presiden Habibie diangkat sebagai presiden pengganti Soeharto. Untuk memberi kesan pemerintahannya berbeda dengan Orde Baru, kewajiban tayang film *Pengkhianatan G30S/PKI* dihentikan pada September 1998. Namun semua televisi diwajibkan menayangkan trilogi sinetron antikomunis baru, *Bukan Sekedar Kenangan*, *Melacak Jejak Berkabut*, dan *Sumpah Kesetiaan*.

Puncak dari semua film propaganda antikomunis adalah *Pengkhianatan G30S/PKI* tadi. Bagi sebagian besar masyarakat, film ini menjadi satu-satunya sumber informasi resmi (sekaligus disinformasi dan misinformasi) yang tersedia, tentang apa yang mungkin terjadi di Jakarta 1965. Segala bentuk diskusi dan terbitan yang meragukan, apalagi berbeda dengan propaganda pemerintah, dilarang dengan ancaman hukum pidana bagi pelanggarnya. Kerangka bertutur dalam film ini membentuk kerangka utama logika-retorika masyarakat puluhan tahun berikutnya, hingga kini.

Pengkhianatan G30S/PKI wajib ditonton ratusan ribu siswa sekolah pada jam pelajaran, selain wajib ditayangkan semua televisi setiap 30 September. Film ini berdurasi empat setengah jam, melibatkan lebih dari 10 ribu pemain, memakan biaya terbesar, dan, menurut J.B. Kristanto (*Kompas*, 21/10/1984), mendatangkan keuntungan raksasa bagi para pengedar film di berbagai daerah untuk ukuran zamannya. Para siswa harus membeli karcis untuk menonton film wajib ini.

Karena bertujuan mendramatisasi kekejaman komunis, dan menciptakan kebencian terhadap mereka, film ini penuh adegan kekerasan. Sebuah berita koran berjudul "Demam dan Menjerit ketika Nonton Film G30S/PKI" melaporkan trauma para siswa yang pernah menyaksikan film wajib ini (*Yogya Post*, 30/9/1990). Padahal, sewaktu diputar awal di Istana, ada yang berkomentar beberapa adegan di film ini "kurang sadis".

Setahun setelah *Pengkhianatan G30S/PKI* beredar, majalah *Tempo* pada 1985 mengadakan survei. Kepada 900 responden di Jawa dan Sumatera, ditanyakan apa ancaman paling berbahaya terhadap Indonesia. Jawaban terbesar adalah bahaya bangkitnya kembali komunisme (33,65 persen), jauh melampaui korupsi yang dianggap bahaya kedua (18,42 persen). Pada awal abad ini, harian *Kompas* mengadakan jajak pendapat serupa pada 2002 serta 2003, dan hasilnya mirip temuan *Tempo*.

Pada 2000, *Tempo* mengadakan survei lagi terhadap lebih dari 1.000 responden dari tiga kota terbesar di Indonesia. Ditanya dari mana mereka belajar tentang sejarah 1965. Hasilnya, 90 persen responden menjawab dari film. Ketika ditanya berapa kali mereka menonton *Pengkhianatan G30S/PKI*, sebagian terbesar menonton dengan jumlah paling sering. Hanya 13 persen yang menonton sekali; 29 persen dua kali; 20 persen tiga kali, dan persentase ter-

besar (38 persen) sudah menonton film itu lebih dari tiga kali.

Kerangka berpikir *Pengkhianatan G30S/PKI* masuk ke sumsum tulang sebagian besar masyarakat. Orang swasta yang tertular kemudian ikut menebar kuman bertutur seperti film propaganda itu. Dengan beberapa perkecualian kecil, hampir semua karya sastra berlatar sejarah politik 1965-1966 menggambarkan tokoh kiri/komunis sebagai tokoh jahat, penghasut licik yang menjerumuskan orang baik, atau orang jujur tapi lugu sehingga tersesat oleh ajaran komunisme. Pembaca mendapat pesan seragam: bila tokoh-tokoh ini kemudian dibunuh, itu karena nasib buruk, atau salah mereka sendiri.

Ada banyak contoh novel yang mereproduksi propaganda antikomunisme ala Orde Baru, misalnya *Anak Tanahair: Secercah Kisah* (1985) oleh Ajip Rosidi, *Jalan Bandungan* (1989) oleh Nh. Dini, atau *Kubah* (1995), dan *Ronggeng Dukuh Paruk* (2003) oleh Ahmad Tohari. Juga novel *Atheis* (1949) yang ditulis Achdiat Karta Mihardja sebelum masa Orde Baru, tapi di masa Orde Baru dijadikan bacaan wajib sekolah, dicetak ulang lebih dari 30 kali dan difilmkan. Pesan serupa hadir dalam film pasca-Orde Baru, termasuk yang dinobatkan FFI sebagai film terbaik, misalnya *Gie* (2005) dan *Sang Penari* (2011).

GUGATAN PASCA-1998

Indonesia sudah berganti empat presiden sejak Soeharto turun, tapi semangat antikomunisme nyaris tak berubah. Pada 7 Agustus 2003, DPR malah meningkatkan status beberapa aturan antikomunisme dan anti-Sukarno dari masa darurat 1966 yang berstatus "sementara". Pada awal abad ke-21, kaum muda menemukan keasyikan baru membuat film dokumenter dan film pendek. Agus Mediarta, Lulu Ratna, dan Kantika van Heeren pernah membahas topik ini secara terpisah.

Dengan semangat menggebu, modal paspasan, dan bantuan minim dari penderma, para sineas film indie mendirikan jaringan. Saya pernah mengikuti kegiatan mereka untuk meneliti sejauh mana tema pembantaian 1965-1966 tampil dalam karya mereka di masa demokratisasi teknologi media sekarang ini. Saya temukan belasan judul dengan berbagai latar belakang pembuat, kualitas teknis, dan lingkup peredaran.

Lembaga Kreativitas Kemanusiaan pimpinan Putu Oka Sukanta, penyair, mantan pegiat Lekra, dan korban politik 1965, menjadi salah satu produser paling rajin. Film mereka antara lain berjudul *Menyemai Terang dalam Kelam* (2006), *Perempuan yang Tertuduh* (2007), *Tumbuh dalam Badai* (2007), *Seni Ditating Jaman* (2008), *Tjidurian 19* (2009), dan *Plantungan: Potret Derita dan Kekuatan Perempuan* (2011).

Film bertema 1965 juga diproduksi organisasi nonpemerintah dalam bidang hak asasi manusia: *Bunga-tembok* (2003), *Kawan Tiba Senja: Bali seputar 1965* (2004), *Kado untuk Ibu* (2004), *Putih Abu-abu: Masa lalu Perempuan* (2006), dan *Sinengker: Sesuatu yang Dirahasiakan* (2007). Karya-karya di atas (kecuali *Tjidurian 19*) menekankan advokasi gugatan keadilan. Lain lagi karya seniman film yang menonjol dalam kualitas teknik, aspek jurnalisme, atau estetika: *Puisi tak Terkuburkan* (Garin Nugroho, 1999), *Djedjak Darah: Surat teruntuk Adinda* (2004), dan *Mass Grave* (2002). Dalam hal estetika, *Tjidurian 19* ditempatkan di sini juga.

Semua karya itu berjasa membongkar kejahatan terhadap kemanusiaan dan luka bangsa yang selama ini ditabukan negara. Berbagai film itu juga memberikan suara dan simpati bagi para korban yang selama ini dibungkam. Karya sineas Indonesia ini melengkapi beberapa film dokumenter karya sineas asing dengan tema serupa: *The Shadow Play* (2001), *Terlena: Breaking of a Nation* (2004), dan *40 Years of Silence: An Indonesian Tragedy* (2009).

Beberapa film cerita berlatar belakang sejarah politik 1965 diproduksi dalam negeri: *Gie* (Riri Riza, 2005), *Lentera Merah* (Hanung Bramantyo, 2006), dan *Sang Penari* (Ifa Isfansyah, 2011), selain film asing *The Year of Living Dangerously* (Peter Weir, 1983). Pada November 2008, Eros Djarot batal melanjutkan syuting film *Lastri*, sebuah film drama romantik berlatar belakang 1965, karena pengambilan gambar yang sudah mendapat izin petugas lokal di Colomadu, Jawa Tengah, diserbu Front Pembela Islam dan Hizbullah Bulan Bintang dengan tuduhan film itu menyebarkan komunisme.

Kini peluncuran film dokumenter *The Act of Killing* (*Jagal*) (2012) membuka bab baru sejarah film dan sejarah 1965. Inilah film dokumenter tentang 1965 terbaru dan terdahsyat. Semoga film ini dapat segera disaksikan sebanyak mungkin generasi muda Indonesia.

Banyak orang mengkampanyekan slogan "menolak lupa" terhadap kejahatan 1965. Memang telah terjadi amnesia sejarah dalam lingkup bangsa-negara Indonesia. Tapi, bagi sebagian besar anggota masyarakat, khususnya generasi muda, yang perlu dilawan adalah ketidaktahuan. Bukan lupa. Bagaimana bisa lupa jika tidak tahu sejarah sama sekali? •

SEJAK AWAL BERKUASA, MILITER MEMAHAMI KEKUATAN FILM SEBAGAI ALAT PROPAGANDA. PADA 15 APRIL 1969, PANGLIMA KOMANDO OPERASI PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN (KOPKAMTIB) MENGELUARKAN KEPUTUSAN TENTANG DIBENTUKNYA "PROJEK FILM KOPKAMTIB" UNTUK MEMPRODUKSI FILM DOKUMENTER SEBAGAI "MEDIA *PSYWAR*".

CATATAN:
Bahan untuk tulisan ini dicuplik dari penelitian lebih besar yang sedang dikerjakan penulis, dengan dukungan dari The Australian National University dan Australian Research Council.

JOSHUA OPPENHEIMER:

MEMBUNUH, BAGI ANWAR, ADALAH SEBUAH AKTING

BAGI Joshua Oppenheimer, Anwar hanyalah simbol dari kekerasan yang terjadi di Indonesia pada 1965. Menurut taksirannya, ada 10 ribu, bahkan mungkin 100 ribu, "Anwar" lain selama pembantaian pasca-1965 itu. Lelaki kelahiran Texas, Amerika Serikat, 1974, ini mengaku, selama pembuatan film, ia melakukan perjalanan yang amat sangat menyakitkan. Selama tujuh tahun ia bergaul dengan Anwar. Kepadanya, Anwar secara jujur dan berani bercerita mengenai pembunuhan yang dilakukannya. Anwar mungkin kecewa terhadap hasil film yang dibuat Oppenheimer.

Joshua Oppenheimer belajar film di Harvard University dan meraih PhD di Central Saint Martins College of Art and Design, University of the Arts London, dengan sebagian dari *footage* awal film *Jagal* sebagai materi disertasinya.

Sebelum membuat *The Act of Killing (Jagal)*, dia telah membuat sejumlah film, seperti *The Globalization Tapes*, yang mengungkap masalah buruh perkebunan di Sumatera Utara; *The Entire History of the Louisiana Purchase*, yang meraih penghargaan Gold Hugo sebagai film pendek eksperimental terbaik di Chicago Film Festival; dan *These Places We've Learned to Call Home*, yang meraih Gold Spire di San Francisco Film Festival. Dia kini menjadi peneliti senior di Dewan Riset Kesenian dan Humaniora Inggris.

Di tengah kesibukannya memperkenalkan *Jagal* di Toronto, Oppenheimer menjawab melalui surat elektronik sejumlah pertanyaan dari *Tempo*.

Apa yang hendak Anda katakan melalui film ini?

Saya ingin menunjukkan kebudayaan seperti apa yang dibangun ketika para pembunuh menang, berkuasa, memerintah, serta memimpin masyarakat. Mereka disanjung sebagai pahlawan, jadi tokoh masyarakat dan panutan, serta ditakuti sekaligus dihormati sebagai pelindung bangsa dari sebuah teror berupa fantasi yang mereka ciptakan sendiri. Anwar dan filmnya hanyalah simbol dari seluruh peristiwa kekerasan yang dialami orang Indonesia sejak 1965.

Di film itu Anwar berakting memerankan dirinya.

Membunuh, bagi Anwar, adalah sebuah akting. Ketika dia berdansa *cha-cha* di lantai atas bekas kantornya, hal itu kelihatannya menjadi simbol impunitas yang dinikmatinya. Dia menari di tempat ratusan orang yang dibunuhnya sendiri. Anwar kepada saya menjelaskan bahwa ia belajar dansa karena ingin melupakan apa yang terjadi.

Anwar melakukan peragaan ulang pembunuhan yang pernah dilakukan. Ini sesungguhnya hal

sulit bagi dia, kru film, dan penonton. Film ini menunjukkan bahwa akting adalah bagian dari pembunuhan. *Killing is always an act*. Bila dimaknakan memang mengerikan. Peragaan itu bukan hanya peragaan ulang, melainkan juga asli....

Apakah Anda, Anwar, dan Adi sudah mendiskusikan semua risiko dari pembuatan film ini?

Perbincangan mengenai risiko film ini muncul dan bahkan terekam dalam film. Ketika Adi Zulkadry (jagal, sahabat Anwar) mengatakan, jika film ini sukses, pandangan masyarakat akan berbalik, bukan hanya 180 derajat, melainkan 360 derajat mengenai siapa yang lebih kejam, PKI atau lawan PKI. Mereka tahu risiko terburuk apa yang mungkin muncul dari film ini.

Mereka tidak merasa ada yang salah jika publik menilai bahwa mereka lebih kejam daripada PKI. Bukan hanya merasa, mereka memang betul-betul berada di atas angin. Saya melihat generasi yang lebih muda dari Anwar memerlukan citra menakutkan, teror itu, sebagai basis kekuasaan dan pengaruhnya di masyarakat. Betapapun demikian, sebuah kesalahan besar jika Anwar kemudian dijadikan kambing hitam, sebagai maskot para pembunuh tahun 1965, karena perannya dalam film. Ada kurang-lebih 10 ribu, mungkin 100 ribu, orang seperti Anwar di seluruh Indonesia.

Kepada sebuah media, Anwar mengklaim telah meminta Anda memutar film itu setelah dia meninggal.

Saya tegaskan di sini, itu sama sekali tidak benar. Jika benar Anwar pernah mengatakannya, itu disampaikannya untuk pertama kali kepada wartawan baru-baru ini. Selama tujuh tahun berbincang, bekerja bersama dalam film, mengobrol pada kesempatan senggang, berbincang-bincang di luar syuting film atau wawancara (*off-screen* atau *on-screen*), di mana pun, kapan pun, Anwar tidak pernah mengatakan hal itu kepada saya atau kepada satu pun kru kami. Bahkan, ketika saya menelepon Anwar buat memberi tahu bahwa film ini akan segera diluncurkan dalam Festival Film Internasional Toronto seminggu sebelum pemutaran, ia menyampaikan keinginannya untuk hadir.

Mengapa Anda memilih metode penyutradaraan yang melibatkan sumber di dalam pembuatan film tentang dirinya sendiri?

Saya mengembangkan metode ini karena saya yakin "dokumenter" adalah istilah yang tak akurat. Pembuat dokumenter menganggap dirinya mendokumentasikan realitas apa adanya sebagaimana seharusnya terjadi tanpa kehadiran kamera. Hal ini mungkin benar dalam situasi seperti pertandingan sepak bola. Bahkan kampanye politik sekalipun ditata untuk kamera, yang pasti akan menyorot mereka. Sesungguhnya, kita menciptakan sebuah realitas baru setiap kali kita membuat film bersama tokoh film kita. Karena itu, daripada berusaha membuat simulasi dari realitas yang sewajarnya ada jika kita tidak membuat film (sebagaimana biasanya dilakukan pembuat "dokumenter"), kenapa tidak menciptakan sebuah realitas yang menawarkan penjelasan yang paling terang atas pertanyaan yang kita ajukan? Bisa dibilang saya menciptakan sebuah dokumenter observasional mengenai imajinasi narasumber, bukan sebuah dokumenter observasional mengenai kehidupannya sehari-hari.

Bagaimana pengalaman Anda selama membuat film ini?

Sesungguhnya pembuatan film selama ini adalah sebuah perjalanan yang amat sangat menyakitkan bagi saya. Saya masih merasa dekat dengan Anwar, bahkan jika ia kecewa terhadap filmnya sekalipun. Awalnya Anwar ingin membuat film yang mengagungkan pembunuhan massal—sesuatu yang tak mungkin jadi tujuan saya. Karena itu, dia mungkin kecewa. Tapi, pada saat yang sama, tujuan Anwar berubah, mungkin tanpa disadarinya. Ia memilih menunjukkan kepada kami sebuah cara yang sangat otentik sekaligus sangat menyakitkan yang memaparkan betapa tindakan pembunuhan itu adalah sebagian dari jiwa dan kemanusiaannya. Menyelami relung-relung gelap itu bersama Anwar sungguh menyeramkan. Peragaan ulang selalu menyeramkan.

Sering, dalam proses pembuatan film, saya tidak bisa tidur. Kalaupun bisa, saya bermimpi buruk. Kru saya tentu saja harus melakukan hal yang sama, dan pasti lebih berat, karena mereka orang Indonesia. Ini negeri mereka. Mereka membawa pulang ke rumah sebuah pengetahuan bahwa di sekeliling mereka bercokol orang-orang seperti Anwar dan kawan-kawan Anwar, yang bahkan sampai hari ini beberapa ada di posisi terpenting dalam struktur kekuasaan.

Setelah bersama Anwar selama tujuh tahun, bagaimana Anda melihat sosok seorang jagal?

Dari awal saya meyakinkan diri saya bahwa semua pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, Hitler sekalipun, bukanlah seorang monster, melainkan manusia biasa yang sama seperti kita dan bisa mengambil keputusan yang salah. Para algojo itu juga menghadapi persoalan psikologis untuk mengatasi trauma yang mereka alami, mungkin tanpa disadari atau disadari tapi kemudian dengan sengaja disembunyikan. Sepanjang proses pembuatan film, saya melihat Anwarlah yang paling berani untuk jujur dan terbuka menceritakan pengalaman dan kegelisahannya. Ia juga yang paling kelihatan berubah dengan merenungi apa yang dijalani dan diperankannya dalam film.

Setelah melihat bagaimana bangganya para jagal atas tindakan mereka dulu itu, apakah ada kemungkinan rekonsiliasi antara pelaku dan korban?

Persoalan utama rekonsiliasi pada dasarnya bukan terletak pada sisi korban atau masalah prosedural, melainkan pada kemauan para pembantai untuk menggunakan imajinasinya dan melihat perbuatannya sebagai sesuatu yang salah dan jahat. Persoalan rekonsiliasi ada pada para pelaku yang tak mau mengakui kesalahan dan kejahatannya akibat upaya pembenaran yang sedemikian gencar, baik yang mereka tanamkan kepada diri sendiri maupun yang dicangkok dari propaganda rezim yang turut mereka bangun.

Kebanggaan yang mereka tunjukkan memiliki banyak lapisan makna. Kebanggaan itu bercerita tentang jiwa rapuh yang kerdil dan tak berani mengakui perbuatannya sebagai sesuatu yang salah dan jahat; dan karenanya diberi kedok narasi perjuangan heroik. Kebanggaan itu akan runtuh dengan sendirinya jika semua tiang penyangga dan fungsinya dirontokkan. Dari situlah terbuka sebuah kemungkinan rekonsiliasi yang sejati. Tidak ketika rezim para pembantai ini masih menjadi pemenang dan berkuasa. •

JALAN LAIN PENYELESAIAN TRAGED

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia menyimpulkan bahwa terdapat banyak bukti permulaan untuk menduga telah terjadi sembilan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia dalam peristiwa 1965. Kejahatan kemanusiaan itu meliputi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran secara paksa, perampasan kebebasan fisik, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa.

Pembunuhan massal. Peristiwa ini dirancang dan digerakkan dengan garis komando yang jelas, dan dilaksanakan dengan berbagai cara: pembunuhan dilakukan secara langsung oleh militer, atau dengan menggunakan tangan-tangan sipil yang terlatih sehingga terkesan terjadi konflik horizontal. Korban pembunuhan berkisar 500 ribu hingga 3 juta orang.

Pemenjaraan. Ada dua model pemenjaraan. Pertama, mobilisasi ke kamp konsentrasi, seperti di Pulau Buru, RTC Tangerang, LP Nusakambangan, atau Plantungan (khusus perempuan). Para korban menjalani hukuman 5-10 tahun. Semua yang dikirim ke kamp konsentrasi itu tidak melalui proses pengadilan, tapi hanya berdasarkan dugaan bahwa mereka adalah tokoh-tokoh golongan B. Rantai komando sangat jelas, yakni Kopkamtib sebagai wujud pelaksanaan Surat Perintah 11 Maret.

Kedua, pemenjaraan terhadap orang-orang yang dikategorikan sebagai "Golongan C". Di sini terdapat perlakuan-perlakuan dari aparat pelaksana yang di luar batas kemanusiaan. Penyiksaan, pemerkosaan, dan perendahan martabat manusia yang bentuknya bermacam-macam, sehingga para korban mengalami trauma psikologis dan fisik yang luar biasa. Pada akhirnya mereka dipenjarakan di penjara-penjara di kota masing-masing, yang lamanya berkisar satu hingga tiga tahun. Ini pun tidak melalui pengadilan. Garis komandonya juga dari Kopkamtib. Jumlah korban yang ditangkap dan ditahan mencapai 1,8 juta orang, dan yang dikirim ke pengasingan Pulau Buru mencapai 20 ribu orang secara bertahap.

Akan halnya penghilangan hak-hak sipil dan politik, soal ini memiliki dua model yang utama: Pertama, orang-orang yang telah mengalami pemenjaraan tidak dapat hidup selayaknya seperti warga negara biasa. Ada pengawasan terus-menerus, data pribadi serta keluarga mereka terdapat di semua kantor desa/kecamatan, dan terdapat kode-kode tertentu yang membedakan mereka dari warga biasa, yang tercantum dalam kartu tanda penduduk. Data ini belum dihapus sampai sekarang, dan pergerakan orang-orang ini tetap terpantau, walaupun sudah berpindah domisili. Garis komando diberikan melalui Departemen Dalam Negeri.

Kedua, orang yang tidak pernah mengalami pemenjaraan dan penyiksaan fisik tapi dikenai predikat "tidak bersih lingkungan", yang definisinya sangat longgar sehingga siapa saja yang diduga terkait secara darah, pertemanan, atasan-bawahan, dan sebagainya dengan orang-orang yang dikategorikan sebagai Golongan B dan C akan mendapat perlakuan khusus yang bisa menghilangkan hak-hak mereka, khususnya dalam jabatan pemerintahan, guru, karyawan di perusahaan milik negara, bahkan swasta. Akibatnya, banyak yang kehilangan jabatan dan pekerjaan atau kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, hak pilih, dan sebagainya. Jumlah korbannya tentu lebih banyak dari yang terbunuh ataupun yang ditangkap dan dipenjarakan. Garis komandonya melalui semua kementerian, Kejaksaan Agung, tentara nasional, dan kepolisian.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merekomendasikan agar Jaksa Agung dapat menindaklanjutinya temuan ini dengan penyidikan. Kita harus menghormati rekomendasi ini. Bagaimanapun, penyelesaian atas pelanggaran HAM dalam tragedi 1965 merupakan tanggung jawab negara. Seyogianya presiden sebagai kepala negara menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM tersebut.

Penyelesaian pelanggaran HAM melalui proses penyidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan Agung dilakukan dengan cara proyustisia, tapi menurut saya akan memerlukan waktu cukup lama. Juga proses pemeriksaan di pengadilan HAM *ad hoc* yang dibentuk melalui keputusan presiden atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat.

Penyelesaian dengan menggunakan model keadilan transisional, yang memadukan pengadilan HAM dan pengampunan seperti dalam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, juga tidak mungkin dilakukan segera karena untuk keperluan itu tidak ada perangkat hukumnya setelah Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk mempersiapkan UU KKR lagi juga perlu waktu yang tidak mungkin dalam waktu dekat.

Karena itu, menurut saya, perlu diusulkan kemungkinan penyelesaian nonyudisial, yakni penyelesaian secara politik dan kultural. Kemungkinannya sangat besar jika disertai kemauan politik yang sangat besar dari presiden. Presiden bisa mencari model yang tepat, belajar dari pengalaman negara-negara yang pernah mengalami masalah seperti Indonesia.

Sejauh ini, model yang bisa kita pelajari ada tiga. Pertama, Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court), sebagaimana diterapkan dalam kasus pembantaian dan penghilangan etnis muslim di Bosnia dan tragedi Rwanda. Perangkat hukum acaranya menggunakan Statuta Roma.

965

M. IMAM AZIZ, ANGGOTA MAJELIS SYARIKAT INDONESIA, YOGYAKARTA, DAN AKTIF DALAM UPAYA REKONSILIASI TRAGEDI POLITIK 1965

Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma.

Kedua, model Afrika Selatan dan Amerika Latin, yang menggunakan paradigma keadilan transisional (*transitional justice*), dengan mengadakan pengadilan terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan tapi setelah itu para pelaku diberi amnesti. Ini mengandaikan adanya perubahan politik mendasar, di mana terjadi pergantian rezim secara total, sehingga rezim baru dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk memberikan pengampunan kepada pelaku kejahatan kemanusiaan (rezim lama). Bagi korban, rezim baru memberikan pemulihan, ganti rugi atas penderitaannya.

Ketiga, model Australia. Perdana Menteri Kevin Rudd membuat pernyataan permintaan maaf secara resmi di depan DPR kepada korban *stolen generation* (24 Februari 2008). Sebelumnya, pemerintah membentuk tim independen untuk investigasi, dan tim telah menyampaikan laporan akhir. Permintaan maaf secara resmi itu menjadi tonggak bagi rekonsiliasi nasional, mengajak semua pihak untuk menatap ke depan, dan memulai hidup baru saling berdampingan dengan hak dan kewajiban yang sama. Permintaan maaf dibarengi dengan rencana tindak lanjut untuk mengakhiri jurang pemisah antara masyarakat asli dan non-asli Australia dalam membangun harapan baru, pendidikan, dan kesempatan yang sama dalam ekonomi serta politik. Dalam model Australia, pemerintah federal tidak menyebutkan adanya kompensasi.

Prioritas penyelesaian nonyudisial tragedi 1965, menurut saya, adalah pemulihan korban. Presiden dapat mewakili "peran" itu dengan mengeluarkan pernyataan permintaan maaf dan mengakui terjadinya pelanggaran HAM. Dengan demikian, para korban akan kembali menjadi warga negara seutuhnya dan setara. Agar tragedi kemanusiaan itu tidak terulang, pemerintah berkewajiban mengubah peraturan dan kebijakan yang selama ini menjadi alat legal untuk menyingkirkan warga yang berbeda pandangan politik.

Penyelesaian atas tragedi 1965 masih akan menimbulkan kontroversi, baik dari institusi negara, khususnya TNI, maupun kelompok masyarakat yang belum bersedia membicarakan perlunya penyelesaian masalah masa lalu. Tapi membiarkan masalah ini berlarut-larut akan membuatnya menjadi beban bangsa ini, dari generasi ke generasi.

AMBA

"Hari ini kau kembali dalam diriku seperti bintang di langit itu–sesuatu yang ada di antara kerdip dan hilang, yang selalu muncul pada titik di mana lupa menyiapkan kekosongan."

BHISMA, dokter yang dibuang ke Pulau Buru dalam novel Laksmi Pamuntjak, *Amba*, menulis kalimat pendek itu bertanggal 28 Desember 1973. Ia menuliskannya untuk perempuan yang ditinggalkannya di Jawa, dan kemudian menyimpan surat itu di bawah sebatang pohon. Ia tak pernah tahu apakah Amba, perempuan itu, akan menemukan dan membacanya; dokter itu tak pernah kembali, setelah hilang sejak 1965.

Novel ini, yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama pekan ini, secara tak langsung datang kepada kita, "pada titik di mana lupa menyiapkan kekosongan". Seorang lenyap; untuk menegaskan absensinya, yang ditampilkan novel ini hanyalah sejumlah surat yang digali dari bawah pohon di satu sudut Pulau Buru. Yang kita dapatkan suara seorang manusia, Bhisma, yang berada "di antara kerdip dan hilang".

Amba adalah salah satu novel yang menegaskan rasa cemas yang merundung kita di Indonesia hari ini: cemas bila "peristiwa 1965" yang menakutkan itu akan hilang, tanggal dari ingatan bersama. Kita tak ingin kembali buas.

Tak janggal bila akhir-akhir ini peristiwa itu hadir dalam sastra (sebelum *Amba* misalnya ada *Candik Ala 1965* Tinuk R. Yampolsky, *Blues Merbabu* Gitanyali, dan setelah *Amba*, akan ada novel *Pulang* Leila S. Chudori). Yang membuat *Amba* berbeda adalah ceritanya tentang kehidupan para tahanan politik di Pulau Buru, lewat surat-surat Bhisma yang disembunyikan: ada kemarahan terhadap kekejaman, tapi juga humor, rasa terharu, bahkan optimisme. Tiap surat menggugah.

Benarkah demikian dulu? Sebuah novel tentang 1965 umumnya diminta agar ia "meluruskan sejarah". Generasi kini sadar, mereka tak diberi gambaran yang "benar" tentang yang terjadi di sekitar kekerasan politik 1965. "Orde Baru" mendesakkan penjelasan mereka, lewat film yang harus ditonton, buku sejarah dan media massa yang dikendalikan, juga teror dan sensor. Sebagai reaksi, kini tampak usaha membebaskan diri dari regimentasi ingatan selama 33 tahun itu.

Tadi saya sebut, kita berada ketika "lupa menyiapkan kekosongan". Kekosongan akan gairah terhadap yang benar dan adil, kekosongan dari hal-hal yang bukan sekadar hidup yang praktis. Mungkin sebab itu, kini fiksi berdasarkan sejarah lebih terasa "benar" ketimbang penulisan sejarah alias historiografi.

Tapi sebenarnya ada kedekatan di antara kedua jenis penceritaan tentang masa lalu itu.

Bagaimanapun, masa lalu adalah masa kini dengan sebuah adaptor. Kita hidup hari ini dengan ingatan yang tak mesti persis tentang hari kemarin. Kita butuh mekanisme untuk menyesuaikan X yang terkenang dengan X-1 yang terceritakan.

Maka historiografi bukanlah sebuah replika pengalaman. Tentu akan dikatakan, seorang penulis sejarah bekerja dengan petunjuk institusional–diteguhkan oleh akademi atau komunitas sejarawan yang diakui–agar mendapatkan presentasi yang se-"obyektif" mungkin. Tapi setidaknya ada dua hal yang sering membuat buku sejarah tak bisa mewakili sebuah pengalaman yang hidup.

Yang pertama: dorongan naratifnya. Cerita sejarah perlu alur, bahkan mungkin perlu ketegangan, dan juga klimaks. Kalau itu tak ada, pembacanya akan membentuknya sendiri. Tapi hidup, apalagi hidup sejumlah besar manusia, tak terhingga majemuknya, tak jelas suspens dan klimaksnya–sifat yang akan tampak bila kita buat rekaman film tentang hidup kita dari menit ke menit katakanlah selama 45 tahun. Di hadapan itu, penulis sejarah perlu "bentuk" dalam narasi. Karyanya tak berbeda jauh dari seorang penulis novel.

Yang kedua: kehendak "rasionalitas". Satu kejadian didorong untuk bisa "masuk akal", terutama harus diletakkan dalam hubungan sebab-dan-akibat. Dalam kehendak "rasionalitas", tak ada yang tanpa penjelasan; tak ada asap kalau tak ada api.

Namun penjelasan yang "masuk akal", sebagaimana hubungan sebab-dan-akibat, sebenarnya hanyalah bentukan pikiran manusia–tepatnya sang penulis sejarah yang menganalisis dan mengaitkan satu kejadian dengan kejadian lain. Padahal banyak hal yang *contingent*, serba mungkin apa jadinya dan asal-usulnya. Tiap ikhtiar naratif untuk meletakkan mereka dalam sebuah kerangka–dengan alur yang rapi dan hubungan sebab-akibat yang "masuk akal"–menyebabkan historiografi beberapa meter menjauh dari "yang benar". Apalagi bila kerangka itu ditentukan sebuah kekuasaan yang ingin membuat buku sejarah sebagai legitimasi diri.

Fiksi, atau sastra, bisa lebih bebas dari kerangka yang menjerat itu. Sastra tak "mengingat", dalam arti mengulang yang sudah. Sastra "mencipta". Ada kata-kata Mark Twain yang terkenal, *"When we remember we are all mad, the mysteries disappear and life stands explained."* Sastra menyelamatkan misteri dari sikap takabur para penjelas. Sastra bersedia menempuh yang tak "masuk akal".

Mungkin itu sebabnya *Midnight's Children* Salman Rushdie membaurkan sejarah India modern dengan mithologi dan dongeng fantastis, diperkaya sikap bermain-main dengan alegori dan kata yang bisa lucu. *Amba* juga membiarkan titik-titik misteri. Ia punya puisi. Tapi ia memilih bentuk yang lebih "realistis", dengan membiarkan benturan antara mithos (kisah Bhisma dan Amba dalam *Mahabharata*) dan sejarah, antara sejarah dan kehidupan orang seorang. Novel ini, dengan riset yang mengesankan, tak bermain-main.

Tanpa memperpanjang yang tragis dan seram dari 1965, *Amba* tampaknya menyadari satu hal, dan ini dibawakannya dengan elegan: luka sejarah bisa disembuhkan, tapi tak sepatutnya menyebabkan orang ketawa. ●***Goenawan Mohamad***